



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu antar lintas Perangkat Daerah, instansi terkait dan/atau para pemangku kepentingan terkait dalam penyiapan perumusan, penyusunan, dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kabupaten menyelenggarakan fungsinya yang salah satunya adalah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pasal 13 ayat (3), dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 71);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
  8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD Kabupaten Kayong Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah untuk periode tahun 2024-2026.
7. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan periode RPD Kabupaten Kayong Utara.
8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kayong Utara yang selanjutnya disebut TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah yang pembentukannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan RPKD Tahun 2024-2026.

Pasal 3

- (1) RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
  - a. narasi RPKD, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Bab I meliputi pendahuluan, yang terdiri atas:
      - a) latar belakang;
      - b) maksud dan tujuan;
      - c) dasar hukum; dan
      - d) sistematika penulisan.
    2. Bab II meliputi kondisi umum Daerah, yang terdiri atas:
      - a) kondisi geografi dan demografi wilayah; dan
      - b) struktur dan perekonomian.
    3. Bab III meliputi profil kemiskinan Daerah, yang terdiri atas:
      - a) konsep kemiskinan; dan
      - b) analisis karakteristik secara makro dan mikro.
    4. Bab IV meliputi prioritas program, yang terdiri atas:
      - a) *multidimension poverty index*;
      - b) pengembangan logika program;
      - c) analisis keterkaitan;
      - d) analisis kondisi fiskal;

- e) analisis anggaran pendapatan;
  - f) analisis anggaran belanja; dan
  - g) analisis faktor pendorong dan penghambat intervensi.
5. Bab V meliputi lokasi prioritas, yang terdiri atas:
- a) isu strategis; dan
  - b) analisis pengelompokan wilayah kecamatan; dan
  - c) analisis pengelompokan wilayah desa.
6. Bab VI meliputi penutup.
- b. matriks prioritas program.
- (2) Ketentuan mengenai narasi RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan mengenai matriks prioritas program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi bagian dari dokumen RPD Kabupaten Kayong Utara.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai penjabaran dari strategi dan program yang merupakan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen rancangan rencana kerja tahunan dan/atau rencana aksi tahunan di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran di bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
  - c. acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

#### Pasal 5

RPKD dapat dilakukan penyesuaian dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan.

#### Pasal 6

- (1) Bupati melalui TKPK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD di Daerah.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada gubernur melalui wakil gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan RPKD dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 14 April 2023

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 16







## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami Panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, dengan Ridho, Taufik dan Hidayah-Nya, Alhamdulillah Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026 merupakan Dokumen Perencanaan khusus Bidang Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang menjadi salah satu bagian dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah khususnya yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara, sesuai dengan Matriks Program di bidang penanggulangan kemiskinan. Dokumen ini juga dijadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara.

Semoga Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026 dapat terintegrasi dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026, selanjutnya dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah sehingga seluruh program kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan dan semoga Allah SWT memberikan kekuatan untuk melaksanakan tugas dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara.

Sukadana, 2023



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	4
1.3. Dasar Hukum .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KONDISI UMUM DAERAH .....</b>	<b>10</b>
2.1. Geografi dan Demografi Wilayah .....	10
2.2. Struktur dan Perekonomian .....	14
<b>BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH.....</b>	<b>22</b>
3.1. Konsep Kemiskinan .....	22
3.2. Analisis Karakteristik Kemiskinan .....	23
<b>BAB IV PRIORITAS PROGRAM .....</b>	<b>63</b>
4.1. <i>Multidimension Proverty Index</i> (MPI) .....	66
4.2. Pengembangan Logika Program ( <i>Theory of Change</i> ) .....	79
4.3. Analisis Keterkaitan ( <i>Causal Relationship</i> ).....	85
4.4 Analisis Kondisi Fiskal .....	88
4.5. Analisis Anggaran Pendapatan .....	91
4.6. Analisis Anggaran Belanja .....	98
4.7 Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Intervensi.....	103
<b>BAB V LOKASI PRIORITAS .....</b>	<b>106</b>
5.1. Isu Strategis .....	106
5.2. Analisis Pengelompokan Wilayah Kecamatan .....	108
5.3 Analisis Pengelompokan Wilayah Desa .....	176
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>136</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kayong Utara .....	5
<b>Tabel 2.1</b>	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020 dan 2021.	12
<b>Tabel 2.2</b>	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Rinci Per Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021	13
<b>Tabel 2.3</b>	Distribusi Persentase masing-masing Sektor terhadap PDRB Kabupaten Kayong Utara Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2017 – 2021 .....	15
<b>Tabel 2.4</b>	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kayong Utara (Juta Rupiah), Tahun 2017 – 2021 .....	17
<b>Tabel 2.5</b>	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kayong Utara (Juta Rupiah), Tahun 2017 – 2021 .....	18
<b>Tabel 2.6</b>	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 – 2021 .....	20
<b>Tabel 3.1</b>	Analisis Keterkaitan Indikator Kemiskinan terhadap 4 (empat) Perspektif di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021.....	36
<b>Tabel 3.2</b>	Perbandingan Capaian Indikator Infrastruktur Dasar Perumahan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2021.....	46
<b>Tabel 3.3</b>	Perbandingan Capaian Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2021.....	52
<b>Tabel 3.5</b>	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 – 2021 .....	60



<b>Tabel 3.6</b>	Distribusi Persentase masing-masing Sektor terhadap PDRB Kabupaten Kayong Utara Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2017 – 2021 .....	61
<b>Tabel 4.1.</b>	Dimensi, Variabel, dan Konsep/Definisi Penghitungan MPI ...	68
<b>Tabel 4.2.</b>	MPI Kalimantan Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021 .....	70
<b>Tabel 4.3.</b>	MPI Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021 .....	70
<b>Tabel 4.4.</b>	MPI Kayong Utara Menurut Dimensi Tahun 2019-2021 .....	71
<b>Tabel 4.5.</b>	Kontribusi Tiap Dimensi Pembentuk MPI Kayong Utara Tahun 2019-2021 .....	72
<b>Tabel 4.6.</b>	Kontribusi Tiap Indikator Pembentuk MPI Kayong Utara Tahun 2019-2021 .....	73
<b>Tabel 4.7.</b>	Output Uji Korelasi antara MPI dengan PO Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2021 .....	77
<b>Tabel 4.8</b>	Struktur APBD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017–2021..	86
<b>Tabel 4.9</b>	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017–2021 (Rupiah) .....	90
<b>Tabel 4.10</b>	Pendapatan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017–2021 .....	93
<b>Tabel 4.11</b>	Perkembangan Ruang Fiskal Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021.....	94
<b>Tabel 4.12</b>	Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021.....	96
<b>Tabel 4.13</b>	Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2017-2021 .....	99
<b>Tabel 4.14</b>	Proporsi Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2017-2021 .....	99
<b>Tabel 4.15</b>	Proporsi Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2017-2021 .....	100



<b>Tabel 4.16</b>	Perkembangan Fiskal Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021 .....	101
<b>Tabel 5.1.</b>	Posisi Kuadran Kecamatan Menurut Variabel Kabupaten Kayong Utara .....	125
<b>Tabel 5.2.</b>	Kelompok Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kayong Utara Hasil Analisis Cluster .....	132



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b>	Peta Administrasi Kabupaten Kayong Utara .....	10
<b>Gambar 2.2</b>	Jumlah keluarga miskin menurut Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 .....	14
<b>Gambar 2.3</b>	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 – 2021 .....	19
<b>Gambar 3.1</b>	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016-2021 .....	24
<b>Gambar 3.2</b>	Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016-2021 .....	25
<b>Gambar 3.3</b>	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016-2021 .....	26
<b>Gambar 3.4</b>	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kayong Utara periode Tahun 2016-2021 .....	27
<b>Gambar 3.5</b>	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kayong Utara periode Tahun 2016-2021 .....	28
<b>Gambar 3.6</b>	Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp per Kapita per Bulan) Kabupaten Kayong Utara periode Tahun 2016-2021 .....	29
<b>Gambar 3.7</b>	Posisi Relatif Garis Kemiskinan (Rp) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Barat .....	30
<b>Gambar 3.8</b>	Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten Kayong Utara diantara Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 .....	31
<b>Gambar 3.9</b>	Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kayong Utara Diantara Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 .....	32
<b>Gambar 3.10</b>	Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kayong Utara Diantara Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 .....	32



<b>Gambar 3.11</b>	Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Kabupaten Kayong Utara diantara Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 .....	33
<b>Gambar 3.12</b>	Analisis Efektifitas Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016-2021 .....	34
<b>Gambar 3.13</b>	Analisis Relevansi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kayong Utara terhadap rata-rata Nasional dan Provinsi Tahun 2016-2021 .....	35
<b>Gambar 3.14</b>	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016-2021 .....	39
<b>Gambar 3.15</b>	Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 .....	40
<b>Gambar 3.16</b>	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016-2021 .....	41
<b>Gambar 3.17</b>	Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah (Tahun) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 .....	42
<b>Gambar 3.18</b>	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016-2021 .....	43
<b>Gambar 3.19</b>	Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 .....	43
<b>Gambar 3.20</b>	Perkembangan Umur Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016-2021 .....	45
<b>Gambar 3.21</b>	Posisi Relatif Umur Harapan Hidup (Tahun) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 .....	45
<b>Gambar 3.23</b>	Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 .....	47
<b>Gambar 3.24</b>	Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021 .....	48
<b>Gambar 3.25</b>	Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 .....	49



<b>Gambar 3.26</b>	Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021 .....	49
<b>Gambar 3.27</b>	Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik PLN (%) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 .....	50
<b>Gambar 3.28</b>	Perkembangan Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik PLN (%) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021 .....	50
<b>Gambar 3.29</b>	Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 .....	53
<b>Gambar 3.30</b>	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2017-2021 .....	53
<b>Gambar 3.31</b>	Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 .....	54
<b>Gambar 3.32</b>	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2017-2021 .....	55
<b>Gambar 3.33</b>	Posisi Relatif Tingkat Kesempatan Kerja (%) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 .....	56
<b>Gambar 3.34</b>	Perkembangan Tingkat Kesempatan Kerja (%) Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2017-2021.....	56
<b>Gambar 4.1.</b>	Hubungan antara Angka Kemiskinan Moneter (P0) dan Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021.....	74
<b>Gambar 4.2.</b>	Hubungan antara Angka Kemiskinan Moneter (P0) dan Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 .....	75
<b>Gambar 4.3.</b>	Hubungan antara Angka Kemiskinan Moneter (P0) dan Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 .....	76
<b>Gambar 4.4.</b>	Identifikasi Masalah Kemiskinan Kabupaten Kayong Utara .	84
<b>Gambar 4.5.</b>	Identifikasi Bidang Prioritas (Ekonomi dan Pendidikan) untuk Intervensi Kemiskinan Kabupaten Kayong Utara .....	85



<b>Gambar 4.6.</b>	Identifikasi Bidang Prioritas (Kesehatan) untuk Intervensi Kemiskinan Kabupaten Kayong Utara .....	86
<b>Gambar 4.7.</b>	Identifikasi Bidang Prioritas (Pendidikan) untuk Intervensi Kemiskinan Kabupaten Kayong Utara .....	86
<b>Gambar 4.8</b>	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021 .....	91
<b>Gambar 4.9</b>	Perkembangan Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021 .....	92
<b>Gambar 4.10</b>	Ruang Fiskal Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021 ...	95
<b>Gambar 4.11</b>	Ketergantungan Fiskal Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021 .....	97
<b>Gambar 4.12</b>	Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021 .....	98
<b>Gambar 4.13</b>	Efektifitas Anggaran Belanja terhadap Capaian Bidang Kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021 .	101
<b>Gambar 5.1.</b>	Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara .....	108
<b>Gambar 5.2.</b>	Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap Indeks Dimensi Pelayanan Dasar Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara .....	108
<b>Gambar 5.3.</b>	Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap Indeks Dimensi Infrastruktur Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara .....	109
<b>Gambar 5.4.</b>	Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap Indeks Dimensi Aksesibilitas Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara .....	110
<b>Gambar 5.5.</b>	Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Kualitas Jalan Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara .....	110



<b>Gambar 5.6.</b>	Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Ketersediaan Angkutan Umum Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara .....	111
<b>Gambar 5.7.</b>	Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Aksesibilitas Jalan Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara .....	112
<b>Gambar 5.8.</b>	Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke TK/RA/BA Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara .....	113
<b>Gambar 5.9.</b>	Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke Tempat Praktek Dokter Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara .....	113
<b>Gambar 5.10.</b>	Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke Tempat Praktek Bidan Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara .....	114
<b>Gambar 5.11.</b>	Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke SMP sederajat Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara .....	114
<b>Gambar 5.12.</b>	Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke SMA sederajat Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara .....	115
<b>Gambar 5.13.</b>	Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke SD sederajat Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara .....	115
<b>Gambar 5.14.</b>	Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke Rumah Sakit Bersalin Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara .....	116
<b>Gambar 5.15.</b>	Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke Rumah Sakit Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara .....	117



<b>Gambar 5.16.</b>	Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke Puskesmas Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara .....	118
<b>Gambar 5.17.</b>	Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke Puskesmas atau Polindes Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara .....	119
<b>Gambar 5.18.</b>	Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke Poliklinik/Balai Pengobatan Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara .....	119
<b>Gambar 5.19.</b>	Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke Pertokoan, Minimarket, atau Toko Kelontong Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara .....	120
<b>Gambar 5.20.</b>	Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke Penerangan Jalan Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara .....	121
<b>Gambar 5.21.</b>	Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke Pasar Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara .....	122
<b>Gambar 5.22.</b>	Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke Energi Listrik Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara .....	123
<b>Gambar 5.23.</b>	Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke Bahan Bakar Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara .....	123
<b>Gambar 5.24.</b>	Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke Apotek Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara ...	124



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Isu kemiskinan adalah isu strategis dan menjadi masalah utama semua negara. Oleh sebab itu, masalah kemiskinan secara khusus dituangkan kedalam tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Penanganan masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan menjadi tanggungjawab semua pihak baik itu pemerintah Pusat, Daerah beserta seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha. Karena sifatnya yang tematik dan multidimensi tersebut, maka agar penanganan masalah kemiskinan menjadi efektif, maka perlu dilakukan koordinasi, sinergi antar semua pihak, dan integrasi antar program-program lintas sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dalam proses implementasinya dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Percepatan dalam penurunan angka kemiskinan telah diupayakan melalui peningkatan akselerasi penanggulangan kemiskinan, yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Program Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Perpres Nomor 166 Tahun 2016 tersebut, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengawal pelaksanaan Program Perlindungan Sosial ditingkat Pusat, sedangkan level daerah dikoordinir oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Sebagai langkah untuk memperkuat percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk meningkatkan akselerasi dan koordinasi lintas kelembagaandalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.



Selain aspek kebijakan, salah satu aspek penting yang mendukung rencana penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya, dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatiannya pada kondisi kemiskinan di daerah masing-masing. Data kemiskinan tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan wilayah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Secara umum, angka kemiskinan Indonesia sejak Tahun 1998-2019 terus menurun hingga menyentuh 1 digit. Namun pada Tahun 2021 ditengah pandemi global *COVID-19* yang melanda seluruh dunia, tantangan dalam menurunkan angka kemiskinan Kembali teruji. Angka kemiskinan nasional menyentuh 9,71% di bulan September 2021. Untuk mengatasi hal ini, berbagai kebijakan telah diterbitkan untuk membantu pengentasan kemiskinan. Selain itu berbagai program penanggulangan kemiskinan diperkuat dan dimaksimalkan untuk memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan terutama akibat pandemi agar tidak makin jatuh kejurang kemiskinan.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki jumlah penduduk miskin pada Tahun 2021 (September 2021) sebesar 367.890 jiwa atau 7,15%, berkurang sebesar 2.820 jiwa dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang sebesar 370.710 jiwa atau 7,24%. Garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2021 sebesar Rp. 505.228. Dimana indeks kedalaman kemiskinan (P1) pada Tahun 2021 mencapai 1,016. Angka ini sedikit menurun dibanding Tahun 2020 yang mencapai 1,13 dengan indeks keparahan kemiskinan (P2) pada Tahun 2021 mencapai 0,243.

Untuk Kabupaten Kayong Utara, jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan dari Tahun 2020 sebanyak 10.900 jiwa (9,56%) menjadi 10.720 jiwa (9,33%) pada Tahun 2021. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) pada Tahun 2021 sebesar 1,78 mengalami peningkatan dari Tahun 2020 yang sebesar 1,13 dengan indeks keparahan kemiskinan (P2) pada Tahun 2021 mencapai 0,46 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 0,22 pada Tahun 2020.



Dari data statistik diatas, angka kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara menunjukkan trend yang menurun, dimana kondisi ini juga terjadi pada kondisi umum kemiskinan di Indonesia dimana jumlah penduduk miskin semakin menurun walaupun dengan tren yang landai. Namun yang perlu dikaji lebih jauh adalah upaya dan rencana apa yang harus dilakukan untuk mengeluarkan masyarakat miskin Indonesia dari garis kemiskinan, agar mereka memiliki ketahanan ekonomi rumah tangga yang tangguh dalam menghadapi gejolak ekonomi. Terkait hal ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti misalnya menyusun program penanggulangan kemiskinan yang diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Seperti yang disebutkan diatas, kemiskinan adalah masalah multidimensi dan masalah yang kompleks. Kemiskinan berdampak dan disebabkan oleh beragam faktor seperti ekonomi, politik, sosial budaya, agama, sumberdayaalam, sumber daya manusia, lingkungan hidup, bencana alam/non alam, dan teknologi informasi. Selain itu, disebutkan diawal bahwa kemiskinan itu bersifat tematik, oleh karena itu program penanggulangan kemiskinan tidak dapat diberlakukan secara universal antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kearifan lokal dan karakteristik wilayah harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan strategi penanggulangan kemiskinan. Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, tokoh agama dan lembaga swadaya masyarakat dalam menyusun strategi penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan, sehingga diharapkan dokumen tersebut dapat dijadikan acuan oleh semua pihak dalam upaya pencapaian tujuan yaitu menurunkan jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan.

Sesuai dengan amanat Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dinyatakan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi penyusunan Rencana



Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kayong Utara sebagai rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan, merupakan dasar penyusunan RPJMD bidang Penanggulangan Kemiskinan, sehingga seluruh Program yang tertuang dalam RPKD juga tertuang dalam RPJMD, dengan demikian diharapkan percepatan penanggulangan kemiskinan akan dapat terwujud sesuai dengan yang ditetapkan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1. Maksud**

Penyusunan Dokumen Rencana 2024-2026 ini dimaksudkan untuk:

1. Merumuskan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
2. Menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan; dan
3. Memandu intervensi program bagi Perangkat Daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

### **1.2.2. Tujuan**

Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026 disusun dengan tujuan:

1. Menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan;
2. Membangun konsensus bersama antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan;
3. Memperkuat pengarusutamaan (*mainstreaming*) penanggulangan kemiskinan dalam setiap langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan; dan
4. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).



Sasaran penanggulangan kemiskinan dituangkan dalam kebijakan 4 tahunan, sesuai sisa periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kayong Utara, bertujuan untuk :

1. Melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. Memperkuat kapasitas masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan;
3. Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa.

**Tabel 1.1**  
Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan  
Kabupaten Kayong Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target			Kebijakan
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Mewujudkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin	Meningkatnya pemenuhan hak dasar dan pengurangan beban hidup	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 K.H  Angka Kematian Bayi (AKB)  Persentase Stunting  RLS  HLS  Penangan Rumah Tidak Layak Huni  Meningkatkan Akses Air Minum Layak  RT dengan Sanitasi Layak  RT dengan Akses Listrik				Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat           Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan   Meningkatkan Akses Infrastruktur Dasar   Meningkatkan Akses Infrastruktur Dasar



2	Memperkuat kapasitas masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan	Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	Volume Produksi Perikanan (ton)  Produksi Pertanian (Padi) dalam Ton				Peningkatan Volume Produksi Perikanan (ton)  Memanfaatkan SDA (irigasi teknis dan lahan produktif) untuk meningkatkan Produksi
3	Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin	Meningkatnya kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat  Pengembangan WUP dan WUB menjadi UKM Formal	Pertumbuhan industri pengolahan  Peningkatan Jumlah UM-WUP dan UM-WUB dan mengubah Status menjadi UKM Formal				Meningkatnya daya saing sektor Ekonomi Unggulan

### 1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);



4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembanunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manuasia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 71);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 145);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 8 5 );
13. Surat Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 426/BAPPEDALITBANG/ VIII/2022, tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kayong Utara

#### 1.4. Sistematika Penulisan

##### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### BAB II KONDISI UMUM DAERAH

- 2.1. Geografi dan Demografi Wilayah
- 2.2. Struktur Perekonomian

##### BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

- 3.1. Konsep Kemiskinan
- 3.2. Analisis Karakteristik Kemiskinan

##### BAB IV PRIORITAS PROGRAM

- 4.1. *Multidimension Proverty Index (MPI)*
- 4.2. Pengembangan Logika Program (*Theory of Change*)
- 4.3. Analisis Keterkaitan (*Causal Relationship*)
- 4.4. Analisis Kondisi Fiskal
- 4.5. Analisis Anggaran Pendapatan
- 4.6. Analisis Anggaran Belanja
- 4.7. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Intervensi



BAB V LOKASI PRIORITAS

5.1. Isu Strategis

5.2. Analisis Kuadran Wilayah

BAB VI PENUTUP



## BAB II

### KONDISI UMUM DAERAH

#### 2.1 Geografi dan Demografi Wilayah

##### 2.1.1 Geografi

Secara geografis Kabupaten Kayong Utara berada di sisi selatan Provinsi Kalimantan Barat atau berada pada posisi  $0^{\circ} 43' 05,15''$  Lintang Selatan sampai dengan  $1^{\circ} 46' 35,21''$  Lintang Selatan dan  $108^{\circ} 40' 58,88''$  Bujur Timur sampai dengan  $110^{\circ} 24' 30,05''$  Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, dan Selat Karimata
- Sebelah Barat : Selat Karimata
- Sebelah Selatan : Selat Karimata dan Kabupaten Ketapang
- Sebelah Timur : Kabupaten Ketapang

**Gambar 2.1**  
Peta Administrasi Kabupaten Kayong Utara



Sumber: Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka 2020



Wilayah Kabupaten Kayong Utara terdiri dari 6 Kecamatan. Dimana Kecamatan-Kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan laut. Geografi wilayah mencakup pesisir dan pulau-pulau besar dan kecil, dataran rendah dan dataran tinggi, kawasan gambut dan rawa dengan 4 aliran sungai besar. Sebagian besar sungai-sungai tersebut bermuara ke laut dan selat.

Kabupaten Kayong Utara mengembangkan pariwisata, industri, perdagangan, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan. Penataan pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi perikanan, pertanian dan pariwisata bahari dengan menetapkan hierarki dan fungsi simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah, kawasan perkotaan dan perdesaan dan wilayah sekitarnya.

### **2.1.2 Demografi**

Jumlah penduduk dapat menjadi nilai tambah sekaligus beban bagi pemerintah apabila tidak ditangani dengan baik. Penduduk yang berkualitas dapat memperkuat produksi dan menjadi potensi ekonomi. Sebaliknya, penambahan penduduk yang tidak terkendali akan menjadi bom waktu yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan hingga bermuara pada terhambatnya pembangunan. Masalah kesenjangan sosial, penyediaan kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan bahkan hingga ke perumahan adalah sebagian masalah yang ditimbulkan dari keadaan tersebut.



**Tabel 2.1**  
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020 dan 2021

Kecamatan	2020			2021		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
Pulau Maya	8.488	7.871	16.359	8.977	8.312	17.289
Kepulauan Karimata	15.159	14.492	29.651	2.034	1.939	3.973
Sukadana	19.995	18.599	38.594	16.072	15.261	31.333
Simpang Hilir	13.021	12.444	25.465	19.417	18.282	37.699
Teluk Batang	6.589	6.148	12.737	12.617	12.089	24.706
Seponti	1.925	1.840	3765	6.830	6.330	13.160
<b>Kayong Utara</b>	<b>65.177</b>	<b>61.394</b>	<b>126.571</b>	<b>65.947</b>	<b>62.213</b>	<b>128.160</b>

Sumber Data : BPS Kayong Utara Dalam Angka, 2022

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kayong Utara, jumlah penduduk pada Tahun 2020 sebesar 126.571 bertambah menjadi 128.160 jiwa pada Tahun 2021, dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2010-2021 sebesar 2,09%. Jika dilihat dari sebaran penduduk disetiap kecamatan, terlihat bahwa Kecamatan Teluk Batang dan Sukadana memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan kecamatan yang lainnya. Jumlah penduduk di Kecamatan Teluk Batang adalah 24.706 jiwa, namun dengan luas wilayah hanya 417,74 km<sup>2</sup> menyebabkan tingginya kepadatan penduduk di kecamatan mencapai 121 jiwa/km<sup>2</sup>. Di sisi lain, jumlah penduduk di Kecamatan Simpang Hilir adalah yang tertinggi diangka 37.699 jiwa, namun dengan luas wilayah yang mencapai 213,82 km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk di kecamatan ini hanya sebesar 19 jiwa/km<sup>2</sup>.

Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Kayong Utara lebih banyak daripada penduduk perempuan. Sex ratio di Kabupaten Kayong Utara pada Tahun 2021 sebesar 106 (angka diatas 100) yang artinya setiap 100 perempuan terdapat 106 laki-laki. Seluruh kecamatan di Kabupaten Kayong Utara juga lebih banyak penduduk laki-laki dibandingkan dengan penduduk perempuan.



**Tabel 2.2**  
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Rinci Per Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021

Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Penduduk (Jiwa)			Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km <sup>2</sup> )
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Pulau Maya	1105,30	8.977	8.312	17.289	15
Kepulauan Karimata	517,33	2.034	1.939	3.973	13
Sukadana	2031,09	16.072	15.261	31.333	58
Simpang Hilir	213,82	19.417	18.282	37.699	19
Teluk Batang	417,74	12.617	12.089	24.706	121
Seponti	282,97	6.830	6.330	13.160	31
<b>Kayong Utara</b>	<b>4568,26</b>	<b>65.947</b>	<b>62.213</b>	<b>128.160</b>	<b>28</b>

Sumber Data : BPS Kabupaten Kayong Utara, 2022

### 2.1.3 Kawasan Strategis

Berdasarkan kepentingan ekonomi, wilayah Kabupaten Kayong Utara terbagi menjadi 13 kawasan, yaitu:

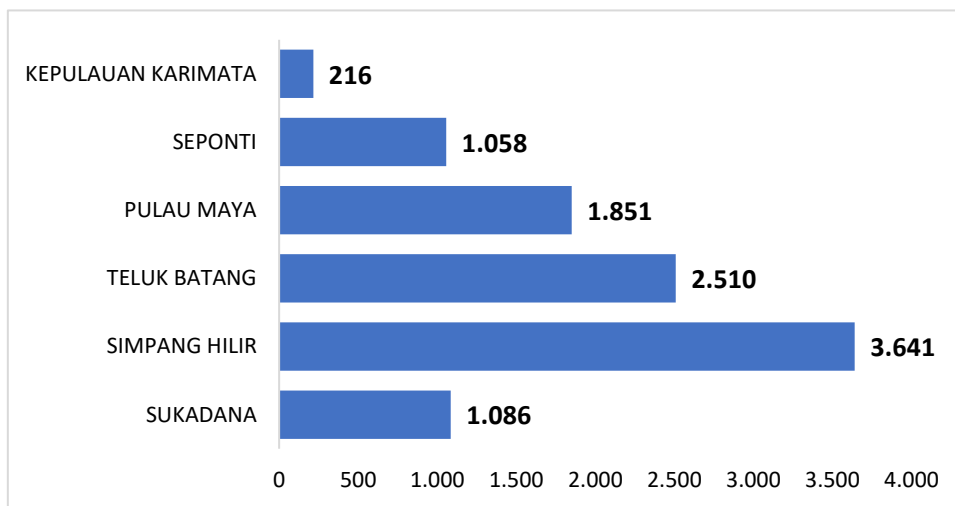
1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maya Karimata;
2. Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Seponti, Teluk Batang, Simpang Hilir, Pulau Maya dan Sukadana;
3. Kawasan Strategis Koridor Ekonomi Perawas – Teluk Melano;
4. Kawasan Strategis Koridor Ekonomi Teluk Melano – Teluk Batang;
5. Kawasan Strategis pelabuhan Samudera Pelapis sebagai kawasan pengembangan Tanki Timbun CPO;
6. Kawasan Strategis perkotaan Sukadana sebagai Ibukota Kabupaten Kayong Utara dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pendidikan dan pariwisata;
7. Kawasan Strategis Pusat Informasi Kepulauan yang terdapat di Kecamatan Kepulauan Karimata.
8. Kawasan Strategis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir
9. Kawasan Minapolitan Sukadana di Kecamatan Sukadana;



10. Kawasan Minapolitan Rantau Panjang di Kecamatan Simpang Hilir;
11. Kawasan Minapolitan Teluk Batang di Kecamatan Teluk Batang;
12. Kawasan Minapolitan Tanjung Satai di Kecamatan Pulau Maya;
13. Kawasan Minapolitan Betok di Kecamatan Kepulauan Karimata.

Dari data p3ke.kemenkopmk.go.id didapat bahwa kecamatan dengan jumlah keluarga miskin yang berada dalam urutan 4 besar adalah Kecamatan Simpang Hilir, Teluk Batang, Pulau Maya, dan Sukadana sehingga prioritas intervensi pemerintah diarahkan ke wilayah- wilayah tersebut.

**Gambar 2.2**  
Jumlah keluarga miskin menurut Kecamatan  
di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022



Sumber : p3ke.kemenkopmk.go.id, 2022

## 2.2 Struktur dan Perekonomian

### 2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan oleh seluruh aktivitas perekonomian di suatu daerah pada tahun tertentu. Dengan kata lain, PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya guna menciptakan nilai tambah bagi masing-masing sektor perekonomian. Lebih jauh, kinerja pembangunan ekonomi di suatu daerah dapat digambarkan dengan melihat



capaian PDRB yang dihasilkan baik atas dasar harga berlaku (AdHB) tahun berjalan, maupun atas dasar harga konstan (AdHK). Untuk melihat peranan masing-masing kategori/lapangan usaha dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3**

Distribusi Persentase masing-masing Sektor terhadap PDRB Kabupaten Kayong Utara Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2017 – 2021

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry &amp; Fishing</i>	28,54	27,87	27,25	28,39	28,63
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining &amp; Quarrying</i>	4,42	4,42	4,39	4,45	4,48
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	9,80	9,80	9,69	9,65	9,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity &amp; Gas</i>	0,07	0,07	0,07	0,08	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management &amp; Remediation Activities</i>	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	11,91	12,13	12,41	12,03	12,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale &amp; Retail Trade; Repair of Motor Vehicles &amp; Motorcycles</i>	13,09	13,18	13,45	12,72	12,20
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation &amp; Storage</i>	3,40	3,37	3,36	3,13	2,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation &amp; food Service Activities</i>	2,27	2,30	2,36	2,12	2,13
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information &amp; Communication</i>	4,25	4,46	4,54	4,88	4,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial &amp; Insurance Activities</i>	2,14	2,19	2,04	1,99	2,00
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	3,19	3,19	3,19	3,19	3,02
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,33	0,33	0,33	0,31	0,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration &amp; Defence; Compulsory Social Security</i>	9,99	10,10	10,29	10,62	9,92
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	3,22	3,15	3,18	2,85	2,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	2,23	2,27	2,31	2,66	3,30
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	1,02	1,03	1,02	0,80	0,73
<b>Produk Domestik Regional Bruto/Gross</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,</b>



<i>Regional Domestic Product</i>	0	0	0	0	00
----------------------------------	---	---	---	---	----

Sumber Data : BPS Kabupaten Kayong Utara, 2022

Kondisi perekonomian Kabupaten Kayong Utara terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2017-2021). Selama kurun waktu tersebut nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kayong Utara bertambah dari 3,49 trilyun pada tahun 2017 menjadi 4,56 trilyun pada tahun 2021. Kenaikan PDRB Kabupaten Kayong Utara selama lima tahun terakhir tersebut mencapai 29,91 persen. Di tengah kondisi pandemi global COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020, nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kayong Utara tidak mengalami penurunan, bahkan mengalami peningkatan dari 4,13 trilyun pada tahun 2019 menjadi 4,20 trilyun pada tahun 2020.

Faktor inflasi sangat mempengaruhi dalam penghitungan PDRB. Namun apabila faktor inflasi dihilangkan, selama tahun 2017 hingga tahun 2020 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kayong Utara mengalami peningkatan sebesar 14,34 persen.

Nilai tambah Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kayong Utara bertambah dari 2,30 trilyun pada tahun 2017 menjadi 2,63 trilyun pada tahun 2021. Kondisi pandemi global COVID-19 juga mengakibatkan nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kayong Utara mengalami penurunan dari 2,53 trilyun pada Tahun 2019 menjadi 2,51 trilyun pada Tahun 2020. Untuk nilai PDRB masing-masing lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan 2.5 berikut.



Tabel 2.4

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kayong Utara (Juta Rupiah), Tahun 2017 – 2021

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry &amp; Fishing</i>	996.169,7	1.058.165,6	1.126.084,5	1.194.417,3	1.297.838,6
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining &amp; Quarrying</i>	154.378,1	167.862,1	181.630,0	187.050,0	203.295,8
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	341.911,4	371.872,4	400.319,1	405.783,9	449.597,5
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity &amp; Gas</i>	2.342,2	2.640,8	2.955,0	3.188,2	3.316,2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management &amp; Remediation Activities</i>	4.852,3	5.215,1	5.671,2	5.872,8	6.367,3
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	415.828,2	460.634,2	512.863,7	506.018,7	570.895,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale &amp; Retail Trade; Repair of Motor Vehicles &amp; Motorcycles</i>	456.733,3	500.515,7	555.725,8	535.041,1	553.196,0
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation &amp; Storage</i>	118.714,9	127.898,8	138.999,4	131.870,0	131.446,0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation &amp; food Service Activities</i>	79.069,2	87.279,0	97.517,8	89.114,4	96.709,0
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information &amp; Communication</i>	148.262,0	169.259,6	187.467,9	205.137,5	220.562,0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial &amp; Insurance Activities</i>	74.712,5	83.108,9	84.178,6	83.699,5	90.541,3
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	111.451,4	121.262,1	131.916,4	134.121,5	136.738,4
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	11.415,2	12.522,2	13.642,1	12.999,0	13.008,9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration &amp; Defence; Compulsory Social Security</i>	348.490,4	383.569,6	425.123,3	446.802,0	449.893,4
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	112.222,8	119.534,7	131.417,7	120.008,8	127.512,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	77.858,0	86.044,0	95.300,7	111.867,8	149.593,5



R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	35.594,7	38.978,7	42.309,0	33.762,7	33.218,7
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		<b>3.490.006,3</b>	<b>3.796.363,3</b>	<b>4.133.122,2</b>	<b>4.206.755,3</b>	<b>4.533.731,2</b>

Sumber Data : BPS Kabupaten Kayong Utara, 2022

**Tabel 2.5**

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kayong Utara (Juta Rupiah), Tahun 2017 – 2021

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry &amp; Fishing</i>	705.021,2	731.076,2	760.189,7	784.933,0	814.887,3
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining &amp; Quarrying</i>	97.697,7	101.143,5	105.869,0	106.662,0	111.517,3
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	226.611,6	235.338,5	246.394,3	245.007,4	256.657,9
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity &amp; Gas</i>	1.688,3	1.751,5	1.847,2	1.930,2	1.950,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management &amp; Remediation Activities</i>	3.978,8	4.177,7	4.411,1	4.552,3	4.824,1
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	249.056,6	263.264,9	279.654,6	263.874,7	284.074,5
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale &amp; Retail Trade; Repair of Motor Vehicles &amp; Motorcycles</i>	306.867,2	322.939,7	342.705,3	317.488,4	327.381,0
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation &amp; Storage</i>	80.916,9	85.283,8	89.624,6	78.827,6	76.558,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation &amp; food Service Activities</i>	53.045,8	56.250,6	60.069,6	52.810,6	56.574,9
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information &amp; Communication</i>	119.673,7	133.648,8	141.887,2	153.729,3	163.368,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial &amp; Insurance Activities</i>	51.099,6	54.463,4	81.314,3	82.532,8	85.184,0
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	74.990,9	77.947,2	8.446,1	8.101,4	8.111,3
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	7.674,4	8.049,2	189.497,5	192.895,5	190.459,0



O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration &amp; Defence; Compulsory Social Security</i>	169.859,1	178.839,9	83.636,9	78.611,2	82.547,5
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	76.845,9	79.512,0	59.026,9	67.705,7	88.819,0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	51.811,3	55.716,4	28.419,3	24.521,8	24.762,1
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	25.996,3	27.176,3	81.314,3	82.532,8	85.184,0
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		<b>2.302.835,4</b>	<b>2.416.579,8</b>	<b>2.536.741,9</b>	<b>2.517.550,8</b>	<b>2.632.989,4</b>

Sumber Data : BPS Kabupaten Kayong Utara, 2022

### 2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Untuk Kepentingan berbagai analisis ekonomi makro masing-masing daerah, pada umumnya PDRB dihitung berdasarkan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan suatu tahun dasar (tahun 2010). PDRB atas dasar harga konstan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku adalah untuk mengetahui nilai PDRB berdasarkan harga pada tahun penghitungan (besarnya pergerakan harga). Nilai ekonomi Kabupaten Kayong Utara untuk pertumbuhan ekonomi selama Tahun 2017 hingga 2021 berfluktuatif, hal ini dapat terlihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar 2.3**

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 – 2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)



Dari tabel diatas terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Terjadinya bencana non alam pandemi global COVID-19, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami tantangan berat untuk terus mengalami percepatan dan tetap positif. Ditengah pandemi Covid-19 saat ini kapasitas produksi, tingkat konsumsi dan investasi terus menurun serta melemah. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Untuk Kabupaten Kayong Utara, pertumbuhan ekonomi terkontraksi diangka -0,76 persen.

Untuk saat ini, hal terpenting untuk menanggulangi dampak pandemi adalah menangani aspek kesehatan, menjaga tingkat konsumsi masyarakat, memulihkan sektor ekonomi serta menggerakkan kembali dunia usaha. Penanganan kesehatan dan keselamatan masyarakat, memastikan perlindungan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, serta insentif bagi UMKM dan dunia usaha harus menjadi perhatian kedepan. Berikut laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kayong Utara.

**Tabel 2.6**

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 – 2021

Kategori Category	Lapangan Usaha/ Industry	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry &amp; Fishing</i>	2,74	3,70	3,98	3,25	3,82
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining &amp; Quarrying</i>	4,73	3,53	4,67	0,75	4,55
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	5,24	3,85	4,70	-0,56	4,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity &amp; Gas</i>	6,43	3,74	5,46	4,49	1,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management &amp; Remediation Activities</i>	6,67	5,00	5,59	3,20	5,97
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	8,57	5,70	6,23	-5,64	7,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale &amp; Retail Trade; Repair of Motor Vehicles &amp; Motorcycles</i>	5,85	5,24	6,12	-7,36	3,12
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation &amp; Storage</i>	5,10	5,40	5,09	-12,05	-2,88



I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation &amp; food Service Activities</i>	5,99	6,04	6,79	-12,08	7,13
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information &amp; Communication</i>	13,92	11,68	6,16	8,35	6,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial &amp; Insurance Activities</i>	6,34	6,58	-1,31	-0,71	3,65
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	3,61	3,94	4,32	1,50	3,21
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Bussiness Activities</i>	5,01	4,88	4,93	-4,08	0,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration &amp; Defence; Compulsory Social Security</i>	7,88	5,29	5,96	1,79	-1,26
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	3,24	3,47	5,19	-6,01	5,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	4,84	7,54	5,94	14,70	31,18
R,S,T ,U	Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	4,50	4,54	4,57	-13,71	0,98
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		5,37	4,94	4,97	-0,76	4,59

Sumber Data : BPS Kabupaten Kayong Utara, 2022



## BAB III

### PROFIL KEMISKINAN DAERAH

#### 3.1. Konsep Kemiskinan

Konsep atau definisi kemiskinan yang digunakan pada dokumen ini menggunakan konsep kemiskinan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik, dimana dinyatakan bahwa Kemiskinan Absolut adalah kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum yaitu pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan Pokok minimum tersebut, kemudian direpresentasikan kedalam jumlah rupiah minimum, yang kemudian ditetapkan sebagai garis kemiskinan. Berdasarkan garis tersebut, maka penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan dapat digolongkan sebagai penduduk miskin.

Dengan menggunakan garis kemiskinan absolut maka kita dapat membandingkan kemiskinan secara umum dan menilai efek dari kebijakan penanggulangan kemiskinan antar waktu, serta memperkirakan dampak dari suatu program terhadap angka kemiskinan (misalnya, pemberian kredit usaha kecil, pemberian bantuan sosial dan lain-lain). Bank Dunia sendiri menggunakan garis kemiskinan absolut untuk melihat dan membandingkan tingkat kemiskinan antar negara. Dengan adanya garis kemiskinan absolut tersebut maka akan mempermudah penentuan sasaran dan pengalokasian sumber daya sosial serta anggaran dalam proses ngentasan kemiskinan. Adapun Pemerintah Indonesia menggunakan ukuran pendapatan US\$ 1 perkapita per hari sebagai garis kemiskinan, yang artinya penduduk yang pendapatannya dibawah US\$ 1 perkapita per hari dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Kemiskinan adalah masalah multidimensi, artinya tidak tercapainya standar hidup layak oleh seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tidak memenuhi kualitas SDM, kurangnya kesempatan produktif atau tidak terpenuhinya perlindungan sosial.



Lebih jauh lagi terkait rendahnya kualitas SDM misalnya, hal ini dipengaruhi oleh berbagai hal seperti minimnya akses pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya. Melihat luasnya lingkup sektor yang mempengaruhi kemiskinan, maka diperlukan langkah strategis, sistematis dan terintegrasi dari seluruh pihak yang terlibat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Dalam strategi percepatan penanggulangan Kemiskinan disebutkan bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Secara garis besar, percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil.
4. Sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

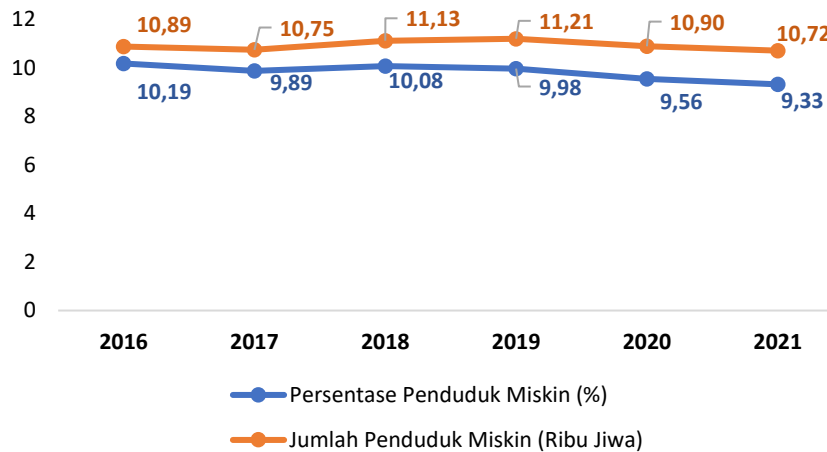
### **3.2. Analisis Karakteristik Kemiskinan**

#### **3.2.1 Kondisi Umum Kemiskinan Daerah (Kemiskinan Konsumsi)**

Kondisi umum kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara sendiri dapat dijabarkan sebagai berikut: persentase penduduk miskin Kabupaten Kayong Utara tahun 2021 mencapai 9,33%, angka ini menurun sebesar 0,23% dari tahun 2020 diangka 9,56%. Capaian pada tahun 2021 ini sudah mencapai target indikator penurunan angka kemiskinan yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2019-2024, dimana pada tahun 2021 angka kemiskinan ditargetkan diangka 9,73%. Perkembangan persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016- 2021 dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:



**Gambar 3.1**  
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016-2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

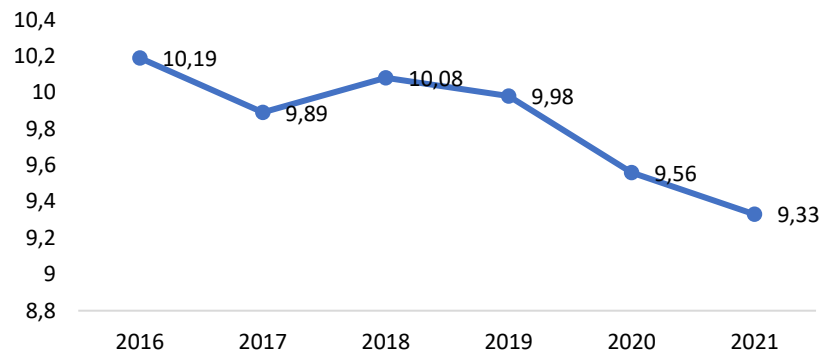
Beberapa hal yang dapat dijabarkan dari tabel diatas adalah:

#### a. Persentase Penduduk Miskin

Kesenjangan ekonomi adalah adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Ketimpangan ekonomi dan tingginya tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar yang dihadapi dalam pengentasan kemiskinan, tidak terkecuali Kabupaten Kayong Utara Barat. Terkait dengan perkembangan persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten kayong Utara Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 3.2**

Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan  
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016-2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Kayong Utara tahun 2016-2021 semakin membaik dan persentasenya menurun dari tahun ke tahun. Tahun 2016 tingkat kemiskinan Kabupaten Kayong Utara ada di angka 10,19% dan persentase ini menurun, hingga 9,33% di tahun 2021. Capaian di tahun 2021 ini melebihi target RPJMD yaitu diangka 9,73%. Namun capaian tahun 2021 ini, masih dianggap belum memenuhi harapan karena masih berada dibawah capaian Provinsi Kalimantan Barat di angka 7,15%, namun berada dibawah capaian Nasional yaitu diangka 10,14%.

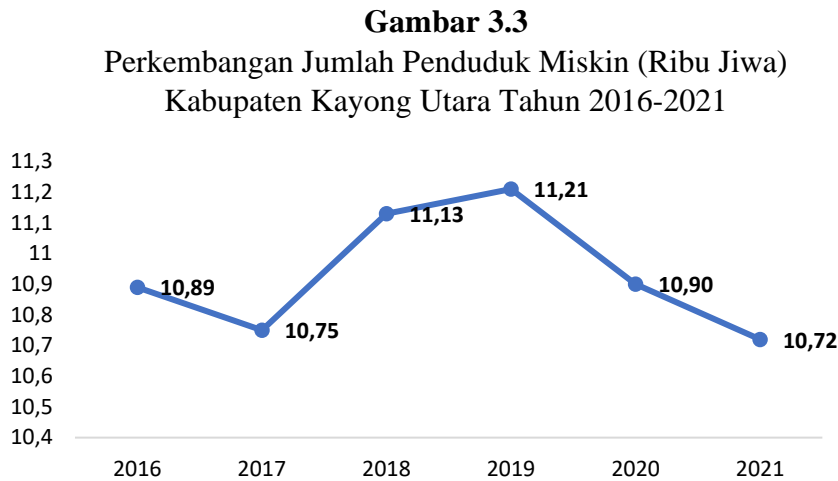
Oleh sebab itu, agar persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Kayong utara ini terus membaik, maka program-program penanggulangan kemiskinan harus terus ditingkatkan baik dari sisi pelaksanaan dan efektivitasnya sehingga mampu mempercepat laju penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kayong utara.

#### **b. Jumlah Penduduk Miskin**

Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi persentase tingkat kemiskinan dalam suatu daerah. Semakin tinggi jumlah penduduk miskin, maka semakin besar persentase tingkat kemiskinan relatif terhadap jumlah penduduk. Perkembangan jumlah



penduduk miskin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016-2021 terlihat pada Gambar 3.3.



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

Pada Gambar 3.3 diatas terlihat bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten Kayong Utara berfluktuatif sepanjang 6 tahun terakhir dengan kecenderungan mengalami penurunan atau perbaikan. Tahun 2020 jumlah penduduk miskin mencapai 10,90 ribu jiwa dan dari data terbaru tahun 2021 jumlah penduduk miskin Kabupaten Kayong Utara turun menjadi 10,72 ribu jiwa. Dengan menurunnya jumlah penduduk miskin dari tahun ketahun, maka dapat disimpulkan bahwa program yang telah berjalan mamapu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kinerja pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan akan mengalami tantangan yang cukup besar, karena adanya peningkatan jumlah penduduk yang harus segera diintervensi akibat dari tingginya laju pertumbuhan penduduk.

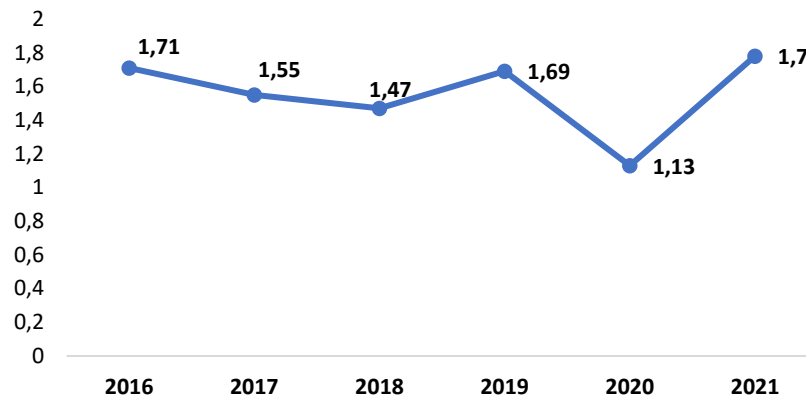
### c. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan dikenal dengan istilah P1 adalah kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi angka P1 menunjukkan semakin tinggi tingkat kesenjangan pengeluaran masyarakat miskin dari garis kemiskinan. Angka P1 digunakan



sebagai gambaran dalam menentukan prioritas intervensi pemerintah daerah terhadap program-program penanggulangan kemiskinan.

**Gambar 3.4**  
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kayong Utara periode Tahun 2016-2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

Dari grafik terlihat bahwa, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kayong Utara berfluktuatif dalam 6 (enam) tahun terakhir. Pada tahun 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan diangka 1,71 dan mencapai angka tertinggi di tahun 2021 sebesar 1,78.

Efek bencana alam di tahun 2021, memberikan dampak pada kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan yang terukur pada tahun 2021. Dari pengalaman tersebut, satu hal yang dapat disimpulkan yaitu jika nilai P1 semakin besar, maka kebutuhan dana untuk mengintervensi program/kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan akan semakin besar pula. Oleh sebab itu, maka sangat penting untuk mengendalikan tingkat P1.

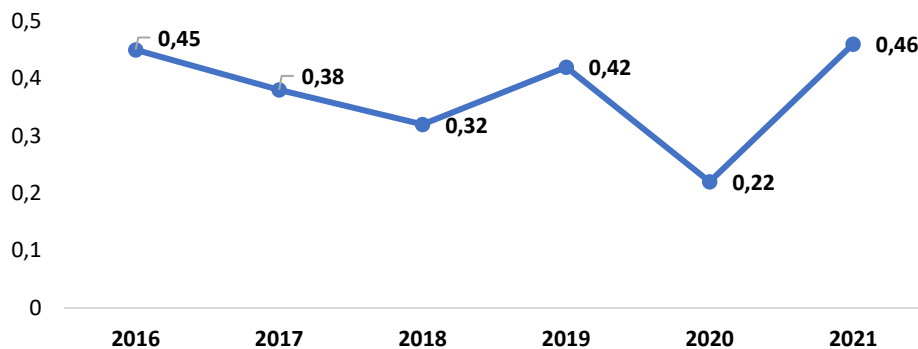
#### d. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan yang dikenal dengan istilah P2, adalah kesenjangan pengeluaran antar sesama masyarakat miskin atau perbandingan jumlah pengeluaran RTM (Rumah Tangga Miskin) yang satu dibandingkan dengan RTM lainnya dalam suatu wilayah. Semakin tinggi angka P2 berarti tingkat kesenjangan pengeluaran/belanja diantara masyarakat miskin



semakin besar, sebaliknya semakin kecil P2, berarti kesenjangan pengeluaran antar masyarakat miskin dalam suatu wilayah juga semakin kecil.

**Gambar 3.5**  
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kayong Utara periode Tahun 2016-2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

Dari perkembangan antar waktu, terlihat perkembangan indeks keparahan kemiskinan dalam rentang waktu dari tahun 2016-2021. Pada Gambar 3.5 berikut dapat dilihat bahwa Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kayong Utara dari tahun 2016 – 2021 cenderung meningkat. Ini terlihat dari perkembangan di tahun 2016 yang naik dari 0,45 ke angka 0,46 di tahun 2021.

Dengan meningkatnya nilai P2 pada tahun 2021, maka dapat disimpulkan bahwa intervensi program/kegiatan dalam rencana penanggulangan kemiskinan masih belum tepat sasaran, sehingga Pemerintah Kabupaten Kayong Utara harus tetap mewaspadai peningkatan indeks P2 pada tahun-tahun selanjutnya, terutama akibat adanya pandemic COVID-19.

#### e. Garis Kemiskinan

Dalam menghitung angka kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan dan bukan makanan. Hal ini dikenal

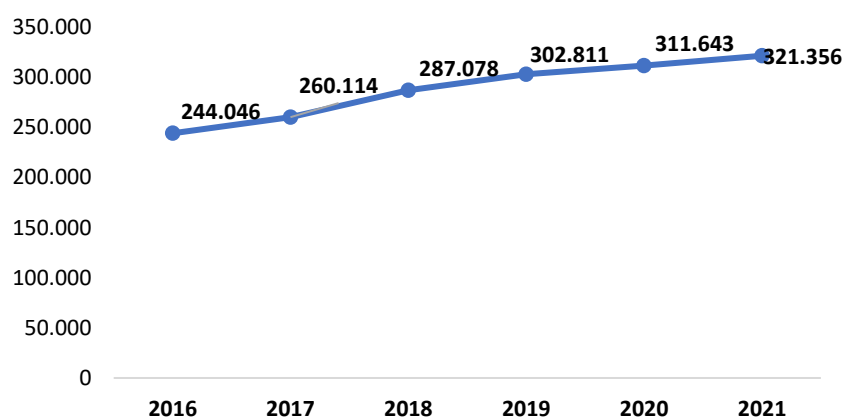


dengan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi yaitu padi- padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Berdasarkan penghitungan BPS, garis kemiskinan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 sebesar Rp 321.356,- Angka ini dapat diartikan bahwa penduduk Kayong Utara dengan pengeluaran perbulan dibawah Rp 321.356,- tergolong penduduk miskin. Perkembangan Garis Kemiskinan Tahun 2016-2021 dan Posisi Relatif Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

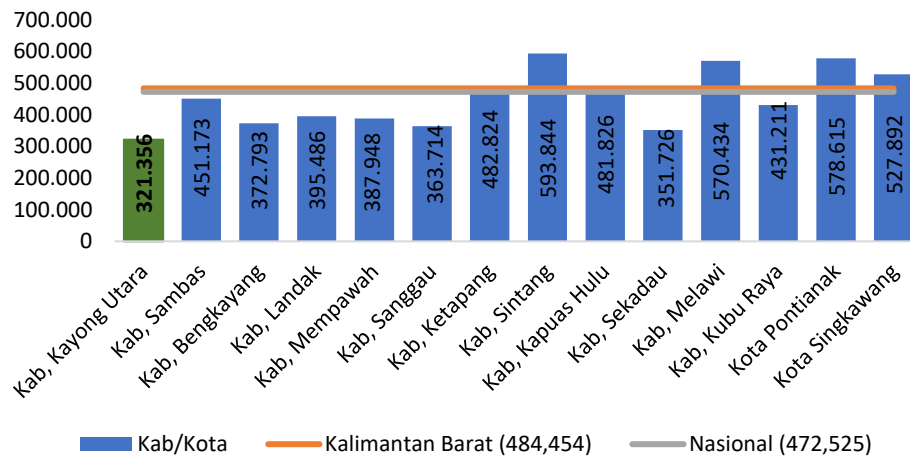
**Gambar 3.6**  
Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp per Kapita per Bulan)  
Kabupaten Kayong Utara periode Tahun 2016-2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)



**Gambar 3.7**  
Posisi Relatif Garis Kemiskinan (Rp)  
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan  
Barat



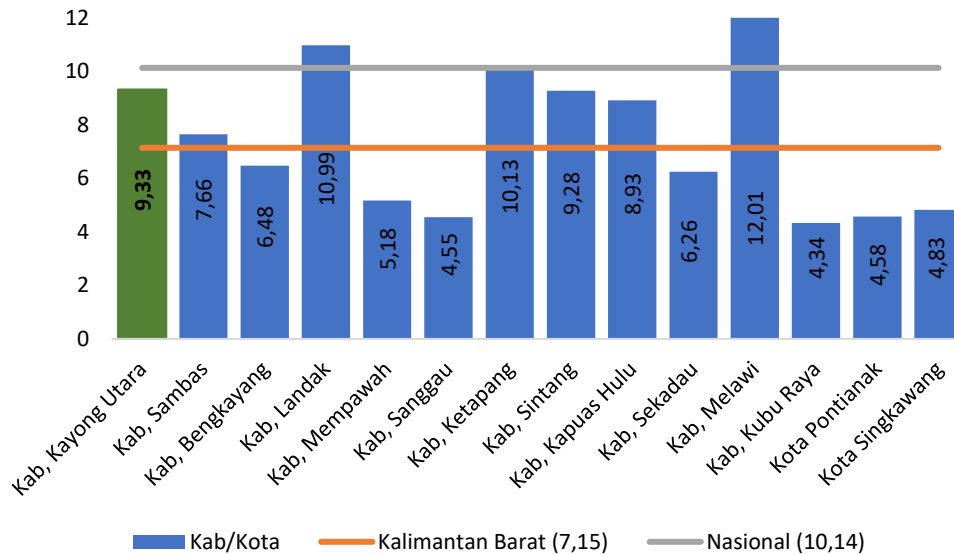
Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

#### f. Posisi Relatif Tingkat Capaian Indikator Kemiskinan Daerah

Posisi Relatif menggambarkan posisi suatu wilayah diantara wilayah lainnya dalam satu Provinsi terhadap rata-rata Provinsi dan Nasional. Posisi Relatif angka kemiskinan Kabupaten Kayong Utara, diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat berada pada urutan ke-11 dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 9,33%. Capaian ini tidak mengalami perubahan dari Tahun 2020. Persentase kemiskinan ini diatas rata-rata Provinsi kalbar sebesar 7,15% dan dibawah rata-rata nasional sebesar 10,14%. Lebih rinci posisi relatif capaian-capaian indikator kemiskinan Kabupaten Kayong Utara diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 sebagai berikut:



**Gambar 3.8**  
 Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten Kayong Utara  
 diantara Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021



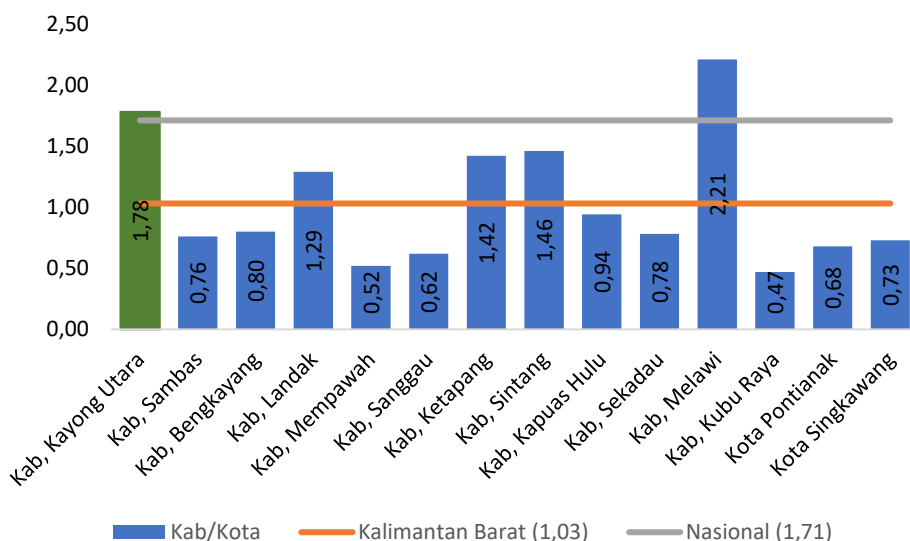
Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

Melihat capaian diatas, maka perlu adanya usaha untuk terus memaksimalkan upaya penurunan angka kemiskinan. Implementasi program-program penanggulangan kemiskinan harus ditingkatkan efektivitasnya dan sasaran program juga harus terus dipertajam agar tepat sasaran. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan sinergi antara Pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat agar memiliki kesamaan visi dan tujuan serta komitmen untuk menjadikan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai program utama dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain indikator angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, indikator indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan perlu terus mendapat perhatian agar perkembangannya terus membaik.

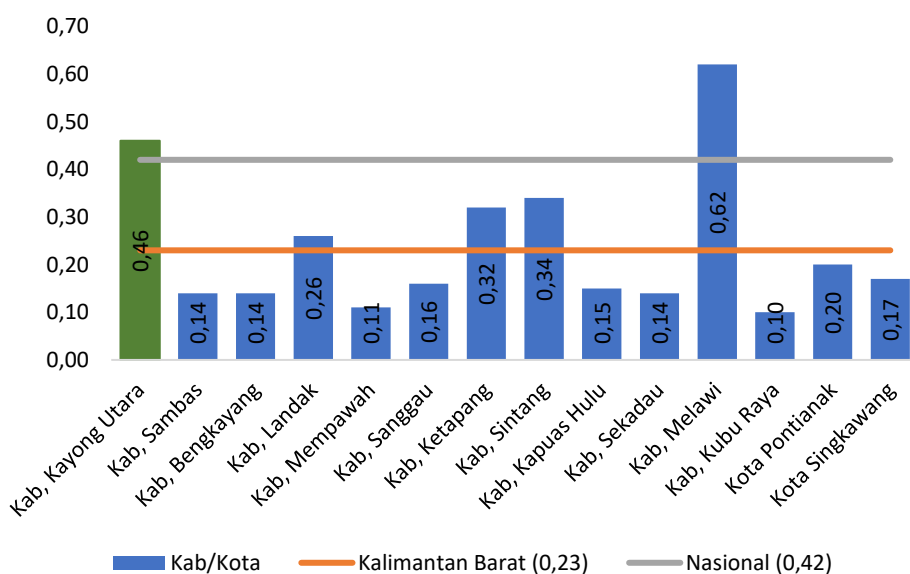


**Gambar 3.9**  
 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kayong Utara Diantara Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

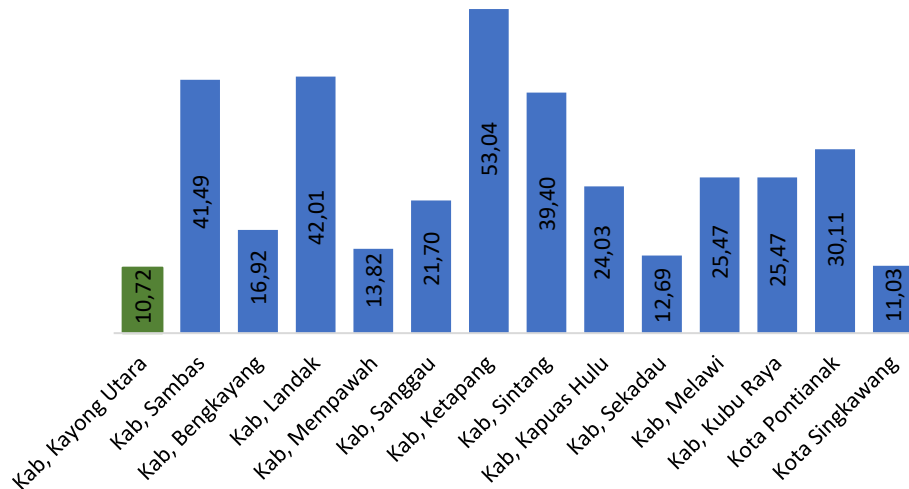
**Gambar 3.10**  
 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kayong Utara Diantara Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)



**Gambar 3.11**  
 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Kabupaten Kayong Utara  
 diantara Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021



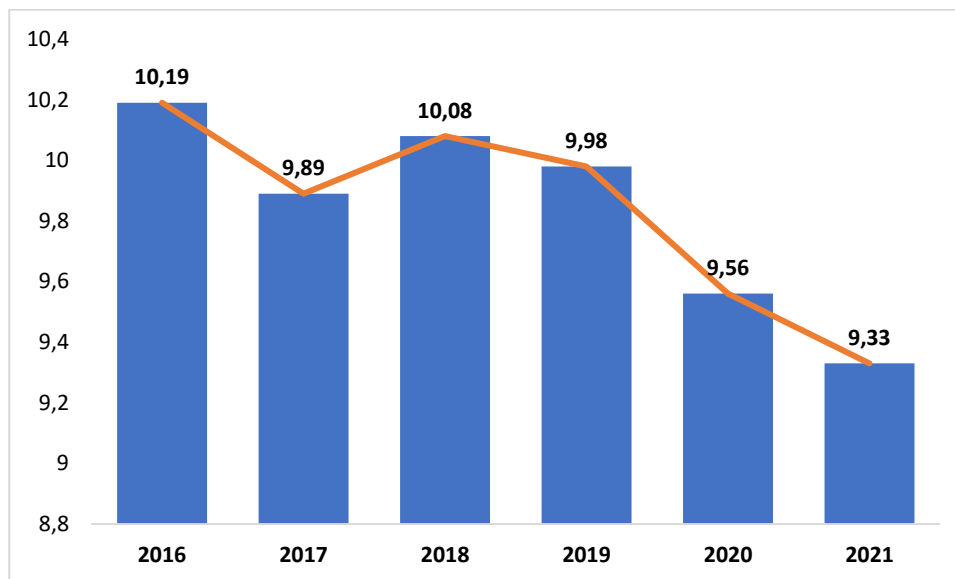
Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

Pada Gambar 3.11 diatas posisi relatif jumlah penduduk miskin Kabupaten Kayong Utara, diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat berada pada urutan ke-1 dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 10,72 ribu jiwa. Capaian Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 untuk posisi relatif di Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami perbaikan dari Tahun 2020 khususnya untuk persentase penduduk miskin.



### 3.2.2 Analisis Efektifitas Tingkat Kemiskinan Daerah

**Gambar 3.12**  
Analisis Efektifitas Tingkat Kemiskinan (%)  
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016-2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

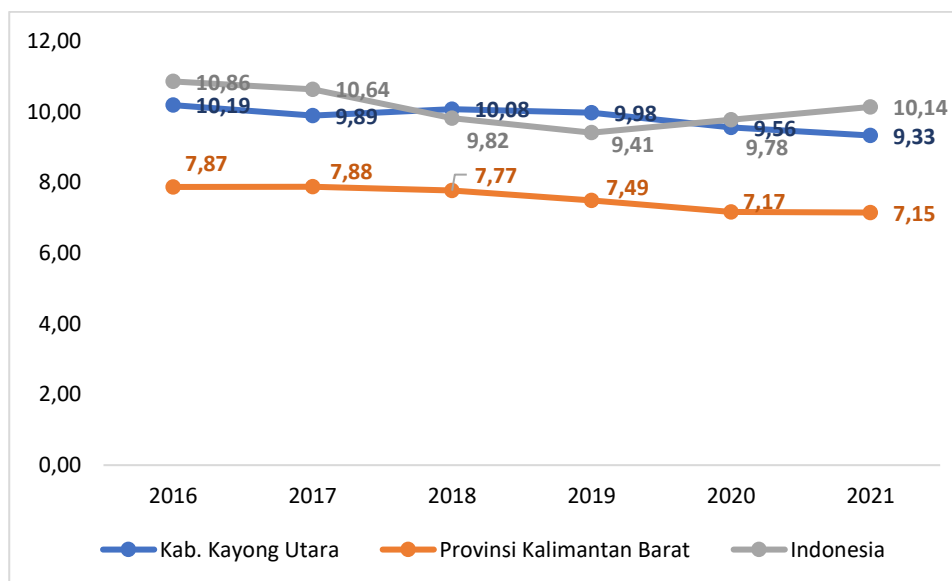
Pada Gambar 3.12 diatas terlihat bahwa intervensi Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara menunjukkan perbaikan. Ini terlihat dengan membaiknya tingkat kemiskinan dari 10,19% di tahun 2016 menjadi 9,33% pada tahun 2021. Rata-rata penurunan per tahun (Tahun 2016-2021) mencapai 0,17% dan kinerja terbaik terlihat pada tahun 2019 dimana penurunannya mencapai 0,42%. Dari grafik juga terlihat trend tingkat kemiskinkan mulai mendekati 9 persen. Dimana fakta juga menunjukkan bahwa jika tingkat kemiskinan semakin kecil, maka semakin sulit untuk menurunkannya lebih rendah lagi. Selain itu dapat disimpulkan pula bahwa proses perencanaan dan intervensi program terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara relatif telah sesuai dan menyasar target yang tepat. Untuk kedepannya diharapkan agar program-program penanggulangan kemiskinan akan terus meningkat efektivitasnya sehingga mampu mempercepat laju penurunan angka kemiskinan.



Namun seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dengan kondisi Pandemi Global COVID-19 yang masih tidak terprediksi kapan berakhirnya, diperkirakan akan menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan dan fenomena ini telah dimasukkan sebagai variabel untuk memprediksi penghitungan kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat pada periode September 2021.

### 3.2.3 Analisis Relevansi Tingkat Kemiskinan Daerah

**Gambar 3.13**  
 Analisis Relevansi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kayong Utara terhadap rata-rata Nasional dan Provinsi Tahun 2016-2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

Analisis Relevansi menggambarkan kesesuaian perkembangan kondisi suatu pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Pemerintah Provinsi dan Nasional. Pada Gambar 3.13 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan penurunan angka kemiskinan Kabupaten Kayong Utara dari tahun 2016-2021 memiliki kesamaan grafik dengan perkembangan penurunan kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat namun agak berbeda dengan Nasional. Hal ini diartikan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Kayong Utara memiliki relevansi dengan tingkat



kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat. Dari grafik terlihat pada Tahun 2016 angka kemiskinan Kabupaten Kayong Utara masih berada pada angka 10,19%, sedangkan Provinsi Kalimantan Barat berada pada angka 7,87% dan Nasional berada pada angka 10,86%. Pada Tahun 2021 angka kemiskinan Kabupaten Kayong Utara berhasil diturunkan menjadi 9,33%, Provinsi Kalimantan Barat pada angka 7,15% dan Nasional 10,14%. Dalam kurun waktu 2016 sampai 2021, terlihat penurunan angka kemiskinan Kabupaten Kayong Utara sebesar 0,86% dengan rata-rata penurunan 0,17% per tahun, Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,72% dengan rata-rata penurunan sebesar 0,14% per tahun dan Nasional sebesar 0,72% dengan rata-rata penurunan 0,14% per tahun. Dari ketiga gambaran tersebut terlihat bahwa kecepatan penurunan angka kemiskinan Kabupaten Kayong Utara relatif lebih cepat dari penurunan angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional. Oleh sebab itu, untuk masa yang akan datang diharapkan penurunan angka kemiskinan Kabupaten Kayong Utara harus dipacu lebih progresif melalui program-program tepat sasaran.

### 3.2.4 Analisis Keterkaitan Tingkat Kemiskinan Daerah

Analisis keterkaitan dilakukan untuk mengetahui apakah 4 (empat) indikator utama kemiskinan memiliki keterkaitan dengan 4 (empat) perspektif di Kabupaten Kayong Utara, sehingga dapat diketahui akar masalah kemiskinan. Lebih jelasnya hasil analisis keterkaitan, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1**  
Analisis Keterkaitan Indikator Kemiskinan terhadap 4 (empat) Perspektif di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021

KAYONG UTARA		PERSPEKTIF				
		Posisi Relatif	Perkembangan antar Waktu	Efektifitas	Relevansi	Keterkaitan
	<b>Persentase Penduduk Miskin (%)</b>	Persentase kemiskinan Kab. Kayong Utara sebesar 9,33% berada di atas kemiskinan Prov.	Perkembangannya dari tahun 2016 sebesar 10,19% semakin <b>membai</b> k pada	Efektif	Relevan terhadap pergerakan angka kemiskinan Provinsi dan Nasional, dengan	Dari ke 4 perspektif terhadap indikator-indikator kemiskinan



	Kalimantan Barat sebesar 7,15%, dan berada di bawah Nasional dengan capaian 10,14%	Tahun 2021, 9,33%		progres lebih cepat dari Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2016-2021	tersebut, terlihat posisi Kabupaten Kayong Utara masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Barat dan sedikit di atas nasional. Hal ini menandakan adanya relevansi dengan capaian Provinsi Kalimantan Barat. Diharapkan intervensi pemerintah akan lebih efektif, terutama terkait dengan sinergitas Program Pemerintah Pusat, dan Provinsi di Kabupaten Kayong Utara.
<b>Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)</b>	Jumlah penduduk miskin Kab. Kayong Utara berada pada posisi pertama tertinggi di Prov. Kalimantan Barat sebesar 10,72 ribu jiwa	Perkembangannya <b>membbaik</b> dari 6 (enam) tahun terakhir 2016-2021	Efektif	Relevan terhadap perkembangan Provinsi dan Nasional	
<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan (%)</b>	Posisi ke-13 di Provinsi Kalimantan Barat, di bawah rata-rata Provinsi dan rata-rata Nasional	Perkembangan <b>menurun</b> di Tahun 2021, mengacu capaian sejak Tahun 2016	Kurang efektif	Relevan terhadap perkembangan Provinsi dan Nasional	
<b>Indeks Keparahan Kemiskinan (%)</b>	Posisi ke-13 di Provinsi Kalimantan Barat, di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional	Perkembangan <b>menurun</b> di Tahun 2021, mengacu capaian sejak Tahun 2016	Kurang efektif	Relevan terhadap perkembangan Provinsi dan Nasional	

### 3.2.5 Profil Kemiskinan Non Konsumsi

Prioritas intervensi kebijakan ditentukan dengan menganalisis determinan kemiskinan atau masalah pokok kemiskinan dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kondisi umum kemiskinan di daerah. Di Kabupaten Kayong Utara determinan kemiskinan berkaitan erat terhadap akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar perumahan, pengangguran dan lainnya. Disamping itu penyebab lain adalah, masyarakat yang kurang cepat untuk dapat keluar dari garis kemiskinan serta terbatasnya kemampuan wirausaha masyarakat. Bidang-bidang yang menjadi determinan kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara adalah:

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan



3. Bidang Infrastruktur Dasar
4. Bidang Ketenagakerjaan
5. Bidang Ekonomi
6. Bidang Ketahanan Pangan

Penjelasan lebih jauh terkait dengan determinan kemiskinan tersebut:

**a. Bidang Pendidikan**

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kualitas pendidikan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didalamnya terdapat komponen pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indikator Pendidikan penting karena tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas dapat menunjang seseorang untuk mengakses kesempatan kerja yang lebih luas dan lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan untuk kebutuhan hidupnya. Dari berbagai penelitian, ditemukan fakta bahwa keluarga miskin memiliki kesulitan akses ke lembaga pendidikan formal dibanding dengan keluarga dengan ekonomi mapan. Akibatnya seorang anak dari keluarga miskin akan lebih sulit bersaing dalam mendapatkan pekerjaan dengan kompensasi yang memadai, dibanding anak dari keluarga mampu. Hal ini akan berdampak dimasa depan, dimana anak tersebut akan sulit untuk dapat keluar dari garis kemiskinannya.

Berikut perbandingan capaian indikator bidang pendidikan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan komponen didalam IPM yang terkait dengan indikator pendidikannya.

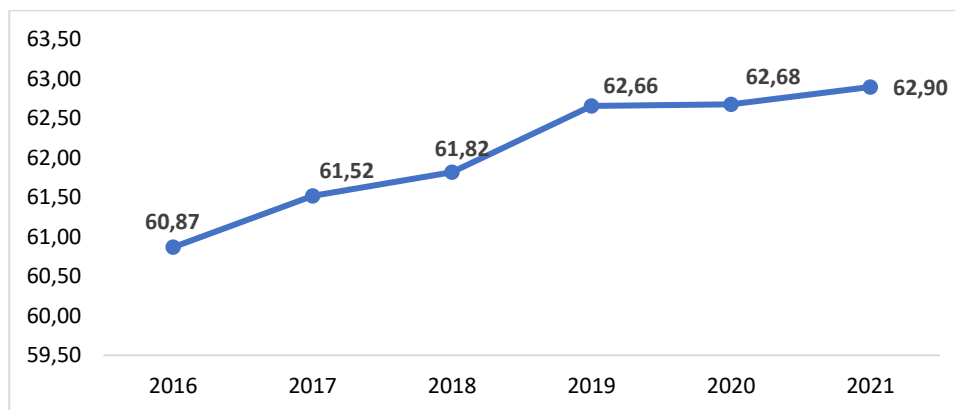
**1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator komposit yang dipilih dan direkomendasikan untuk mengkaji perbandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah maupun perkembangan antar waktu.



IPM disusun dari empat indikator yang menggambarkan tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar yaitu dimensi peluang hidup, yang diukur menggunakan indikator angka harapan hidup penduduk pada saat lahir. Dimensi kedua adalah dimensi pengetahuan/pendidikan diukur dengan dua indikator, yakni angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk berusia kerja. Yang ketiga adalah standar kehidupan yang layak yang diukur menggunakan indikator pendapatan perkapita riil yang telah disesuaikan dengan daya beli (Purchasing Power Parity/PPP).

**Gambar 3.14**  
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016-2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Kayong Utara selama periode 5 tahun terakhir 2016-2021 terus mengalami peningkatan. Dari grafik terlihat bahwa IPM Kabupaten Kayong Utara selama tahun 2021 mencapai 62,90 dari angka 60,87 di tahun 2016. Angka ini termasuk kategori sedang, dan hanya terpaut 7,10 point untuk mencapai IPM Kategori Tinggi yaitu pada kisaran 70-79.

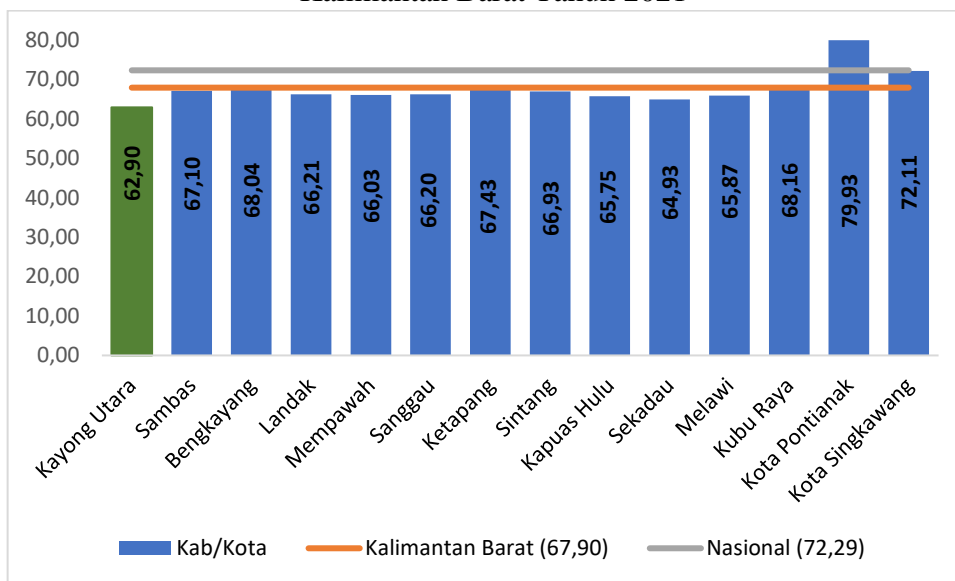
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IPM Kabupaten Kayong Utara mengalami kenaikan sebesar 0,22 poin. IPM ini masih dibawah IPM Provinsi Kalimantan Barat (67,90), namun nilai IPM ini semakin mendekati besaran IPM Kalimantan Barat dari tahun ke tahun.



Peningkatan ini didasari oleh peningkatan dari seluruh dimensi IPM itu sendiri. Hal ini berhubungan dengan perbaikan yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah pada setiap dimensinya yaitu dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Pada gambar berikut ditampilkan Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kayong Utara.

**Gambar 3.15**  
Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

Jika dilihat dari posisi relatif, IPM Kabupaten Kayong Utara berada di bawah capaian Provinsi, dimana IPM Provinsi sebesar 67,90 dan di bawah nasional 72,29. Di lingkup Provinsi Kalimantan Barat, IPM Kabupaten Kayong Utara berada pada posisi peringkat ke-14. Namun nilai IPM Kabupaten Kayong Utara mengalami kenaikan 2,03 poin dengan makin meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, jika melihat perkembangan IPM dalam kurun waktu 6 tahun ini, laju peningkatan IPM Kabupaten Kayong Utara pada urutan ke-7 dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Barat dengan progress kenaikan 0,66 poin. Namun terlepas dari itu, nilai IPM ini harus terus ditingkatkan dan menjadi target dan prioritas intervensi pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

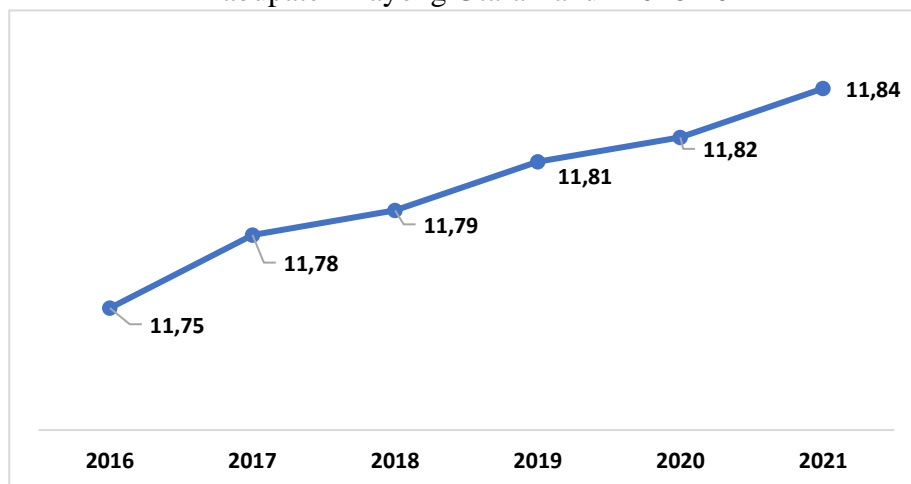


## 2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Indikator pendidikan didalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) salah satunya dihitung melalui komponen Harapan Lama Sekolah (HLS). Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kayong Utara pada Tahun 2021 sebesar 11,84 tahun. Makna dari HLS ini adalah setiap anak usia 7 tahun diharapkan bersekolah selama 11,84 tahun atau setara dengan SMA kelas 3.

Secara umum, Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kayong Utara selama periode 6 tahun terakhir 2016-2021 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2016 sebesar 11,75 tahun dan berkembang menjadi 11,84 di tahun 2021. HLS Kayong Utara mampu merangkak naik sebesar 0,09 tahun selama kurun waktu 6 tahun tersebut. Pada gambar berikut ditampilkan Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kayong Utara dan Posisi Relatif Harapan Lama sekolah Kabupaten Kayong Utara

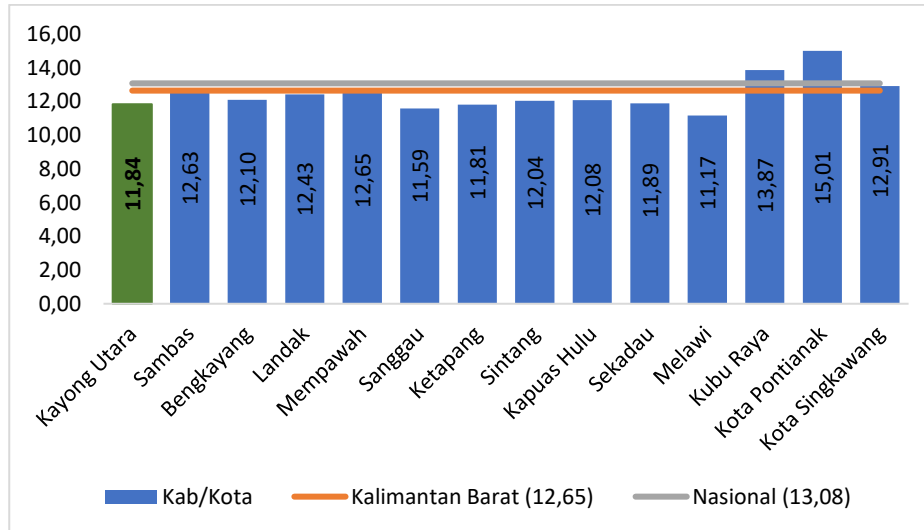
**Gambar 3.16**  
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (Tahun)  
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016-2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)



**Gambar 3.17**  
Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah (Tahun) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

Pada gambar 3.16 dan 3.17 diatas terlihat bahwa perkembangan harapan lama sekolah Kabupaten Kayong Utara 6 tahun terakhir 2016-2021 terus mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan HLS Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun 2021 ini HLS Kabupaten Kayong Utara lebih rendah dari HLS Provinsi Kalimantan Barat, dan juga berada di bawah HLS nasional yang dengan capaian 13,08 tahun. HLS Kabupaten Kayong Utara berada di peringkat ke-11 se-Provinsi Kalimantan Barat.

### 3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

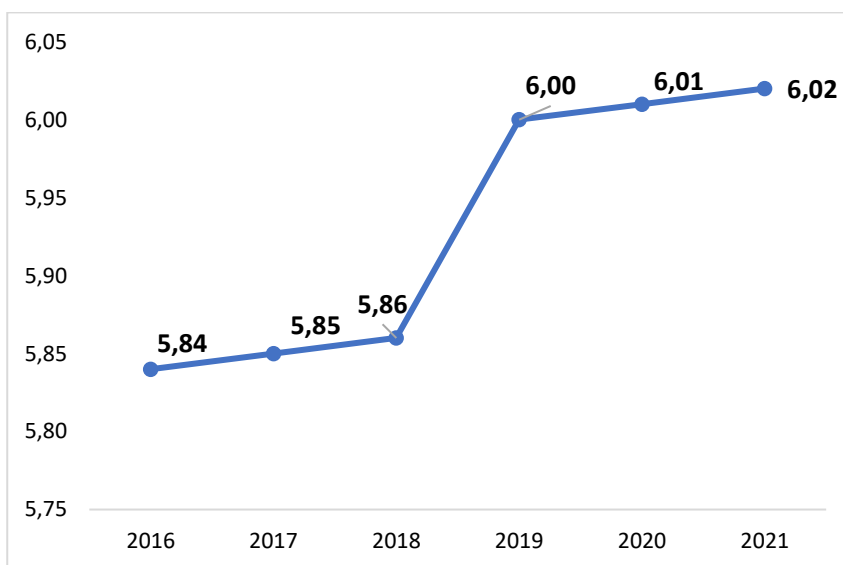
Indikator pendidikan didalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selanjutnya dihitung melalui komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kayong Utara pada Tahun 2021 sebesar 6,02 tahun, maknanya adalah penduduk Kayong Utara 25 tahun ke atas rata-rata bersekolah selama 6,02 tahun atau setara kelas 1 SMP.

Secara umum, Rata-rata Lama Sekolah Kayong Utara selama periode 6 tahun terakhir 2016-2021 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2016 sebesar 5,84 tahun (setara tidak tamat SD) dan berkembang menjadi 6,01 tahun di tahun 2021. RLS Kayong Utara mampu merangkak naik



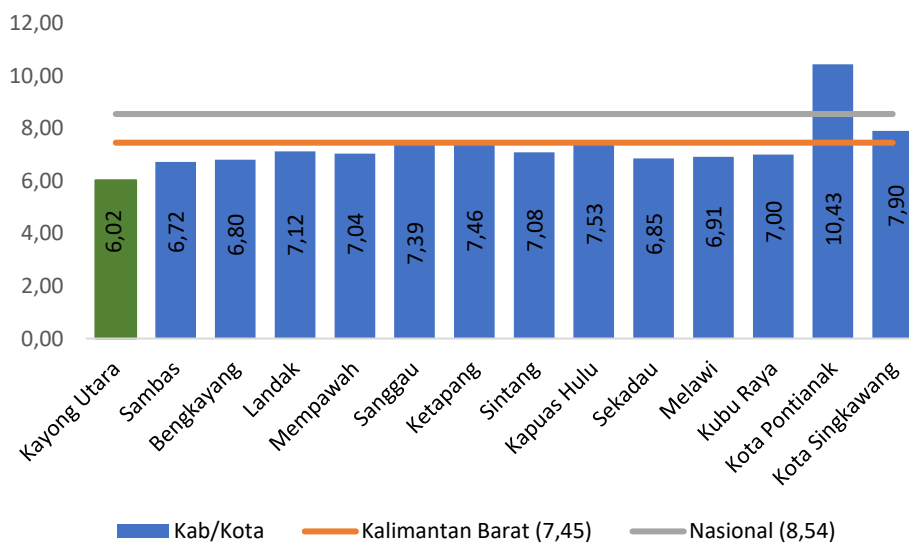
sebesar 0,18 tahun selama kurun waktu 6 tahun tersebut. Pada gambar berikut ditampilkan Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kayong Utara dan Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kayong Utara.

**Gambar 3.18**  
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)  
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016-2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

**Gambar 3.19**  
Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Provinsi  
Kalimantan Barat Tahun 2021





Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

Pada gambar 3.18 dan 3.19 diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan harapan lama sekolah Kabupaten Kayong Utara 6 tahun terakhir 2016-2021 terus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan RLS Provinsi Kalimantan Barat, RLS Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2021 berada jauh dibawah rata- rata provinsi. Selisih antara RLS Provinsi Kalimantan Barat dan RLS Kabupaten Kayong Utara mencapai 1,43 tahun dan juga berada dibawah RLS nasional dengan capaian 8,54 tahun (selisih dengan capaian nasional 2,52 tahun). Secara peringkat se-Provinsi Kalimantan Barat, RLS Kabupaten Kayong Utara berada di posisi terakhir. Dengan capaian tersebut, Indikator RLS ini dianggap masih bermasalah dan menjadi prioritas intervensi untuk terus ditingkatkan, karena berada dibawah rata-rata Provinsi Kalimantan Barat dan nasional.

## **b. Bidang Kesehatan**

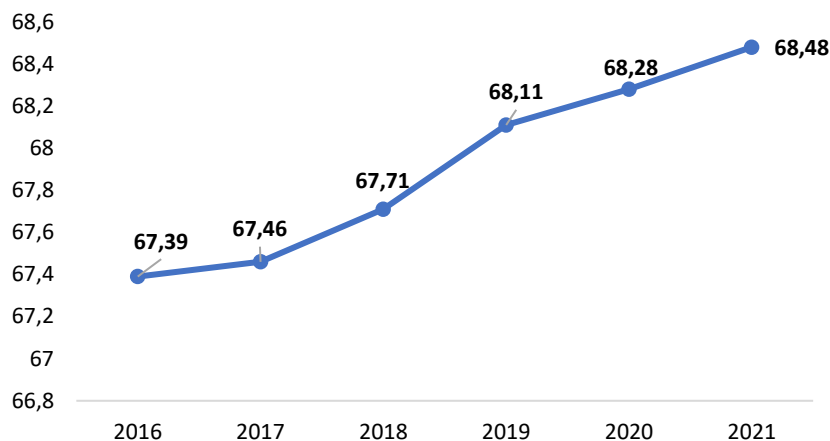
### **1. Umur Harapan Hidup (UHH)**

Indikator kesehatan didalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dicerminkan melalui komponen Usia Harapan Hidup (UHH). Pada tahun 2020 UHH Kabupaten Kayong Utara sebesar 66,94 tahun, yang artinya bayi yang lahir di Kabupaten Kayong Utara diharapkan mampu hidup hingga usia 66,94 tahun. Dibandingkan dengan tahun 2019, UHH Kabupaten Kayong Utara mengalami peningkatan 0,30 tahun atau empat bulan.

Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kayong Utara meningkat sebesar 1,5 tahun selama kurun waktu 5 tahun tersebut. Pada gambar berikut ditampilkan Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Kayong Utara dan Posisi Relatif Umur Harapan Hidup Kabupaten Kayong Utara.

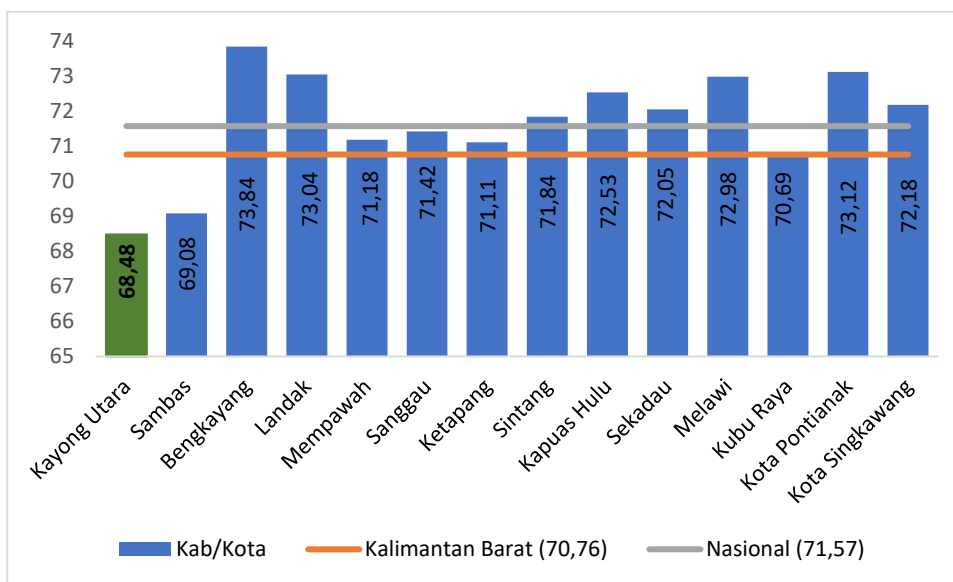


**Gambar 3.20**  
Perkembangan Umur Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016-2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

**Gambar 3.21**  
Posisi Relatif Umur Harapan Hidup (Tahun) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

Pada gambar diatas terlihat umur harapan hidup Kabupaten Kayong Utara lebih rendah dari UHH Provinsi Kalimantan Barat, selisihnya



mencapai 2,28 tahun. UHH Kabupaten Kayong Utara juga berada jauh dibawah UHH nasional dengan capaian 71,57 tahun (selisih dengan capaian nasional sebesar 3,09 tahun).

Secara peringkat se-Provinsi Kalimantan Barat, UHH Kabupaten Kayong Utara berada di posisi terakhir. Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa Indikator Umur Harapan Hidup (UHH) ini dianggap masih bermasalah dan menjadi prioritas intervensi untuk terus ditingkatkan, karena berada dibawah rata-rata provinsi dan nasional.

### c. Bidang Infrastruktur Dasar

Analisis bidang infrastruktur dasar yang merupakan karekteristik penting dalam penanggulangan kemiskinan dan sering dinamakan indikator utama adalah indikator rumah tangga dengan sanitasi layak (%), indikator rumah tangga dengan air minum layak (%) dan indikator rumah tangga dengan akses listrik (%). Capaian indikator-indikator tersebut di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021, sebageaian besar masih bermasalah, sehingga masih menjadi prioritas utama dalam penanggulangan kemiskinan. Berikut Capaian indikator-indikator Bidang Infrastruktur Dasar yang mempengaruhi angka kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara.

**Tabel 3.22**

Perbandingan Capaian Indikator Infrastruktur Dasar Perumahan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2021

INDIKATOR	Capaian Kayong Utara	Capaian Kalimantan Barat	Capaian Nasional
Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)	71,34	78,39	80,29
Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%)	98,84	78,76	90,78
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%)	87,38	86,92	97,26

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022

Pada Tabel 3.22 diatas dapat dilihat bahwa dari ketiga indikator



utama kemiskinan bidang infrastruktur dasar perumahan, 1 (satu) indikator masih berada dibawah capaian Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (71,34%). Namun untuk beberapa indikator seperti Proporsi rumah tangga dengan air minum layak dan proporsi rumah tangga dengan akses listrik, capaian Kabupaten Kayong Utara masih lebih baik dari provinsi dan nasional. Walaupun demikian, indikator ini tetap menjadi perhatian utama untuk di intervensi dalam program pengentasan kemiskinan.

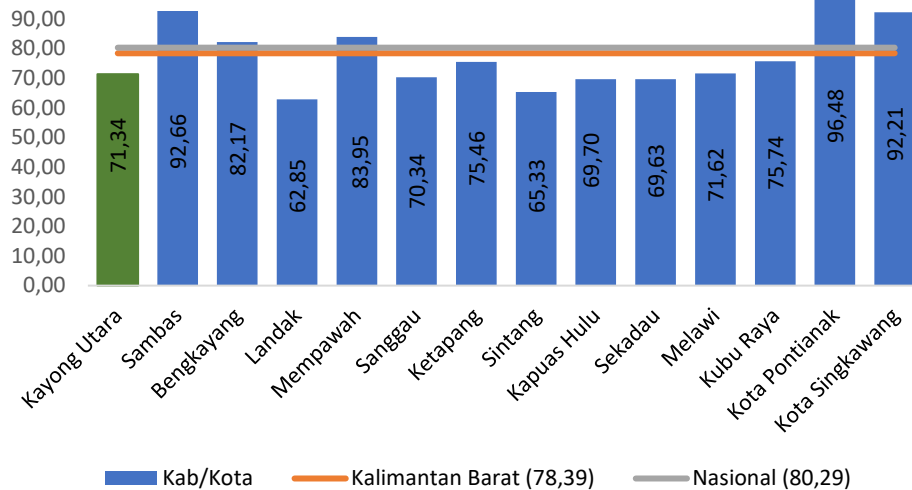
### **1. Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)**

Dilihat dari posisi relatif, capaian indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021, berada pada urutan ke-9 dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan capaian sebesar 71,34% berada dibawah provinsi dan nasional. Namun jika dilihat dari perkembangan antar waktu, terlihat bahwa sejak tahun 2017 dengan capaian 60,18% perkembangannya terus membaik hingga pada tahun 2021 menjadi 71,34%.

Untuk lebih jelasnya capaian Indikator Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 dilihat dari posisi relatif, perkembangan antar waktu dapat lihat pada Gambar 3.23 dan Gambar 3.24 berikut:

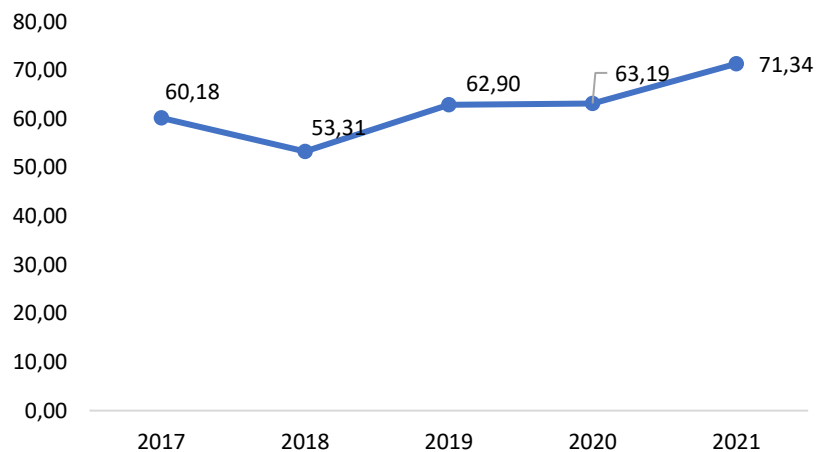


**Gambar 3.23**  
Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak  
(%) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022

**Gambar 3.24**  
Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak  
(%) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022

Dengan capaian tersebut Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) ini dianggap masih bermasalah dan menjadi prioritas intervensi untuk terus ditingkatkan dan ditangani agar indikator ini terus membaik, karena berada dibawah capaian Provinsi Kalimantan Barat dan nasional.

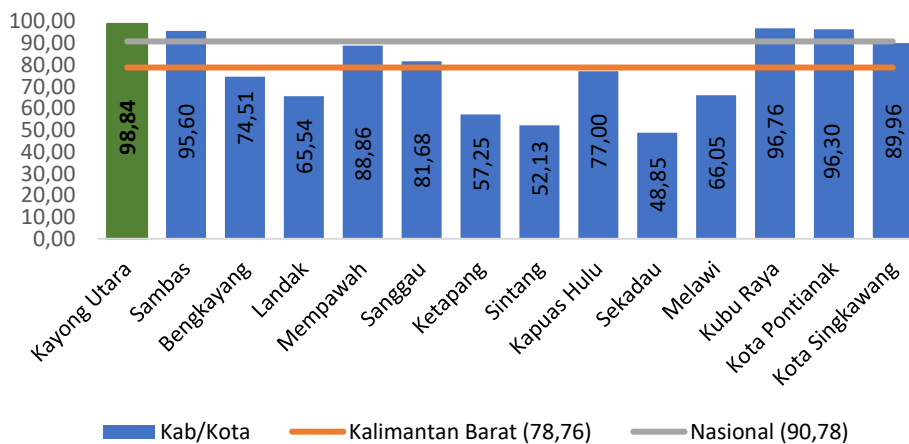


## 2. Proporsi Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak (%)

Dilihat dari posisi relatif, capaian indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021, berada pada urutan pertama dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan capaian sebesar 98,84% berada di atas capaian provinsi sebesar 78,76% dan juga dibatas capaian nasional dengan capaian 90,78%. Untuk perkembangan antar waktu menunjukkan tahun 2016 dengan capaian 89,19% perkembangannya terus membaik hingga pada tahun 2021 menjadi 98,84%.

Untuk lebih jelasnya capaian Indikator Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 dilihat dari posisi relatif, dan perkembangan antar waktu dapat lihat pada Gambar 3.25 dan Gambar 3.26 berikut:

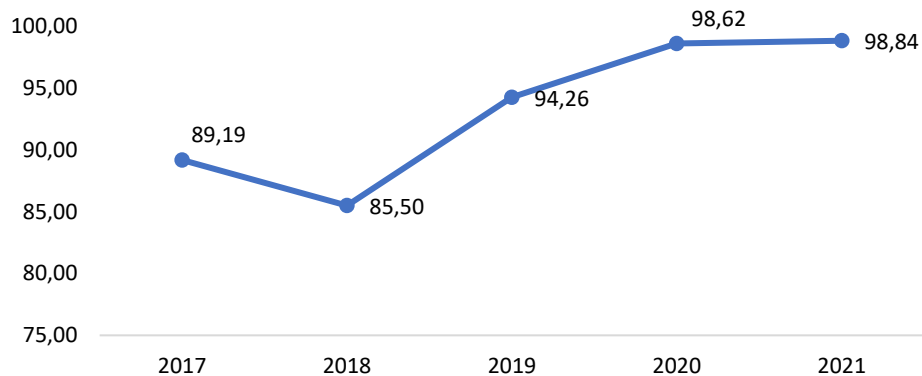
**Gambar 3.25**  
Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022



**Gambar 3.26**  
Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022

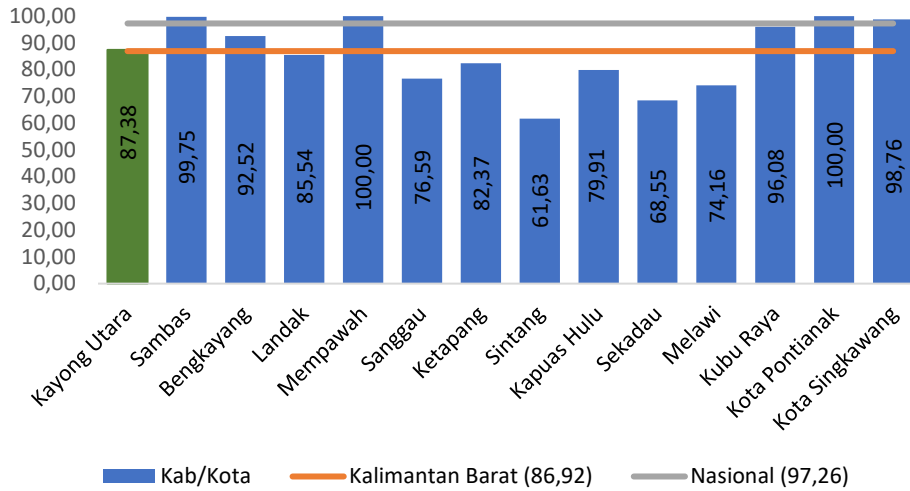
Dengan capaian yang cenderung meningkat, Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) ini dianggap tidak bermasalah dan tidak menjadi prioritas intervensi.

### 3. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik (%)

Dilihat dari posisi relatif, capaian indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021, berada pada urutan ke 7 dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan capaian sebesar 87,38% berada di atas capaian Provinsi Kalimantan Barat, namun di bawah capaian nasional. Perkembangan antar waktu Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Kabupaten Kayong Utara menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif dan cenderung menurun, pada Tahun 2016 dengan capaian 88,85% perkembangannya mengalami penurunan hingga pada Tahun 2021 menjadi 87,38%. Capaian Indikator Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kabupaten Kayong Utara tahun 2021 dilihat dari posisi relatif, dan perkembangan antar waktu lebih jelas lihat pada gambar 3.27 dan gambar 3.28 berikut.

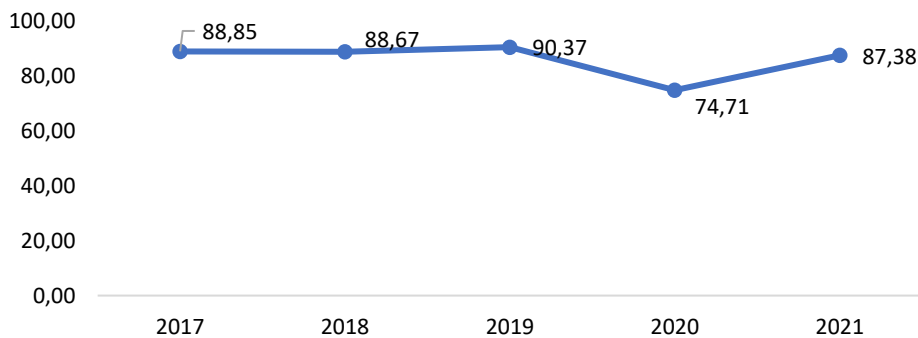


**Gambar 3.27**  
Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik PLN (%) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022

**Gambar 3.28**  
Perkembangan Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik PLN (%) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022

Dengan capaian tersebut diatas baik posisi relatif dan perkembangan antar waktu, indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) ini masih bermasalah dan sudah berada di atas capaian Provinsi Kalimantan Barat, namun masih berada di bawah capaian nasional, sehingga harus ditangani agar indikator ini lebih baik dan tidak memburuk.

Berdasarkan hasil analisis Bidang Infrastruktur Dasar, maka indikator yang masih bermasalah dan harus mendapat prioritas adalah Indikator Proporsi RT dengan Sanitasi Layak (%) dan Indikator Proporsi Rumah



Tangga dengan Akses Listrik (%). Namun indikator bidang Infrastruktur Dasar lainnya masih harus terus diperhatikan agar capaiannya tidak sampai memburuk dan tetap bisa berada diatas capaian rata-rata Provinsi Kalimantan Barat dan nasional.

#### d. Bidang Ketenagakerjaan

Analisis bidang ketenagakerjaan yang merupakan indikator daerah, juga sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan. Indikator-indikator tersebut adalah Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%), Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%), dan Indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%).

Capaian indikator-indikator tersebut di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021, sebagian besar masih bermasalah, sehingga menjadi prioritas utama dalam penanggulangan kemiskinan. Berikut capaian indikator-indikator Ketenagakerjaan yang mempengaruhi angka kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021.

**Tabel 3.3**  
Perbandingan Capaian Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2021

INDIKATOR	Capaian Kayong Utara	Capaian Provinsi Kalimantan Barat	Capaian Nasional
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,78	5,82	6,49
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	65,53	68,45	67,80
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	96,22	94,18	93,51

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022

Pada Tabel 3.4 diatas dapat dilihat bahwa dari ketiga indikator ketenagakerjaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 masih berada dibawah capaian Provinsi Kalimantan Barat



dan nasional, sementara Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) dan indikator Tingkat Kesempatan Kerja (%) sudah lebih baik dari capaian provinsi dan nasional.

**a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

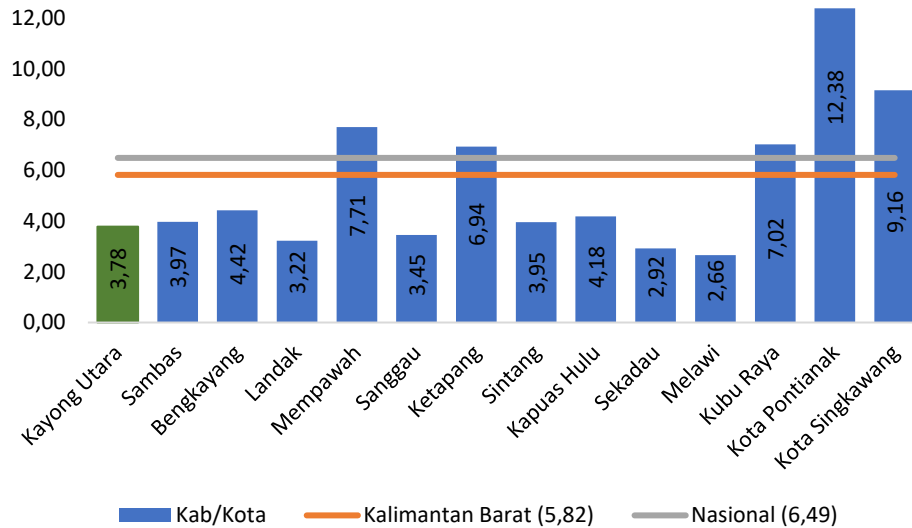
Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja. Manfaat analisis terhadap indikator ini adalah untuk melihat keterjangkauan pekerjaan.

Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 dilihat dari Posisi relatif nya berada pada urutan ke-5 terkecil dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebesar 5,82%. Perkembangan antar waktu Tingkat Pengangguran Terbuka dari Tahun 2017-2021 terlihat berfluktuatif yang cenderung menurun, sehingga dari prioritas intervensi indikator ini tidak bermasalah dan harus tetap diprioritaskan agar indikator ini terus membaik.

Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 dilihat dari Posisi relatif dan perkembangan antar waktu dapat dilihat pada Gambar berikut.

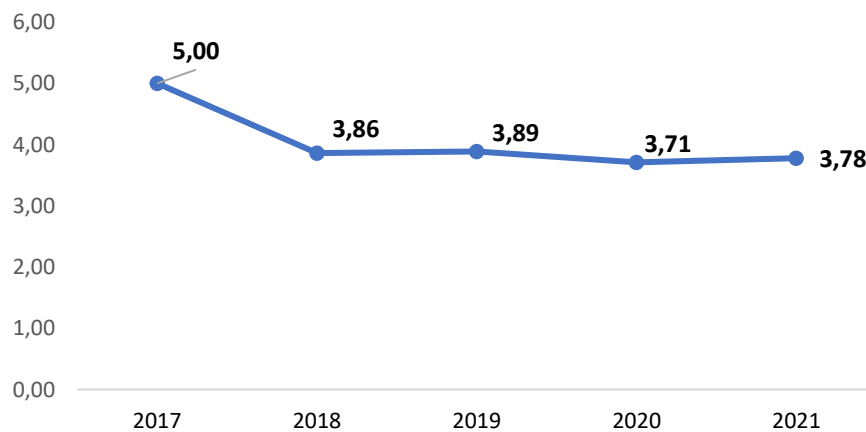


**Gambar 3.29**  
Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022

**Gambar 3.30**  
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2017-2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022

**b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja merupakan perbandingan antara Angkatan Kerja (bekerja + pengangguran) dengan jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas x 100. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin

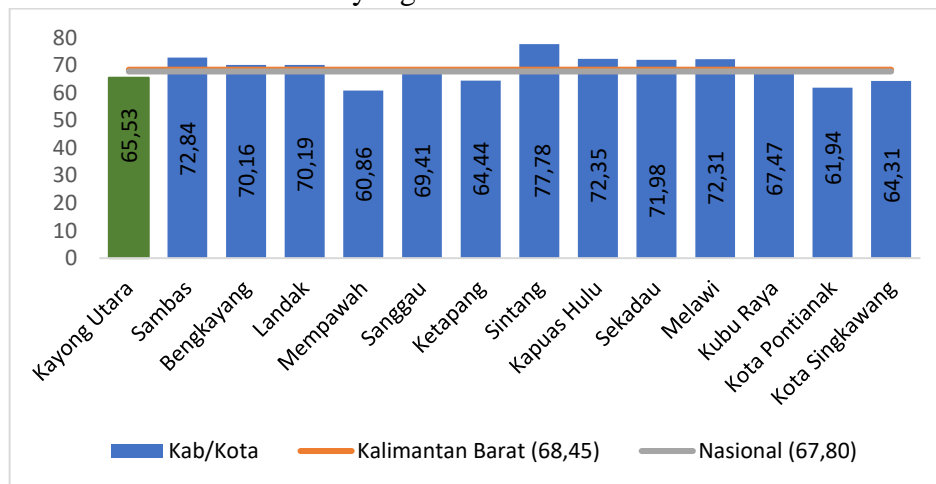


besar bagian dari penduduk usia kerja yang terlibat atau yang berusaha terlibat dalam kegiatan yang produktif untuk memproduksi barang dan/jasa dalam kurun waktu tertentu.

Capaian Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 dilihat dari Posisi relatif berada pada urutan ke-10 terendah dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan capaian sebesar 65,53% berada di bawah capaian Provinsi Kalimantan Barat sebesar 68,45% dan di bawah capaian Nasional sebesar 67,80%. Perkembangan antar waktu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dari Tahun 2016-2021 terlihat berfluktuatif, sehingga dari prioritas intervensi indikator ini masih bermasalah dan harus tetap diprioritaskan agar indikator ini terus membaik walaupun berada diatas capaian nasional namun perlu terus untuk ditingkatkan.

Capaian Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 dilihat dari Posisi relatif dan perkembangan antar waktu dapat dilihat pada Gambar berikut.

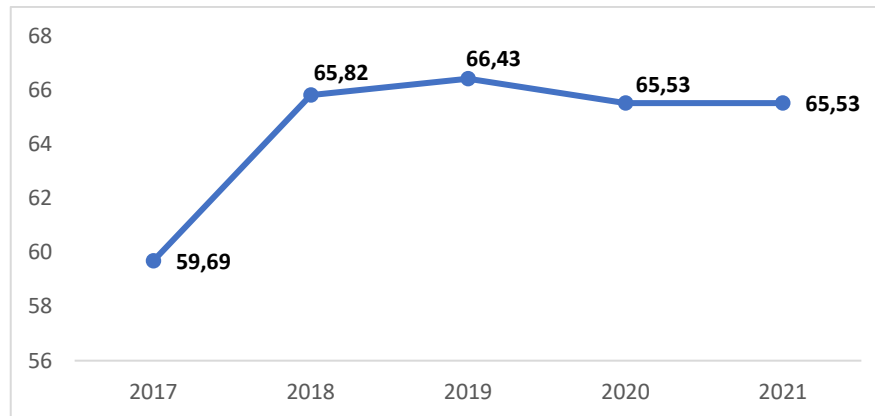
**Gambar 3.31**  
Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022



**Gambar 3.32**  
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)  
Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2017-2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022

### c. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) menggambarkan seberapa besar peluang seseorang yang termasuk angkatan kerja untuk dapat terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja. Semakin besar angka Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) maka semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah. Manfaat analisis Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dapat menggambarkan peluang seseorang untuk dapat bekerja dalam suatu wilayah.

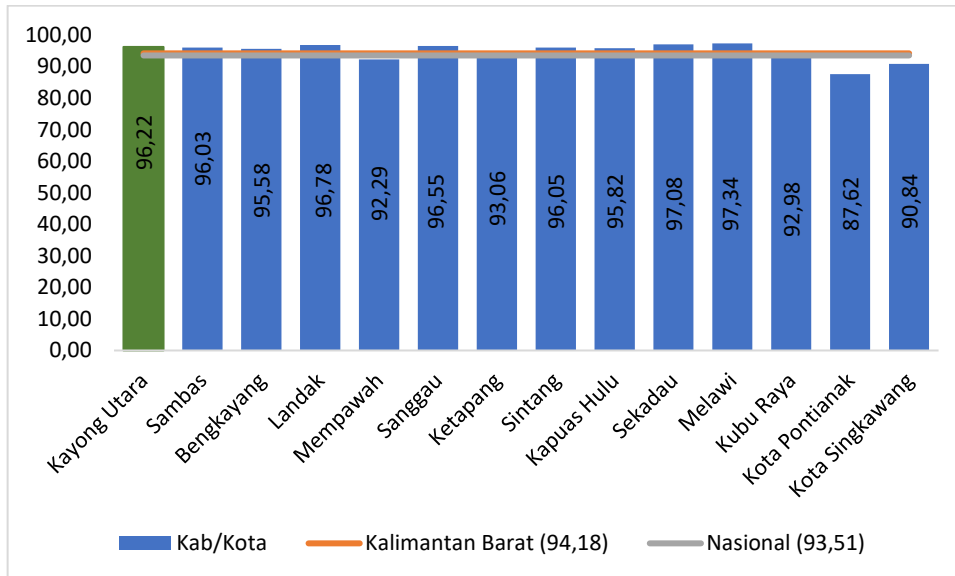
Capaian indikator Tingkat Kesempatan Kerja (%) Kabupaten Kayong Utara tahun 2021 dilihat dari posisi relatif berada pada urutan ke-5 dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan capaian sebesar 96,22%. Dari capaian tersebut berada di atas capaian Provinsi Kalimantan Barat sebesar 94,18% dan berada di atas Capaian Nasional sebesar 93,51%. Hal ini menunjukkan bahwa peluang seseorang yang untuk mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Kayong Utara lebih besar dari rata-rata Nasional. Untuk perkembangan antar waktu Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Kayong Utara dari Tahun 2017-2021 terlihat berfluktuatif dan meningkat, sehingga dari prioritas intervensi indikator ini tidak bermasalah dan namun tetap diprioritaskan agar indikator ini terus membaik walaupun berada diatas



capaian nasional namun perlu terus untuk ditingkatkan.

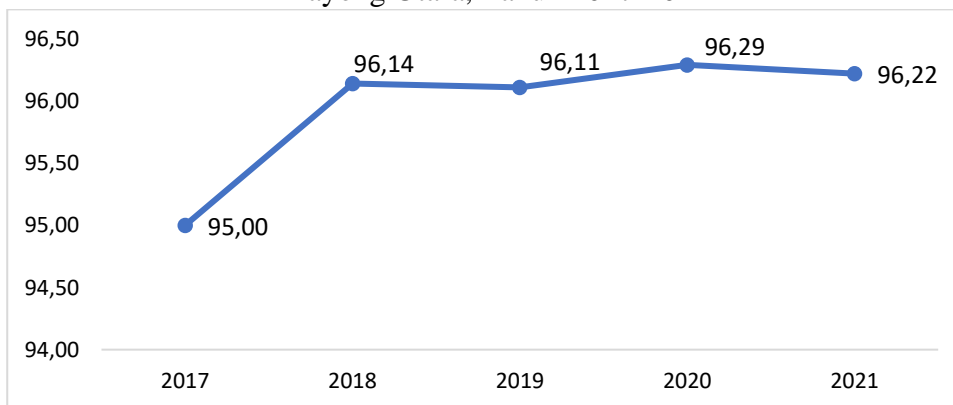
Capaian Indikator Tingkat Kesempatan Kerja (%) Kabupaten Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 dilihat dari Posisi relatif dan perkembangan antar waktu dapat dilihat pada Gambar berikut.

**Gambar 3.33**  
Posisi Relatif Tingkat Kesempatan Kerja (%) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022

**Gambar 3.34**  
Perkembangan Tingkat Kesempatan Kerja (%) Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2017-2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022



Berdasarkan hasil analisis terhadap indikator-indikator ketenagakerjaan dapat ditentukan yang masih bermasalah dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah: Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%).

**e. Bidang Ekonomi**

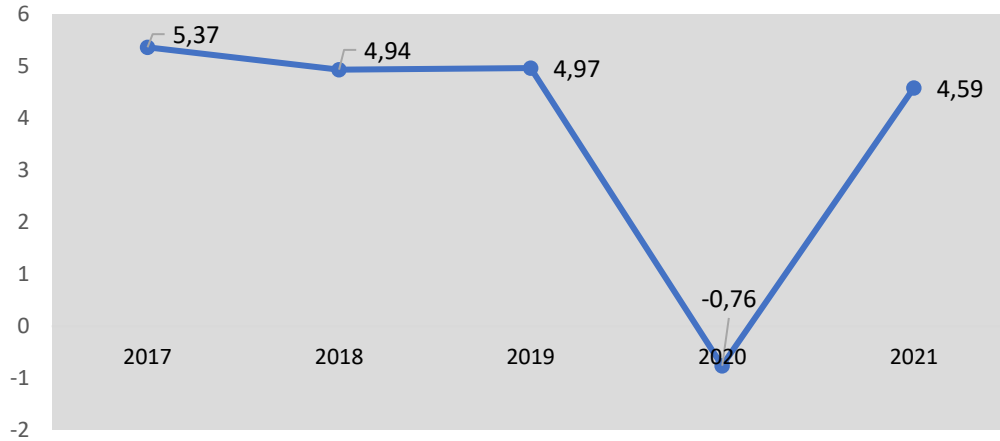
Analisis bidang ekonomi difokuskan pada indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi. Indikator pertumbuhan ekonomi ini yang dianggap paling berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan seberapa berkembangnya perekonomian suatu wilayah secara total.

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari suatu kurun waktu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi mengindikasikan semakin baiknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan perkembangan antar waktu, nilai ekonomi atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kayong Utara dari tahun 2017 hingga 2021 berfluktuatif. Pada tahun 2020, adanya bencana non alam pandemi global COVID-19, mengakibatkan kapasitas produksi, tingkat konsumsi dan investasi mengalami penurunan sehingga pertumbuhan ekonomi juga melemah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kayong Utara berkontraksi ke angka -0,76. Namun kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir di seluruh belahan dunia.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat di grafik di bawah ini yang menggambarkan Capaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Kayong Utara dilihat dari Perkembangan antar waktu Tahun 2017-2021 dan Posisi relatif Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar berikut.

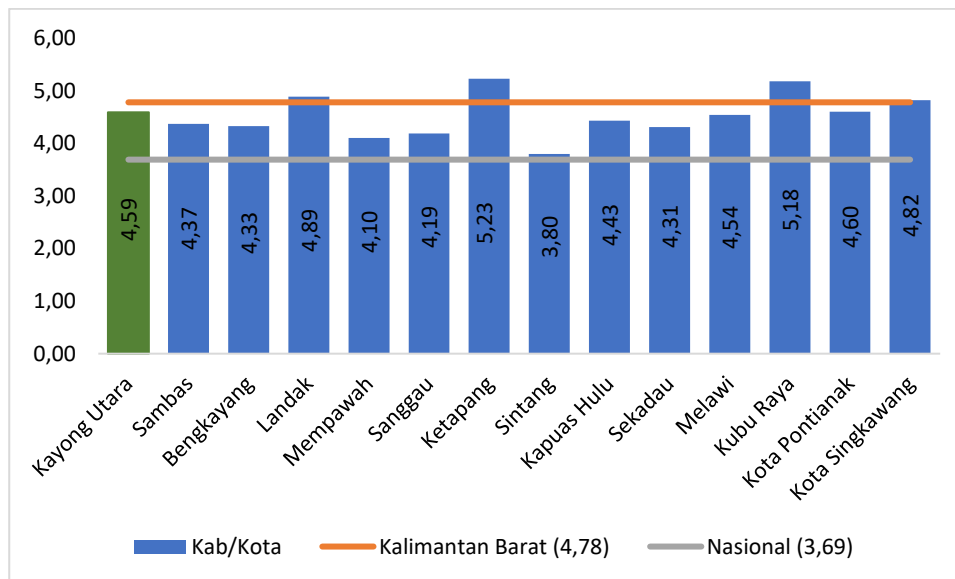


**Gambar 3.35**  
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (%)  
Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2017-2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022

**Gambar 3.36**  
Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Kayong  
Utara Tahun 2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022

Seperti yang telah disebutkan di atas, Kabupaten Kayong Utara tahun 2021 dilihat dari posisi relatif berada pada urutan ke-6 dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan pertumbuhan ekonomi 4,59%. Capaian ini berada dibawah capaian Provinsi Kalimantan Barat dengan pertumbuhan ekonomi 4,78% namun berada di atas pertumbuhan



nasional sebesar 3,69%. Untuk perkembangan antar waktu Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kayong Utara dari Tahun 2017-2021 terlihat berfluktuatif, sehingga disimpulkan bahwa prioritas intervensi indikator ini **harus tetap diprioritaskan** agar indikator pertumbuhan ekonomi terus membaik dengan laju pertumbuhan percepatan dan berada pada pertumbuhan positif.

#### f. Bidang Ketahanan Pangan

Provinsi Kalimantan Barat dikenal sebagai Lumbung padi nasional, karena mampu menghasilkan beras yang melimpah dan diharapkan mampu dalam mengelola urusan pangan terlebih dalam pengelolaan cadangan pangan daerah, sehingga Kalimantan Barat dapat membantu Pemerintah Pusat dalam menyokong pangan nasional.

Kabupaten Kayong Utara menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Barat memberikan share untuk Pertanian Kalimantan Barat sebagai pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 1,86%.

Dari data didapat bahwa salah satu sektor yang tidak terdampak Covid-19 adalah Sektor Pertanian, dimana sektor ini tetap tumbuh positif. Oleh sebab itu maka pertanian harus dikembangkan agar mampu mengurangi jumlah masyarakat miskin. Untuk Kabupaten Kayong Utara, sektor pertanian masih bisa tumbuh positif 3,82% (Laju masing-masing sektor pada Tabel 3.5 dibawah) dengan distribusi sektor pertanian tertinggi dibandingkan sektor lainnya yaitu sebesar 28,63% (Tabel 3.6). Oleh karena itu, Pertanian menjadi pembuktian bahwa dalam tantangan apapun, pertanian selalu berproduksi. Ini adalah bukti sektor pertanian tidak terkena dampak akibat tantangan apapun sehingga kita harus bersinergi memperkuatnya ke depan.



**Tabel 3.5**  
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Menurut Lapangan Usaha (persen) Kabupaten Kayong Utara  
Tahun 2017 – 2021

Kategori Category	Lapangan Usaha/ Industry	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,74	3,70	3,98	3,25	3,82
B	Pertambangan dan Penggalian	4,73	3,53	4,67	0,75	4,55
C	Industri Pengolahan	5,24	3,85	4,70	-0,56	4,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,43	3,74	5,46	4,49	1,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,67	5,00	5,59	3,20	5,97
F	Konstruksi	8,57	5,70	6,23	-5,64	7,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,85	5,24	6,12	-7,36	3,12
H	Transportasi dan Pergudangan	5,10	5,40	5,09	-12,05	-2,88
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,99	6,04	6,79	-12,08	7,13
J	Informasi dan Komunikasi	13,92	11,68	6,16	8,35	6,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,34	6,58	-1,31	-0,71	3,65
L	Real Estat	3,61	3,94	4,32	1,50	3,21
M,N	Jasa Perusahaan	5,01	4,88	4,93	-4,08	0,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,88	5,29	5,96	1,79	-1,26
P	Jasa Pendidikan	3,24	3,47	5,19	-6,01	5,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,84	7,54	5,94	14,70	31,18
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,50	4,54	4,57	-13,71	0,98
<b>Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product</b>		<b>5,37</b>	<b>4,94</b>	<b>4,97</b>	<b>-0,76</b>	<b>4,59</b>

Sumber Data : BPS Kabupaten Kayong Utara, 2022



**Tabel 3.6**  
Distribusi Persentase masing-masing Sektor terhadap  
PDRB Kabupaten Kayong Utara Atas Dasar Harga Berlaku,  
Tahun 2017 – 2021

Kategori Category	Lapangan Usaha/ Industry	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b> <i>/Agriculture, Forestry &amp; Fishing</i>	28,54	27,87	27,25	28,39	28,63
B	<b>Pertambangan dan Penggalian</b> <i>/Mining &amp; Quarrying</i>	4,42	4,42	4,39	4,45	4,48
C	<b>Industri Pengolahan</b> <i>/Manufacturing</i>	9,80	9,80	9,69	9,65	9,92
D	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b> <i>/Electricity &amp; Gas</i>	0,07	0,07	0,07	0,08	0,07
E	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</b> <i>/Water supply, Sewerage, Waste Management &amp; Remediation Activities</i>	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
F	<b>Konstruksi</b> <i>/Construction</i>	11,91	12,13	12,41	12,03	12,59
G	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b> <i>/Wholesale &amp; Retail Trade; Repair of Motor Vehicles &amp; Motorcycles</i>	13,09	13,18	13,45	12,72	12,20
H	<b>Transportasi dan Pergudangan</b> <i>/Transportation &amp; Storage</i>	3,40	3,37	3,36	3,13	2,90
I	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b> <i>/Accommodation &amp; food Service Activities</i>	2,27	2,30	2,36	2,12	2,13
J	<b>Informasi dan Komunikasi</b> <i>/Information &amp; Communication</i>	4,25	4,46	4,54	4,88	4,86
K	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b> <i>/Financial &amp; Insurance Activities</i>	2,14	2,19	2,04	1,99	2,00
L	<b>Real Estat</b> <i>/Real Estate Activities</i>	3,19	3,19	3,19	3,19	3,02
M, N	<b>Jasa Perusahaan</b> <i>/Business Activities</i>	0,33	0,33	0,33	0,31	0,29
O	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</b> <i>/Public Administration &amp; Defence; Compulsory Social Security</i>	9,99	10,10	10,29	10,62	9,92
P	<b>Jasa Pendidikan</b> <i>/Education</i>	3,22	3,15	3,18	2,85	2,81
Q	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial /</b>	2,23	2,27	2,31	2,66	3,30



	<i>Human Health and Social Work Activities</i>					
R,S ,T, U	<b>Jasa lainnya /Other Service Activities</b>	1,02	1,03	1,02	0,80	0,73
<b>Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber Data : BPS Kabupaten Kayong Utara, 2022



## BAB IV

### PRIORITAS PROGRAM

Selama ini, jika kita bicara soal kemiskinan, pikiran kita secara langsung akan tertuju pada angka-angka yang menjadi "mistar" bagi kondisi seseorang, kemiskinan atau tidak miskin. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan garis kemiskinan (GK) untuk mengukur kemiskinan. GK dimaknai sebagai suatu representasi jumlah uang minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makan-minum yang setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari dan memenuhi kebutuhan pokok lainnya yang non-makanan. Ukuran inilah yang sering kita kenal dengan ukuran moneter.

Diskusi dan perdebatan tentang cukup atau tidak cukupnya penggunaan GK dalam melihat kemiskinan sudah berlangsung lama, baik di tingkat global maupun di tingkat nasional. Amartya Sen, ekonom papan atas dunia peraih penghargaan Nobel di bidang ekonomi, menegaskan bahwa penggunaan "*dollar-a-day measure*" akan menghilangkan berbagai variasi yang mempengaruhi konversi pendapatan untuk kehidupan yang lebih baik. Sen menambahkan, jika hanya fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem, kita akan kehilangan perhatian pada permasalahan sosial dasar yang tidak berhubungan langsung dengan pendapatan (*income*). Pandangan Sen ini melengkapi metodologi pengukuran kemiskinan yang dikembangkannya.

Sen memulai dengan mengajukan pertanyaan "*who is poor*" (Sen, 1976). Pertanyaan ini sangat mendasar dan perlu didefinisikan dengan hati-hati agar kita tidak keliru memandang dan mengukur kemiskinan. Sabina Alkire dan James Foster (2011) dari OPHI Universitas Oxford menambahkan bahwa pengukuran kemiskinan dapat mempengaruhi pemahaman kita tentang kemiskinan, bagaimana menganalisisnya dan bagaimana kita menyusun kebijakan penanggulangannya. Jika kita keliru, maka intervensi atau kebijakan yang diambil tentu juga akan keliru. Tentu kemiskinan akan makin sulit diatasi jika terjadi kekeliruan dalam memandang kemiskinan.



Kemudian, Alkire dan Foster (2007) mengembangkan metode penghitungan IKM (Indeks Kemiskinan Multidimensi) /MPI (*Multidimension Proverty Index*) dengan nama *the Alkire Foster (AF) method*. Metode ini mengukur kemiskinan multidimensi dengan pendekatan "melampaui" pendapatan atau konsumsi. Kemiskinan dilihat secara lebih luas yakni kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Dimensi non-pendapatan yang dikembangkan tidak tetap, namun bisa dikembangkan berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat yang ada. MPI memberikan 'jalan keluar' atas debat panjang tentang pengukuran kemiskinan. MPI sekaligus menjadi 'menu baru' bagi siapapun jika ingin melihat kemiskinan secara lebih holistik.

Mulai tahun 2010, OPHI Universitas Oxford bersama United National Development Program (UNDP) menyepakati sebuah inisiasi pengukuran kemiskinan baru dengan menggunakan MPI dan dimuat dalam *Human Development Report (HDR) 2010* untuk kali pertama. MPI dapat digunakan untuk acuan perumusan kebijakan berdasarkan dimensi dan indikator yang dikembangkan. MPI juga dapat disusun berdasarkan kewilayahan, etnis, kelompok sektoral dan lainnya, sehingga memudahkan untuk melihat komposisi kemiskinan dalam satu kelompok dan di antara kelompok-kelompok tersebut. Selain itu, MPI memudahkan untuk memantau perubahan kemiskinan dari waktu ke waktu dengan menggunakan data yang dikumpulkan dalam periode yang berbeda.

Melihat metode dan kegunaan MPI tersebut, maka memandang perlu dilakukan penghitungan. Penghitungan MPI penting dilakukan agar tidak terjadi bias potret kemiskinan. Negara harus berperan dalam perumusan strategi pengentasan kemiskinan yang tepat sesuai dengan kondisi yang dialami masyarakat. Dengan menggunakan MPI, maka kita akan mempunyai 'teropong kemiskinan' yang bisa *zoom-in* dan *zoom-out* dalam melihat dan mengukur kemiskinan. Harapannya, intervensi kebijakan atau program penanggulangan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran dan tentunya akan mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia.



Kemiskinan multidimensi bersifat holistik dan dapat menangkap berbagai macam bentuk dimensi kemiskinan yang dialami manusia. Perhitungan kemiskinan multidimensi secara sederhana dapat dikatakan sebagai berikut, bahwa seseorang dikatakan miskin multidimensi apabila mengalami deprivasi (kekurangan) indikator kemiskinan yang memang dialami secara nyata oleh dirinya, yang karena terkena kekurangan dalam berbagai hal, tidak mampu untuk mencapai hal yang bisa ia capai karena keterbatasan tersebut. Conteh, karena tidak bersekolah, seseorang hanya bisa bekerja dengan upah rendah, atau karena tidak ada listrik yang layak di daerahnya mengakibatkan tidak dapat bekerja ataupun berproduksi. Konsep ini disebut dengan konsep *capability approach* yang dikembangkan oleh Amartya Sen (1989), yang mengatakan bahwa dalam membangun manusia, yang perlu dibangun adalah kapabilitas orang tersebut.

MPI Indonesia pertama disusun oleh Prakarsa dan Ford Foundation (Budiantoro et al., 2015) untuk MPI sampai level provinsi tahun 2012-2014. Namun, sampai tahun 2021 belum dilakukan update data terbaru. BPS sebagai Official Statistics Indonesia sudah melakukan studi penghitungan MPI Indonesia sampai level provinsi tahun 2019 dan 2020. MPI juga telah diadopsi di beberapa negara di dunia, seperti Kolombia, Tiongkok, Meksiko, Bhutan, India dan Brasil. Penerapan MPI mengalami perkembangan yang cukup signifikan di sejumlah negara (Alkire et al., 2015).

Kabupaten Kayong Utara, menjadi wilayah pertama di Provinsi Kalimantan Barat yang menghadirkan penghitungan MPI sebagai dasar dari perencanaan penanggulangan kemiskinan secara holistik atau komprehensif.

#### **4.1 *Multidimension Proverty Index (MPI)***

Metode yang digunakan adalah metode Alkire-Foster. Penggunaan metode ini karena sudah banyak diadopsi banyak negara, kemudahan mencari rujukan di website resmi OPHI sebagai pemrakarsa penghitungan MPI, dan kesamaan metode dengan yang dilakukan BPS sehingga memudahkan untuk keterbandingan hasil. Data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kabupaten Kayong Utara tahun 2019 sampai 2021. Selanjutnya dilakukan analisis korelasi Pearson untuk melihat hubungan antara



angka kemiskinan multidimesi dengan angka kemiskinan moneter dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

#### 4.1.1. Landasan Teori Metode Alkire-Foster

Metode multidimensi (Alkire J., 2009) (Alkire & Foster, 2011) menggambarkan bagaimana orang miskin diidentifikasi dengan menggunakan metode dual cutoff. Ukuran kemiskinan mampu melihat ke setiap indikator dengan indek parsial yang berbeda, untuk menjawab kebutuhan kebijakan. Dekomposisi yang dihasilkan mampu menjelaskan dan memperjelas agregat tingkat kemiskinan. Dengan asumsi bahwa rentang variabel dimensi telah dipilih dan data tersedia, maka terbentuk matrik data  $Y_{(n \times d)}$  yang terdiri dari data  $n$  orang dengan jumlah indikator  $d$ .

Dalam analisis kemiskinan moneter menggunakan garis kemiskinan atau ambang batas, penduduk miskin teridentifikasi jika pengeluarannya di bawah garis kemiskinan. Dalam pengukuran kemiskinan multidimensi, di mana melibatkan beberapa variabel, maka identifikasi cutoff adalah hal yang jauh lebih rumit karena diperlukan rujukan-rujukan penggunaan nilai cutoff. Perlu adanya kesamaan persepsi antara seluruh stakeholder baik dari sisi sumber data maupun pengguna MPI untuk perencanaan pembangunan yang akan diintervensi dari hasil MPI.

##### a. *Cutoff* Deprivasi Indikator

Sebuah vektor  $z = (z_1, \dots, z_d)$  terdiri dari cutoff deprivasi untuk setiap dimensi yang digunakan untuk menentukan apakah suatu orang terdeprivasi pada suatu indikator atau tidak terdeprivasi. Jika tingkat pencapaian seseorang dalam dimensi tertentu  $j$  ( $j=1,2,\dots,d$ ) lebih kecil dari cutoff deprivasi  $z_j$ , orang tersebut dikatakan terdeprivasi dalam dimensi  $j$ ; jika level orang tersebut lebih besar dari cutoff deprivasi, orang tersebut tidak terdeprivasi dalam dimensi  $j$ .

##### b. Bobot

Sebuah vektor  $w = (w_1, \dots, w_d)$  adalah vektor bobot yang terdiri dari bobot masing-masing indikator dalam menunjukkan besarnya kepentingan indikator tersebut. Jika setiap indikator dipandang memiliki kepentingan yang sama, maka nilai  $w_j$  akan sama untuk semua  $j=1,2,\dots,d$ . Jika kepentingan masing-masing



indikator dipandang berbeda, maka akan tercermin oleh nilai  $w_j$  yang berbeda-beda. Hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan bobot adalah bobot sangat mempengaruhi seseorang teridentifikasi miskin atau tidak, karena bobot ini menentukan kontribusi relatif suatu indikator terhadap kemiskinan secara keseluruhan.

### c. **Cutoff Kemiskinan**

Vektor kolom  $c = (c_1 \dots c_n)^T$  adalah vektor kolom yang berisi jumlah deprivasi setiap orang. Misalnya,  $c_i$  adalah jumlah deprivasi yang dialami oleh orang ke- $i$ , maka dibutuhkan nilai cutoff misalnya  $k$ ,  $0 < k \leq d$  untuk menentukan apakah orang ke- $i$  tersebut diidentifikasi miskin. Jumlah deprivasi dan cutoff kemiskinan juga dapat dinyatakan dalam nilai persentase dari  $d$ .

### d. **Fungsi Identifikasi**

Fungsi identifikasi merupakan rangkuman dari semua proses sebelumnya dan menunjukkan apakah orang ke- $i$  di  $Y$  dengan cutoff deprivasi  $z$ , bobot  $w$ , dan cutoff kemiskinan  $k$  masuk kategori miskin atau tidak miskin. Jika orang tersebut miskin, fungsi identifikasi mengambil nilai satu; jika orang tersebut tidak miskin, fungsi identifikasi memiliki nilai nol. Salah satu sifat menarik yang ditunjukkan oleh pendekatan identifikasi ini adalah masih dapat diterapkan jika ada satu atau lebih indikator dengan data ordinal.

Fungsi identifikasi akan menghasilkan suatu matriks dengan ukuran yang sama dengan matrik data  $Y$  yaitu  $n \times d$ , namun isinya berupa kode satu (terdeprivasi) dan nol (tidak terdeprivasi) yang penentuannya berdasarkan nilai cutoff pada vektor  $z$ . Contoh orang ke- $i$  terdeprivasi pada indikator ke- $j$  maka sel matrik deprivasi baris ke- $i$  kolom ke- $j$  berisi satu, jika orang ke- $n$  terdeprivasi pada indikator ke- $j$  dan ke- $d$  maka sel matrik deprivasi baris ke- $n$  terisi satu pada kolom ke- $j$  dan kolom ke- $d$ .

Matrik deprivasi akan dilakukan cutoff lagi dengan cutoff kemiskinan  $k$  yang akan menghasilkan matrik sensor. Matrik sensor adalah matriks deprivasi dengan seluruh baris ke- $i$  bernilai nol jika orang ke- $i$  memiliki nilai  $c_i$  (vektor jumlah deprivasi) kurang dari nilai  $k$ . Jika nilai  $c_i$  lebih dari sama dengan  $k$  maka baris tersebut sama dengan baris pada matrik deprivasi.



**e. Agregasi**

Tahap penghitungan MPI selanjutnya adalah menghitung agregasi dari matrik sensor.  $M_0$  adalah jumlah kode satu dalam matrik sensor dibagi dengan banyaknya sel matrik sensor yaitu  $n \times d$  atau rata-rata deprivasi. Nilai  $M_0$  dapat juga didekomposisi menjadi H (Headcount ratio) dan A (Intensity);  $M_0 = HA$ . Nilai H adalah persentase penduduk miskin didapat dari jumlah orang yang memiliki nilai  $c_i$  lebih atau sama dengan k (jumlah baris matrik sensor yang selnya tidak nol semua) dibagi dengan jumlah penduduk. Jumlah deprivasi orang miskin dibagi banyaknya indikator yaitu d, akan dihitung rata-ratanya akan menghasilkan nilai A. Nilai dari  $M_0$  inilah yang disebut MPI.

**f. Variabel dan Konsep Operasional**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel yang sama dengan variabel penghitungan MPI oleh BPS karena untuk keterbandingan hasil penghitungan. Terdapat 14 variabel yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Lebih detail dimensi, variabel, konsep/definisi untuk cutoff masing-masing indikator, dan bobot baik dimensi maupun indikator seperti dalam Tabel 4.1.

**Tabel 4.1.**

Dimensi, Variabel, dan Konsep/Definisi Penghitungan MPI

Dimensi (Bobot)	Variabel	Konsep/Definisi untuk Cutoff Indikator ( $z_i$ )	Bobot Indikator ( $w_i$ )
Kesehatan (1/3)	Imunisasi Dasar	ART 12-23 bulan tanpa imunisasi dasar lengkap. Imunisasi dasar lengkap yang dicakup meliputi BCG sebanyak 1 kali, DPT sebanyak 3 kali, polio sebanyak 3 kali, Hepatitis B sebanyak 3 kali, dan campak sebanyak 1 kali.	1/9
	Gizi	Kecukupan kalori. Rata-rata konsumsi kalori per hari kurang dari 2100 Kkal.	1/9
	Akses Pelayanan Kesehatan	Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi tidak berobat jalan dengan alasan tidak punya biaya, tidak ada biaya transpor, dan tidak ada sarana transportasi	1/9
Pendidikan (1/3)	Lama Sekolah	ART 25-60 tahun tidak tamat SMP	1/6
	Partisipasi Sekolah	ART 7-18 tahun tidak/belum sekolah	1/6



Standar Hidup (1/3)	Tanpa Air minum bersih	Akses air minum layak adalah jika sumber air minum utama yang digunakan rumah tangga adalah leding, air terlindungi dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi dan mata air terlindungi. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, dan air hujan.	1/27
	Tanpa sanitasi layak	Sanitasi Layak: Safely Managed, Basic, dan share.	1/27
	Bahan bakar masak	Bahan bakar utama untuk memasak bukan Listrik, Elpiji, Gas Kota, atau Biogas	1/27
	Tanpa lantai layak	Bahan lantai bukan Marmer/granit, Keramik, Parket/vinil/karpet, Ubin/tegel/teraso, Kayu/papan, Semen/bata merah dan Luas Lantai per kapita layak $\leq 7,2m^2$	1/27
	Tanpa listrik	penerangan utama bukan listrik	1/27
	Tidak Punya aset produktif	Minaml memiliki satu barang-barang dalam rumah tangga yang mencakup tabung gas 5,5 kg atau lebih, lemari es, AC, pemanas air, telepon rumah, computer/laptop, emas/perhiasan, sepeda motor, perahu, mobil, televisi layar datar minimal 30 inch, tanah/lahan.	1/27
	Tanpa akta lahir	ART 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran	1/27
	Pekerjaan	tidak ada minimal satu ART yang bekerja atau ada yang bekerja tetapi kurang dari 20 jam seminggu	1/27
Akses Internet	tidak ada ART yang bisa mengakses internet.	1/27	

**g. Hasil dan Bahasan Indikator MPI**

Hasil penghitungan MPI, posisi Kayong Utara diantara kabupaten/kota se-Kalimantan Barat terlihat seperti pada Tabel 4.2. Kabupaten Kayong Utara kondisi kemiskinan multidimensinya masih di atas angka Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan masih banyak yang harus dikerjakan untuk mengentaskan kemiskinan multidimensi di Kabupaten Kayong Utara dibanding wilayah lain yang posisinya di bawah angka kemiskinan provinsi.



Tabel 4.2.

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2019	2020	2021
01. Sambas	0,075	0,066	0,056
02. Bengkayang	0,119	0,095	0,077
03. Landak	0,162	0,143	0,109
04. Mempawah	0,101	0,091	0,066
05. Sanggau	0,167	0,123	0,118
06. Ketapang	0,153	0,107	0,121
07. Sintang	0,168	0,173	0,160
08. Kapuas Hulu	0,144	0,120	0,095
09. Sekadau	0,181	0,153	0,161
10. Melawi	0,204	0,177	0,137
<b>11. Kayong Utara</b>	<b>0,125</b>	<b>0,110</b>	<b>0,106</b>
12. Kubu Raya	0,107	0,079	0,075
71. Kota Pontianak	0,025	0,028	0,038
72. Kota Singkawang	0,076	0,065	0,058
<b>Kalimantan Barat</b>	<b>0,121</b>	<b>0,101</b>	<b>0,093</b>

MPI Kalimantan Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021

Kabupaten Kayong Utara dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir berada di urutan 8 pada tahun 2019 menurut wilayah dengan angka kemiskinan multidimensi tertinggi, urutan 7 pada tahun 2020, dan 7 pada tahun 2021. Hal ini kemunduran jika dilihat dari urutan yang naik, karena secara rata-rata penurunan kemiskinan multidimensinya masih di bawah rata-rata kabupaten/kota lain. Namun, jika dilihat dari angka MPI selama kurun waktu 3 tahun secara konsisten turun yaitu pada level 0,125 tahun 2019, 0,110 pada tahun 2020, dan 0,106 pada tahun 2021.

**Tabel 4.3.**  
MPI Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021

Tahun	H	A	M <sub>0</sub>
2019	29,798	42,010	0,125
2020	25,880	42,418	0,110
2021	24,161	43,864	0,106



Dalam 3 tahun terakhir, kemiskinan multidimensi di Kayong Utara berangsur-angsur turun secara umum dapat dilihat dari angka MPI atau  $M_0$ , namun jika dilihat dari angka *Headcount Ratio* (H) penurunannya sudah signifikan berbeda dengan *Intensity* (A) yang penurunannya sangat kecil bahkan tahun 2021 mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa secara jumlah atau persentase penduduk miskin sudah menurun tetapi di antara penduduk miskin intensitas kemiskinan/keparahan kemiskinan cenderung tidak mengalami perubahan bahkan lebih parah.

#### h. Kontribusi Dimensi Kemiskinan Multidimensi

Angka MPI, dapat dilihat dari masing-masing dimensi yang membentuknya yaitu Kesehatan, Pendidikan, dan Standar hidup, sehingga akhirnya akan dapat ditentukan dimensi mana yang menjadi penyumbang terbesar kemiskinan multidimensi di Kayong Utara. Komposisi MPI Kabupaten Kayong Utara jika dilihat per dimensi akan terlihat bahwa bagaimana kemiskinan multidimensi Kayong Utara di setiap dimensi. Untuk H atau persentase penduduk miskin sudah turun, namun *intensity* atau keparahan dalam penduduk miskin itu sendiri masih belum konsisten turun. Intensitas keparahan masing-masing dimensi juga memiliki trend yang berbeda-beda. Secara detail keparahan dan kemiskinan multidimensi di 3 dimensi terlihat pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.4.**

MPI Kayong Utara Menurut Dimensi Tahun 2019-2021

Tahun	Kesehatan		Pendidikan		Standar Hidup		MPI	
	A	$M_0$	A	$M_0$	A	$M_0$	A	$M_0$
2019	35,271	0,105	64,670	0,193	26,089	0,078	42,010	0,125
2020	37,577	0,097	65,638	0,170	24,040	0,062	42,418	0,110
2021	36,720	0,089	72,398	0,175	22,419	0,054	43,864	0,106

Dimensi Standar Hidup sudah konsissten turun selama 3 tahun terakhir, sebaliknya dimensi pendidikan justru mengalami kenaikan, dan dimensi kesehatan tidak konsisten penurunan atau kenaikannya. Kontribusi masing-



masing dimensi dapat dilihat pada Tabel 4.5. Dimensi Pendidikan menjadi pembentuk kemiskinan multidimensi paling dominan yaitu mencapai 55,04 persen.

**Tabel 4.5.**

Kontribusi Tiap Dimensi Pembentuk MPI Kayong Utara Tahun 2019-2021

Tahun	Kesehatan	Pendidikan	Standar hidup
2019	27,99	51,31	20,70
2020	29,53	51,58	18,89
2021	27,92	55,04	17,04

#### **i. Kontribusi Per Indikator Kemiskinan Multidimensi**

Kontribusi indikator pembentuk MPI akan sangat menjelaskan bagaimana kondisi kemiskinan secara multidimensi secara detail. Penduduk dengan keadaan indikator yang di bawah *cutoff* masing-masing indikator artinya penduduk tersebut terdeprivasi di indikator tersebut. Jika total deprivasi semua indikator di atas *cutoff* untuk kriteria penduduk miskin maka penduduk tersebut tergolong miskin. MPI dapat memotret kemiskinan secara makro dan dapat mengarahkan target program secara mikro langsung ke penduduk dengan indikator yang tidak memenuhi *cutoff* masing-masing indikator.

Dari Tabel 4.6, terlihat jelas bahwa indikator Lama Sekolah untuk penduduk usia 25-60 yang tidak tamat sekolah tingkat SMP sebagai penyumbang kemiskinan multidimensi di Kayong Utara. Indikator berikutnya adalah Gizi dimana rata-rata konsumsi kalori per hari kurang dari 2100 Kkal. Indikator ketiga terbesar kontribusinya adalah Partisipasi Sekolah untuk penduduk usia 7-18 tahun tidak/belum sekolah. Dari 3 (tiga) indikator yaitu Lama Sekolah dan Partisipasi Sekolah (Dimensi Pendidikan) dan Gizi (Dimensi Kesehatan) sudah menyumbang 76,80 persen kemiskinan multidimensi di Kayong Utara tahun 2021. Pada tahun sebelumnya kontribusi 3 indikator ini masih di level 74,05 persen pada tahun 2020 dan 72,89 persen. Dari peningkatan angka kontribusi 3 indikator utama pembentuk kemiskinan multi dimensi di Kayong Utara dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan kemiskinan ada pada dimensi pendidikan dan Gizi. Beberapa



indikator dengan perbaikan dari tahun ke tahun adalah Imunisasi Dasar, Akses Pelayanan Kesehatan, Sanitasi Layak, Bahan Bakar Masak, Lantai Layak, Listrik, Akte Lahir, dan Internet. Beberapa indikator yang mengalami kenaikan kontribusi adalah Partisipasi Sekolah dan Air Minum Bersih. Sedangkan 4 indikator lainnya yaitu Gizi, Lama Sekolah, Aset Produktif, dan Pekerjaan merupakan indikator yang labil.

**Tabel 4.6.**

Kontribusi Tiap Indikator Pembentuk MPI Kayong Utara Tahun 2019-2021

Dimensi	Indikator	Tahun		
		2019	2020	2021
Kesehatan	Imunisasi Dasar	3,31	3,48	3,45
	Gizi	23,99	23,61	23,62
	Akses Pelayanan Kesehatan	0,63	0,67	0,45
Pendidikan	Lama Sekolah	37,15	37,05	38,97
	Partisipasi Sekolah	11,75	13,40	14,21
Standar Hidup	Tanpa Air minum bersih	3,63	3,63	3,69
	Tanpa sanitasi layak	4,53	4,44	4,26
	Bahan bakar masak	1,98	1,93	1,64
	Tanpa lantai layak	2,30	2,17	2,05
	Tanpa listrik	1,06	1,02	0,90
	Tidak Punya aset produktif	0,35	0,28	0,30
	Tanpa akta lahir	3,45	2,99	2,60
	Pekerjaan	0,91	0,86	0,94
	Akses Internet	4,97	4,47	2,93

Dari MPI dapat dibuat kebijakan penanggulangan sampai ke level mikro dan unik antar wilayah. Dua wilayah dengan angka MPI yang sama bisa jadi memiliki tingkat keparahan yang berbeda dengan indikator-indikator pembentuk yang berbeda, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Mengukur kemiskinan dengan MPI dapat untuk kebijakan makro karena ada angka agregasi, dan kebijakan mikro dengan kondisi



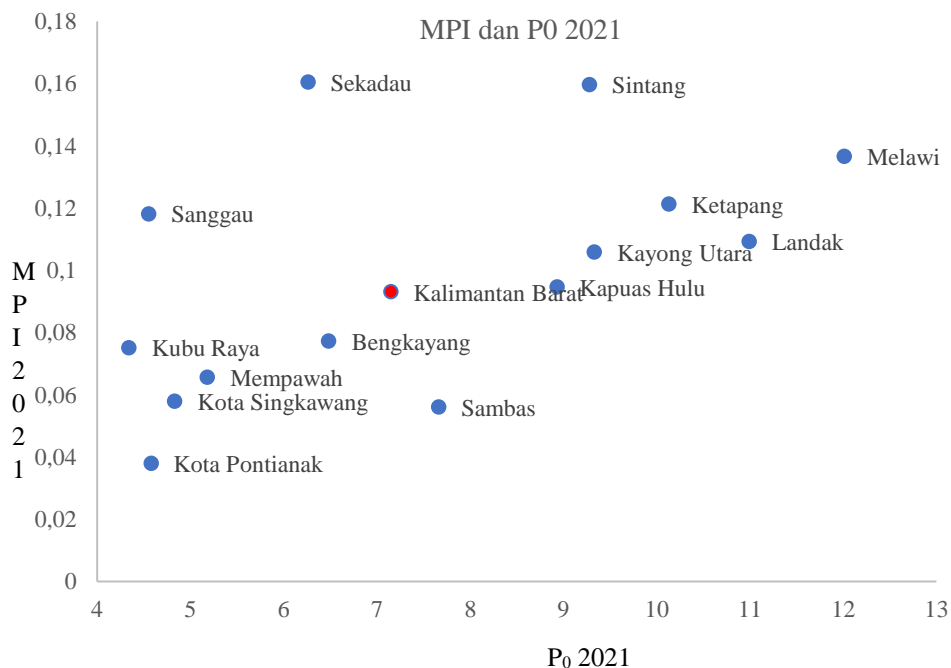
indikator-indikator yang memiliki kontribusi besar penyumbang kemiskinan makro.

**j. Perbandingan dengan Angka Kemiskinan Moneter (P0)**

Untuk menjaga agar kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan tepat sasaran, maka dibutuhkan analisis keterkaitan antara indikator kemiskinan moneter sebagai indikator resmi evaluasi tingkat kemiskinan daerah dengan alat yang digunakan sebagai dasar kebijakan. Jika membandingkan angka kemiskinan multidimensi dengan angka kemiskinan moneter secara umum, dibutuhkan rangkaian series angka kemiskinan yang panjang. Sedangkan angka MPI Kayong Utara dihitung hanya 3 tahun terakhir atau 3 titik data. Maka keterkaitan kemiskinan moneter dengan MPI dilakukan dengan data MPI kabupaten/kota seluruh Kalimantan Barat selama periode penghitungan MPI yaitu 2019-2021.

**Gambar 4.1.**

Hubungan antara Angka Kemiskinan Moneter (P<sub>0</sub>) dan Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021



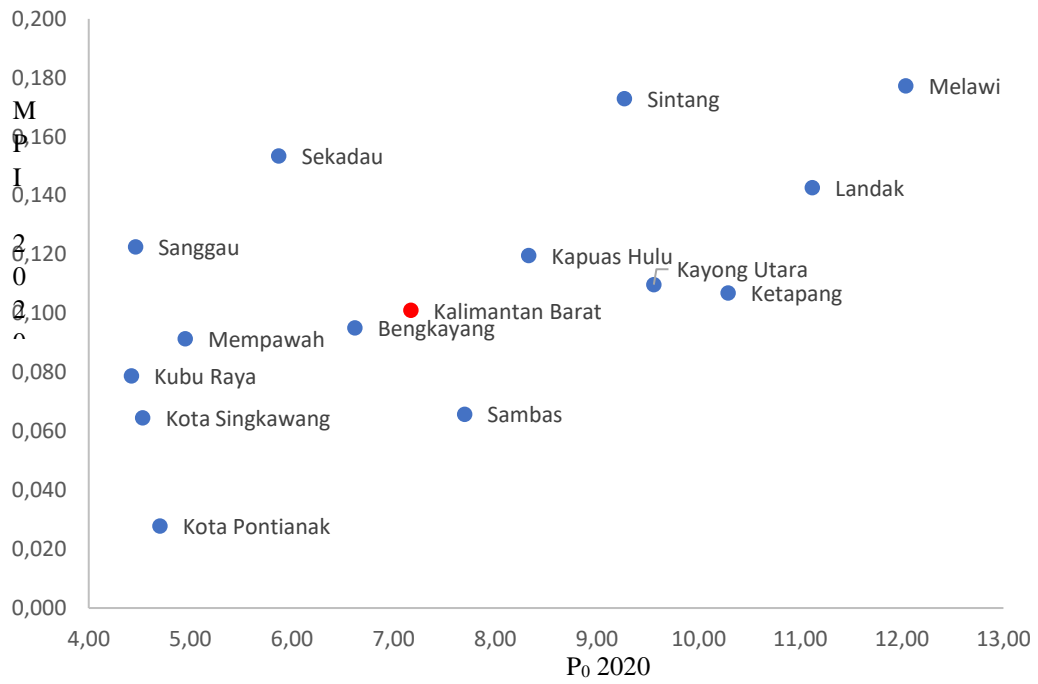
Jika membandingkan angka kemiskinan multidimensi dengan angka kemiskinan moneter pada tahun 2019 sampai 2021, secara umum, hampir semua kabupaten/kota menunjukkan fenomena yang searah yaitu semakin tinggi kemiskinan multidimensi maka semakin tinggi pula kemiskinan multidimensi.



Namun ada 3 (tiga) kabupaten yang polanya berbeda, yaitu Kabupaten Sambas, Sanggau, dan Sekadau.

**Gambar 4.2.**

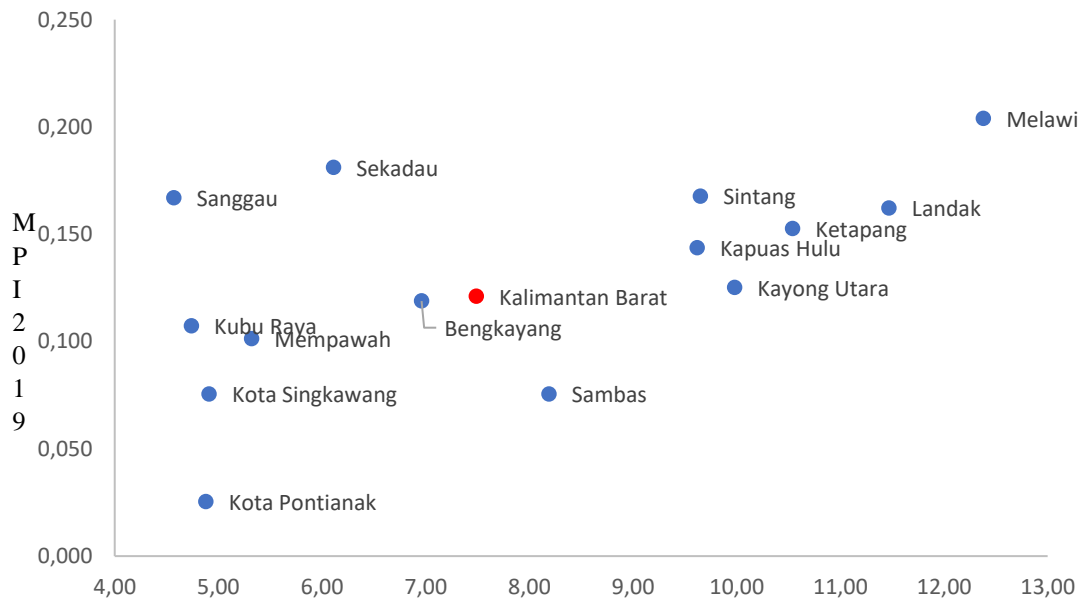
Hubungan antara Angka Kemiskinan Moneter ( $P_0$ ) dan Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020





**Gambar 4.3.**

Hubungan antara Angka Kemiskinan Moneter ( $P_0$ ) dan Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019



Untuk melihat hubungan atau keterkaitan, perlu ukuran kuantitatif sehingga dapat mengkategorikan hubungan tersebut kuat atau tidak. Ukuran korelasi Pearson dapat dilakukan untuk melihat kuat atau tidaknya hubungan antara ukuran kemiskinan moneter dan ukuran kemiskinan multidimensi. Karena ada 3 kabupaten yang tidak mengikuti pola kabupaten/kota lain di Kalimantan Barat, maka untuk melihat korelasi dua ukuran kemiskinan data 3 kabupaten yang menjadi pencilan dikeluarkan terlebih dahulu. Hasilnya seperti terlihat pada Tabel 4.7, untuk hasil penghitungan ukuran kemiskinan dua metode selama 3 tahun memiliki korelasi sebesar 85,0 persen pada tahun 2019, 82,7 persen pada tahun 2020, dan 85,2 persen pada tahun 2021 dengan tingkat keyakinan 99 persen.



**Tabel 4.7.**

Output Uji Korelasi antara MPI dengan P0  
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2021

Correlations				Correlations			
		P0_2019	H_2019			H_2020	P0_2020
P0_2019	Pearson Correlation	1	.850**	H_2020	Pearson Correlation	1	.827**
	Sig. (2-tailed)		.001		Sig. (2-tailed)		.002
	N	11	11		N	11	11
H_2019	Pearson Correlation	.850**	1	P0_2020	Pearson Correlation	.827**	1
	Sig. (2-tailed)	.001			Sig. (2-tailed)	.002	
	N	11	11		N	11	11
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).				**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).			

Correlations			
		H_2021	P0_2021
H_2021	Pearson Correlation	1	.852**
	Sig. (2-tailed)		.001
	N	11	11
P0_2021	Pearson Correlation	.852**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	
	N	11	11
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).			



#### 4.2 Pengembangan Logika Program (*Theory of Change*)

*Theory of Change* (ToC) adalah metodologi untuk menentukan *outcome* yang ingin dicapai sekaligus memproyeksikan langkah untuk mencapainya melalui intervensi program kebijakan. *Theory of Change* mendefinisikan tujuan jangka panjang atau menengah dan kemudian memetakan ke belakang untuk mengidentifikasi prasyarat yang diperlukan untuk tujuan tersebut.

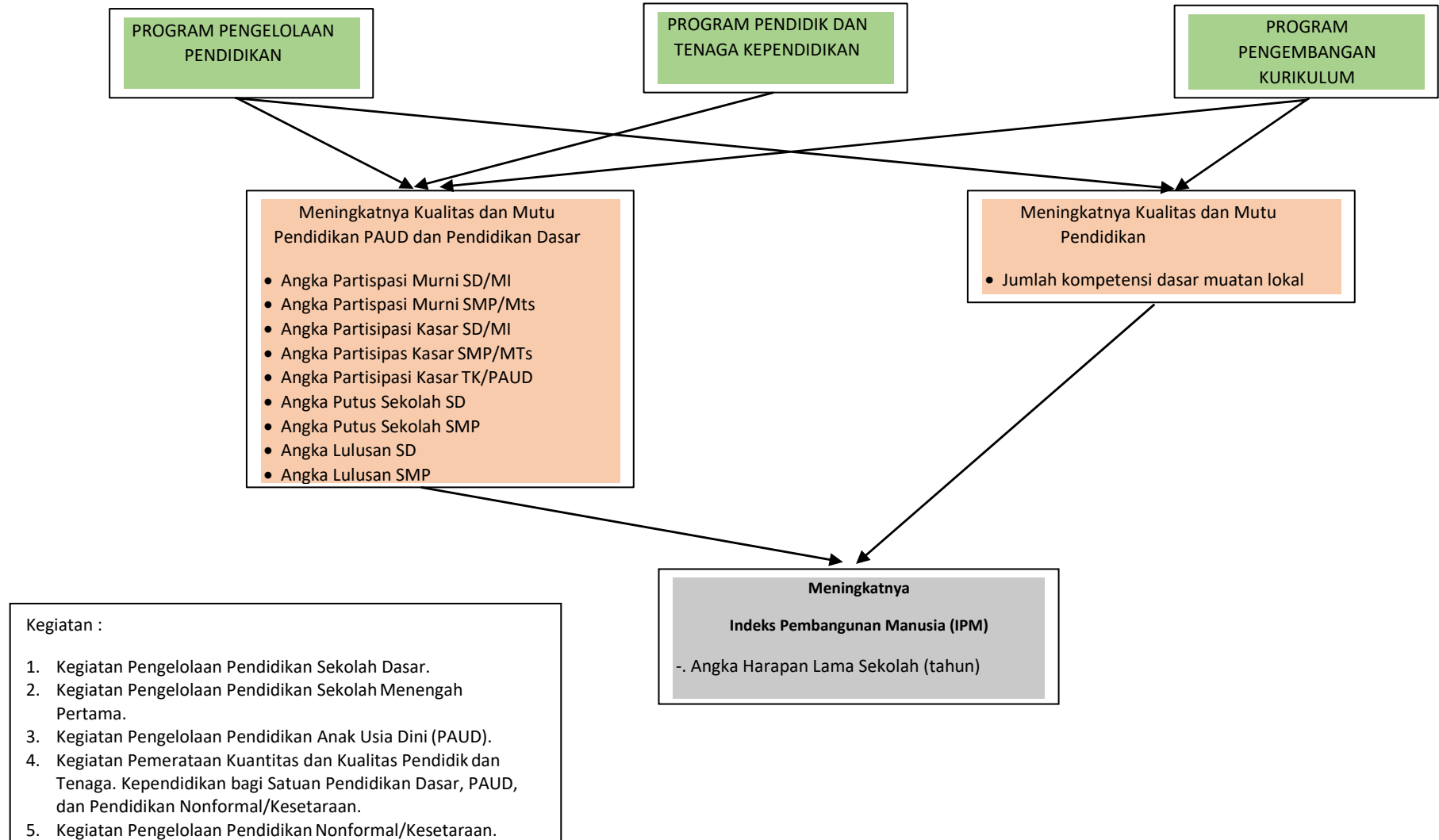
Metodologi ini digunakan sebagai persyaratan wajib dalam merancang sebuah proyek kebijakan yang efektif dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Dengan menggunakan prinsip *Theory of Change*, maka logika program akan menjelaskan mengapa sebuah program atau kebijakan diambil, dan nantinya akan bermanfaat sebagai basis untuk pemantauan dan evaluasi.

Penyusunan teori perubahan dapat diawali dengan mengumpulkan dan mengkaji ulang seluruh hasil kajian dan evaluasi yang pernah dilakukan. Kemudian dari bahan tersebut dapat diperkirakan apa yang terjadi jika intervensi dilakukan. Diharapkan setelah mengerjakan metodologi ini, maka praktisi dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang strategi dan taktik yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Berikut pengembangan beberapa Logika Program (*Theory of Change*) berdasarkan permasalahan penyebab kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara yang telah dibahas pada Bab III sebelumnya.

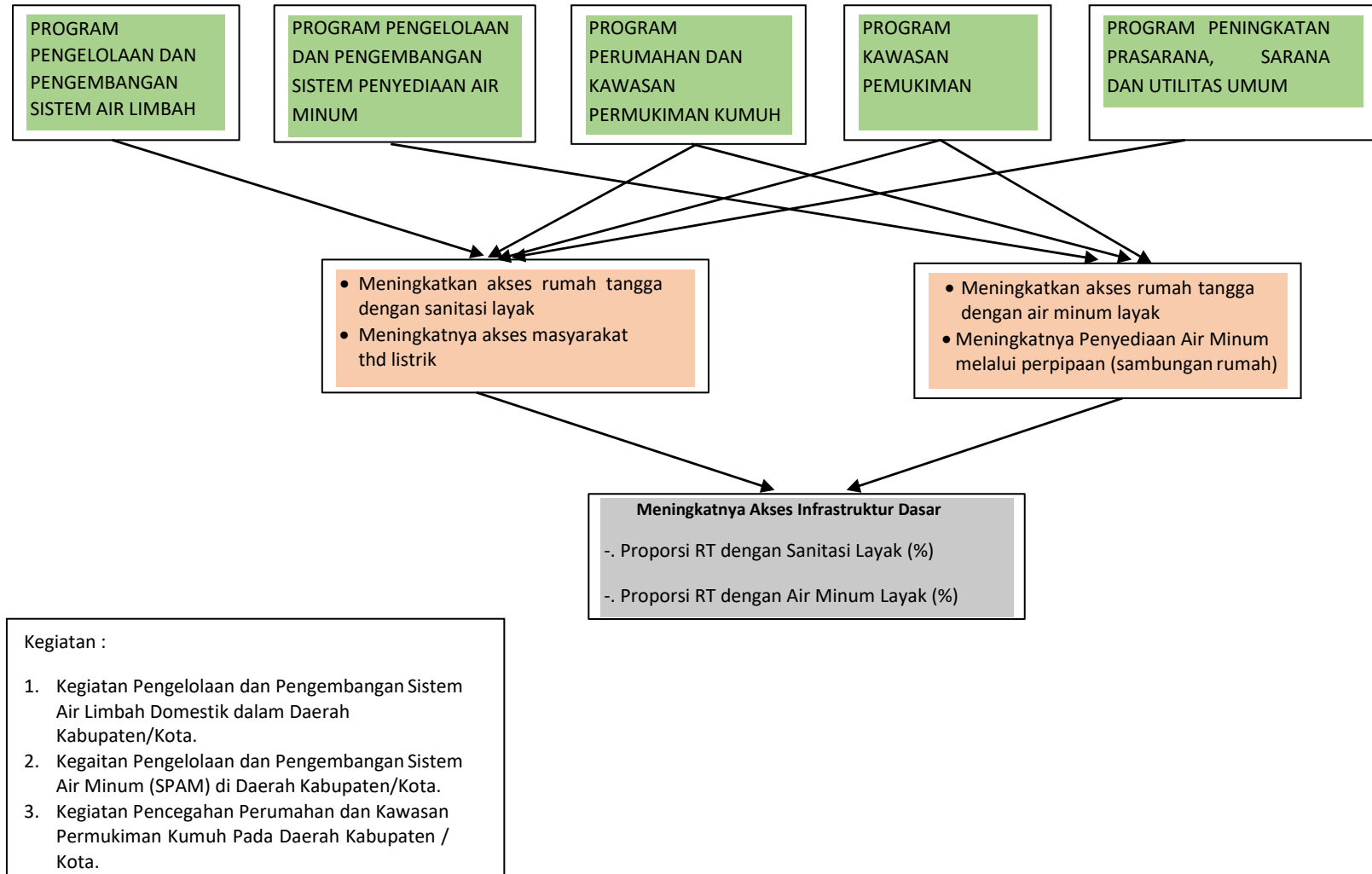
**BAB IV PRIORITAS PROGRAM**

**1. Bidang Pendidikan**



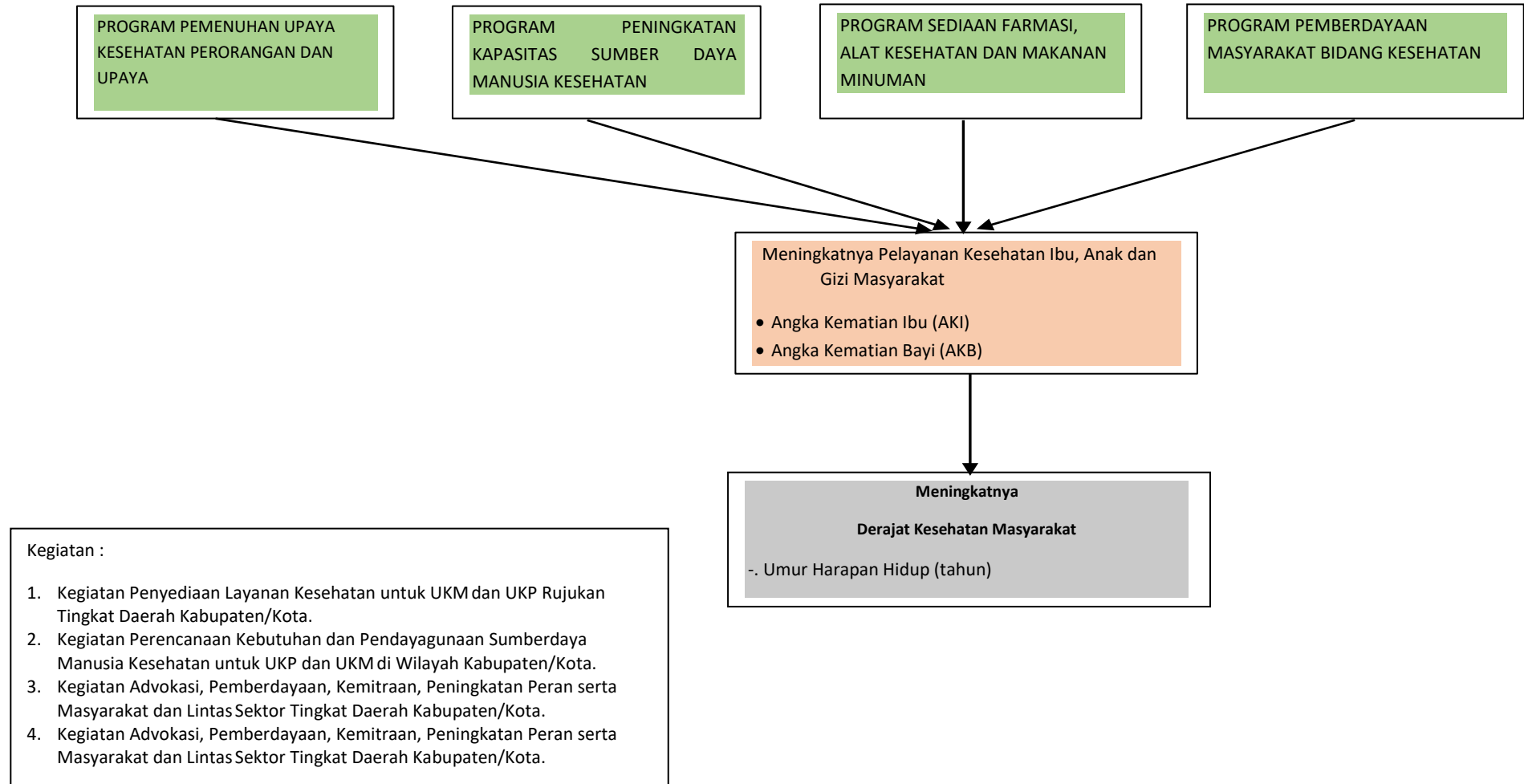
**BAB IV PRIORITAS PROGRAM**

**2. Bidang Kesehatan**



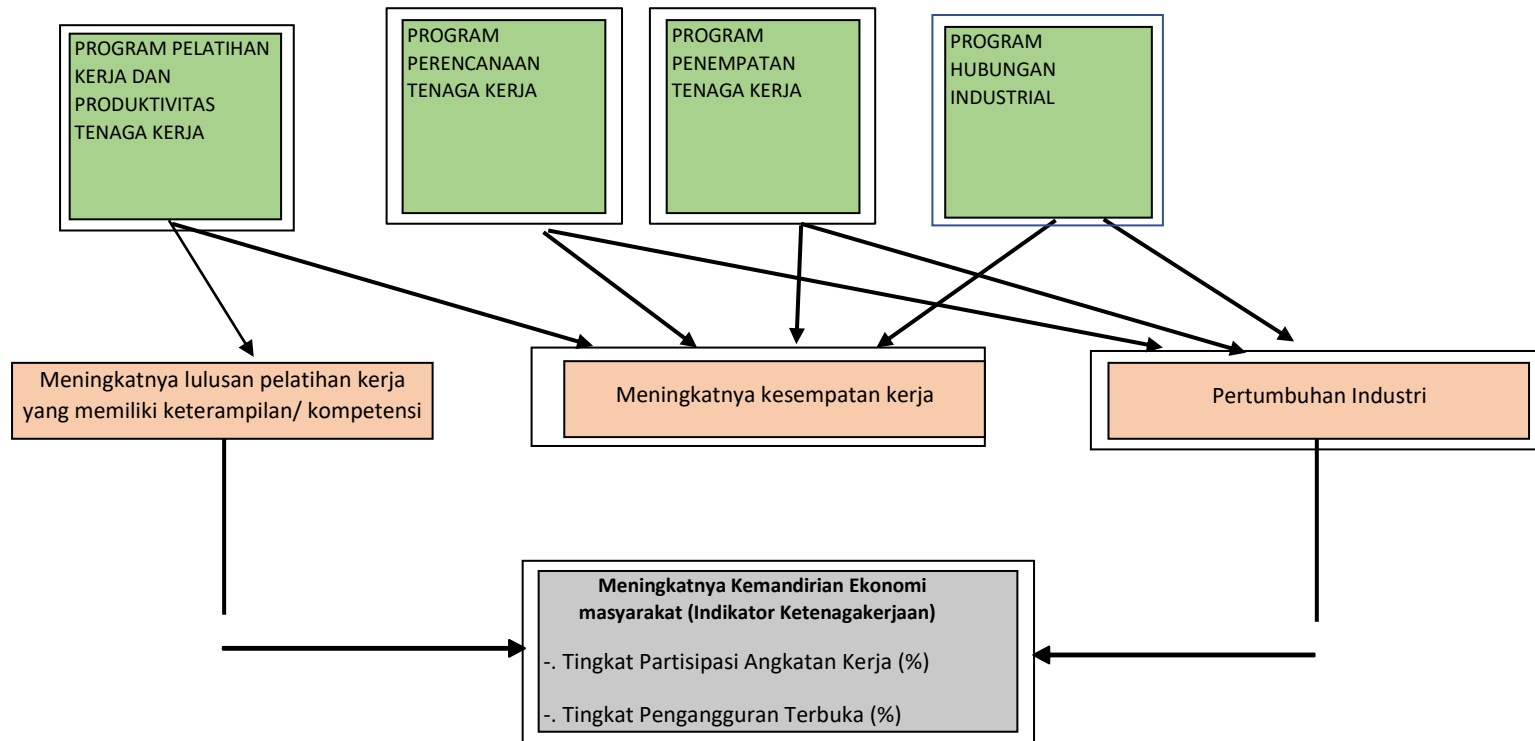
**BAB IV PRIORITAS PROGRAM**

**3. Bidang Infrastruktur Dasar**

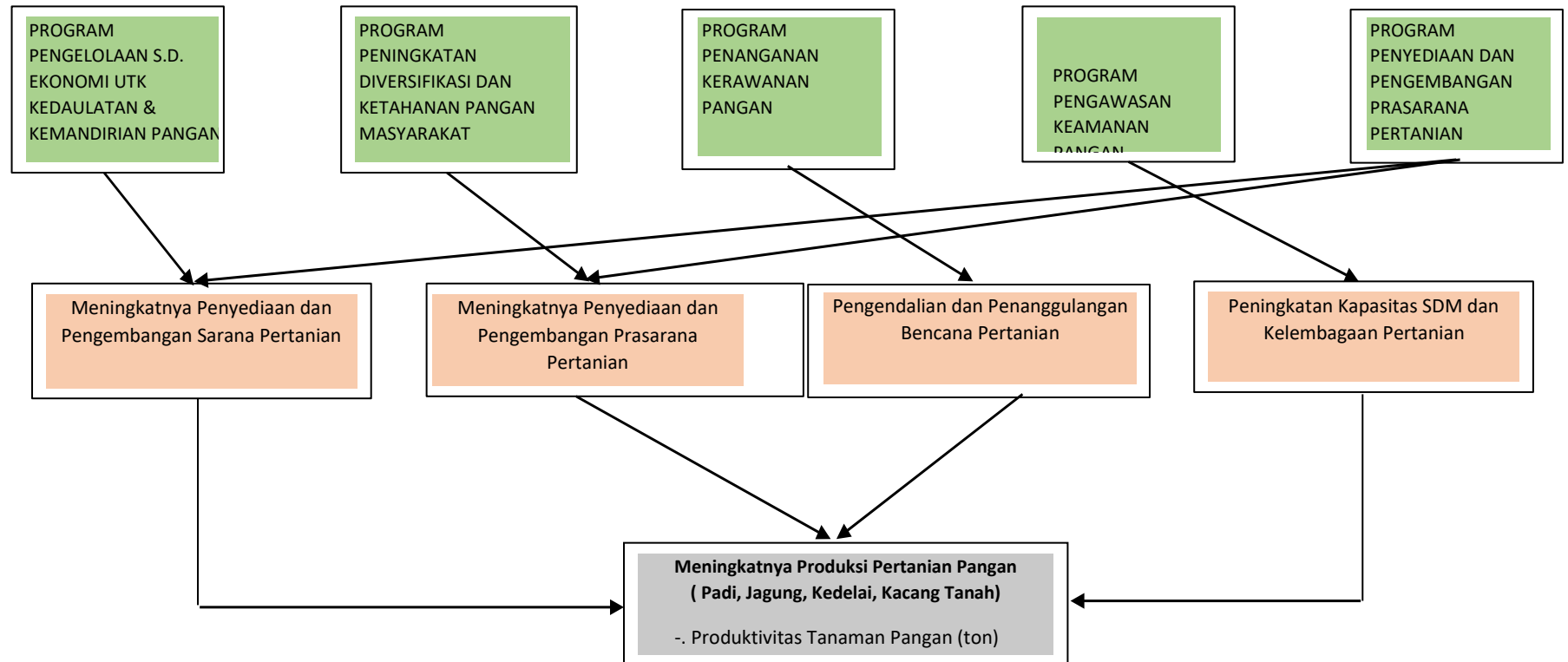


**BAB IV**    **PRIORITAS PROGRAM**

**4. Bidang Ketenagakerjaan**



## 5. Bidang Ketahanan Pangan



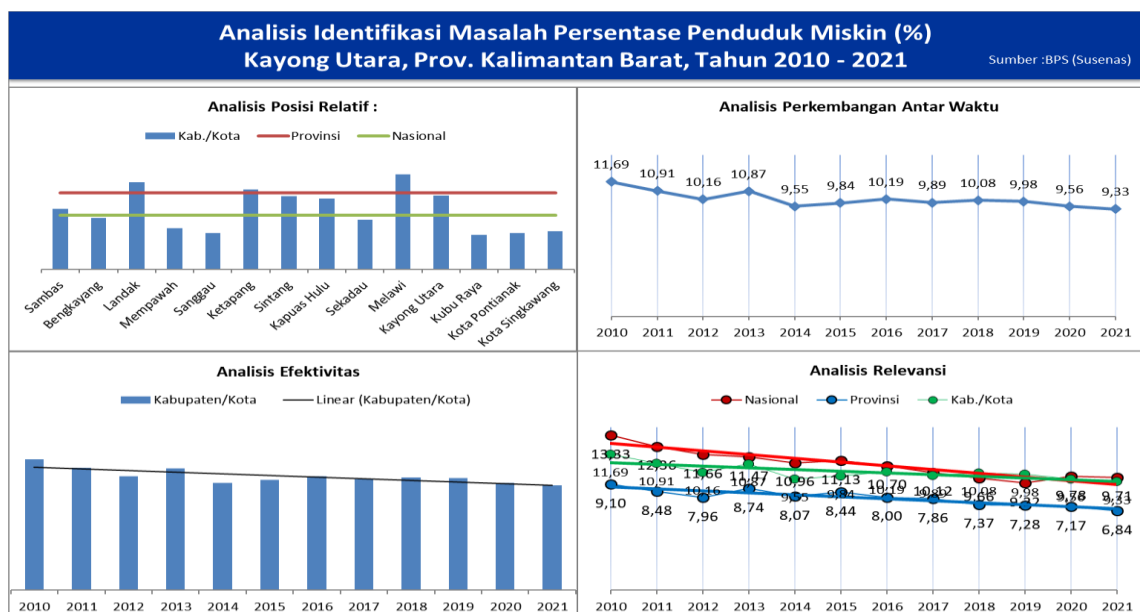


### 4.3 Analisis Keterkaitan (*Causal Relationship*)

*Causal relationship* adalah merupakan metode untuk menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan (*causes*) terjadinya suatu peristiwa atau perilaku tertentu. *Causal relationship* ini menjelaskan bahwa perubahan dapat terjadi akibat dilakukannya intervensi terhadap determinan-determinan tertentu baik disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Sebagai contoh adalah masalah kemiskinan yang menjadi salah satu permasalahan bangsa Indonesia. Atribut penyebab kemiskinan dilakukan untuk mengetahui dimensi lain yang memiliki keterkaitan dalam permasalahan kemiskinan untuk secara bersama-sama diintervensi melalui kebijakan dan rencana-rencana strategis daerah.

Berikut pengembangan beberapa hasil analisis keterkaitan (*Causal relationship*) berdasarkan permasalahan penyebab kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara yang telah dibahas sebelumnya. Pada Gambar 4.4 terlihat jika posisi relatif dari Kemiskinan Kabupaten Kayong Utara dibandingkan Provinsi Kalimantan Barat masih sangat jauh diatas angka provinsi, namun secara nasional masih dibawah angka nasional. Perkembangan antar waktu kondisi kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara sudah konsisten turun sejak 2018. Dilihat dari efektivitas penanggulangan kemiskinan justru lebih baik disaat masuk kondisi pandemi yaitu mulai tahun 2020, hal ini menjelaskan karena efek pandemi kurang dirasakan warga Kayong Utara yang mayoritas di pertanian.

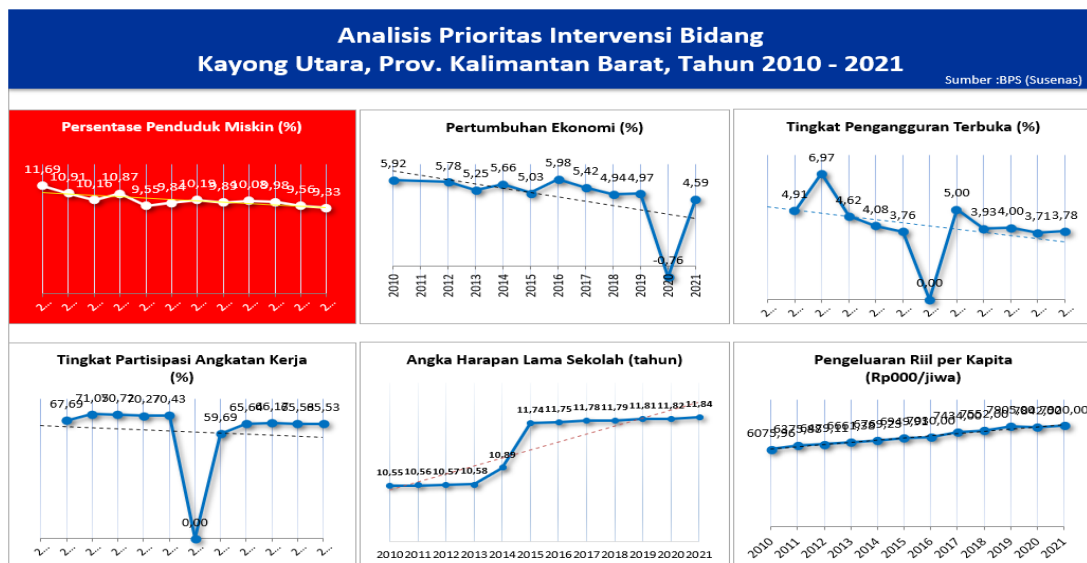
**Gambar 4.4.** Identifikasi Masalah Kemiskinan Kabupaten Kayong Utara





Gambar 4.5. - 4.7. menunjukkan relevansi antara kemiskinan dengan bidang lain yaitu ekonomi, ketenagakerjaan, pengeluaran, infrastruktur, kesehatan, dan Pendidikan. Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran secara *point to point* tidak terlihat ada hubungan dengan kemiskinan secara langsung, namun dari indikator pengeluaran per kapita yang langsung menyentuh seluruh penduduk dapat tergambar jika pertumbuhan ekonomi dapat intervensi kemiskinan. Konsep nilai tambah bruto pada pertumbuhan ekonomi memang tidak langsung ke penduduk miskin karena lebih didominasi oleh sektor-sektor dengan industri besar. Untuk ketenagakerjaan lebih terlihat hubungan kemiskinan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang apabila TPAK naik secara jangka panjang akan menurunkan kemiskinan. Karena hal ini menunjukkan pemberdayaan masyarakat secara luas dalam sektor ekonomi.

**Gambar 4.5.** Identifikasi Bidang Prioritas (Ekonomi dan Pendidikan) untuk Intervensi Kemiskinan Kabupaten Kayong Utara

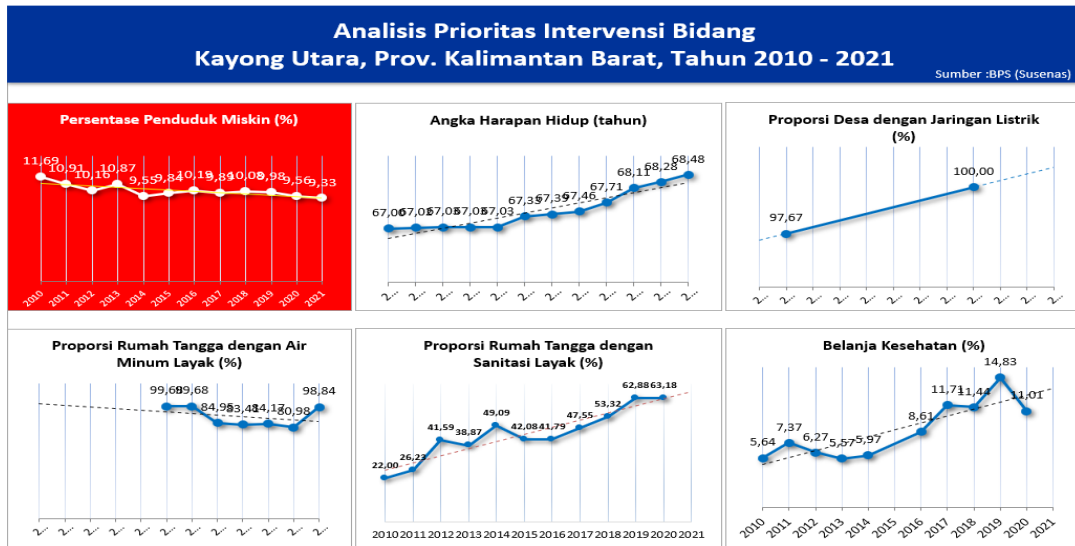


Dibidang kesehatan, mayoritas indikator kesehatan seperti Angka Harapan Hidup, Sanitasi Layak, Air minum layak, dan Belanja Kesehatan sangat dekat dengan penurunan angka kemiskinan Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan di bidang Pendidikan sudah tidak diragukan lagi relevansinya dengan kemiskinan. Lebih tajam terlihat jika intervensi ke jenjang sekolah menengah baik pertama maupun atas. Hubungan negatif lebih terlihat di jenjang sekolah menengah atas, dimana Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang ini naik akan menurunkan

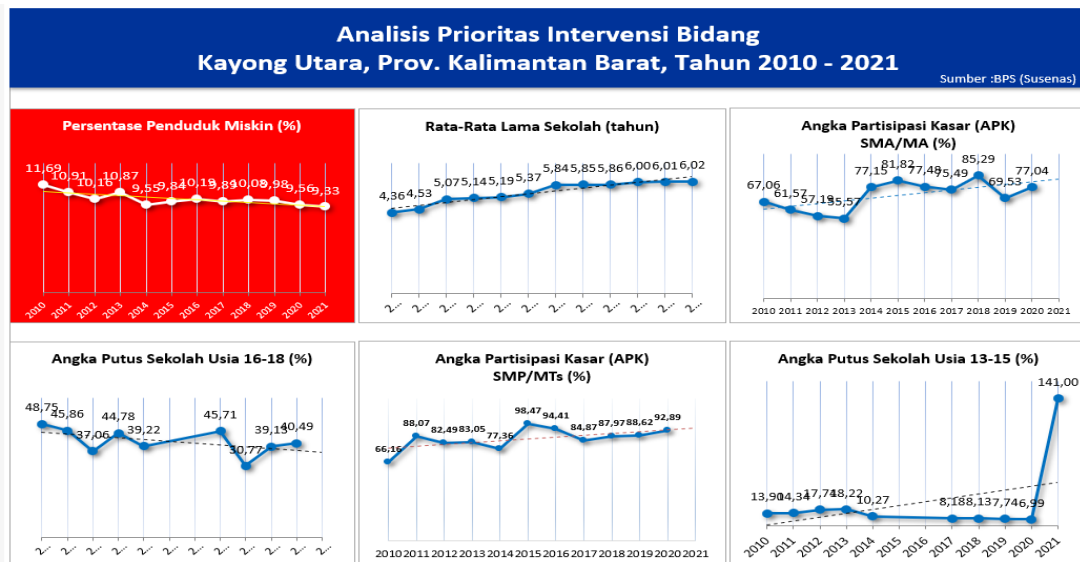


kemiskinan jika dilihat dari trend satu decade terakhir. Memprioritaskan 2 bidang yaitu kesehatan dan Pendidikan adalah pilihan yang tidak pernah salah untuk menanggulangi kemiskinan dalam jangka panjang serta sekaligus dapat meningkatkan indikator IPM Kabupaten Kayong Utara.

**Gambar 4.6.** Identifikasi Bidang Prioritas (Kesehatan) untuk Intervensi Kemiskinan Kabupaten Kayong Utara



**Gambar 4.7.** Identifikasi Bidang Prioritas (Pendidikan) untuk Intervensi Kemiskinan Kabupaten Kayong Utara





#### 4.4 Analisis Kondisi Fiskal

Analisis kondisi fiskal dalam rangka penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kayong Utara tahun 2024-2026 menggunakan data realisasi APBD Kabupaten Kayong Utara tahun 2017-2021. Data series lima tahun ini digunakan untuk menganalisis struktur APBD, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, struktur pendapatan daerah, ruang fiskal, kemandirian fiskal, dan proporsi belanja. Melalui analisis keuangan tersebut, diharapkan penyajian dan analisis keuangan daerah akan semakin akurat sehingga perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang lebih optimal dan tepat sasaran.

Berdasarkan komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu Tahun 2017-2021, selanjutnya disajikan struktur APBD selama 5 (lima) tahun terakhir berikut ini.

**Tabel 4.8**  
Struktur APBD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017–2021

No	URAIAN	REALISASI (Rp)					Rata-rata pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>785.939.457.931,89</b>	<b>756.973.306.323,63</b>	<b>777.160.669.976,99</b>	<b>740.100.381.882,45</b>	<b>858.169.992.676,28</b>	<b>2,30</b>
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	36.486.217.742,14	27.205.096.648,63	28.597.868.471,99	39.525.271.732,45	34.406.954.864,53	-1,42
1.2.	DANA PERIMBANGAN	683.887.224.744,00	636.567.121.150,00	640.182.248.144,00	584.246.231.276,00	738.537.638.633,75	2,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	65.566.015.445,75	93.201.088.525,00	108.380.553.361,00	116.328.878.874,00	85.225.399.178,00	7,50
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>792.645.448.038,48</b>	<b>734.469.665.286,29</b>	<b>750.229.553.372,77</b>	<b>756.330.493.289,00</b>	<b>822.833.298.882,00</b>	<b>0,95</b>
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	287.242.900.862,38	302.783.751.682,00	326.807.516.514,77	349.947.397.415,00	363.228.494.585,00	6,61
2.2.	BELANJA LANGSUNG	505.402.547.176,10	431.685.913.604,29	423.422.036.858,00	406.383.095.874,00	459.604.804.297,00	-2,27
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(6.705.990.106,59)</b>	<b>22.503.641.037,34</b>	<b>26.931.116.604,22</b>	<b>(16.230.111.406,55)</b>	<b>35.336.693.794,28</b>	<b>19,01</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>20.161.360.201,26</b>	<b>12.528.674.134,50</b>	<b>35.032.315.171,84</b>	<b>59.963.431.776,06</b>	<b>41.728.631.881,76</b>	<b>26,74</b>
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	22.161.360.201,26	14.528.674.134,50	35.032.315.171,84	61.963.431.776,06	43.728.631.881,76	24,33
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	--

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara 2022 (diolah). \*) data Unaudited



APBD Kabupaten Kayong Utara dari tahun ke tahun menunjukkan trend peningkatan, yakni berjumlah Rp 785,94 Milyar pada tahun 2017, dan meningkat menjadi Rp 858,17 Milyar pada tahun 2021. Meski secara keseluruhan APBD mengalami peningkatan, namun pada tahun 2017 dan tahun 2020 menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Daerah cenderung lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan Belanja Daerah. Akibatnya, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara harus menggali sumber pembiayaan untuk menutupi kekurangan pendapatan (defisit) pada tahun 2017 dan 2020 tersebut, yang sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Sebagaimana dimaklumi, kapasitas keuangan daerah terutama dari sisi penerimaan daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan. Imbas dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional dan keuangan negara berimplikasi pada besaran transfer keuangan dan dana desa (TKDD) yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2020, terutama pada komponen Dana Perimbangan yang turun sekitar Rp 55,94 Milyar; yakni dari Rp 640,18 Milyar berkurang menjadi Rp 584,24 Milyar. Berkurangnya penerimaan daerah pada tahun 2020 ini menjadikan defisit APBD tahun 2020 cenderung lebih besar dibandingkan tahun 2017.

Disamping struktur APBD, kondisi fiskal daerah juga mencermati perkembangan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah diperoleh dengan menghitung Pendapatan Daerah ditambah dengan pencairan Dana Cadangan (jika ada) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, sehingga menghasilkan total penerimaan riil kas daerah. Selanjutnya, penerimaan riil kas daerah dikurangi dengan total belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, akan menghasilkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kayong Utara selama tahun 2017-2021.

Adapun kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendukung proses pembangunan daerah Kabupaten Kayong Utara tahun 2017-2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.9**

**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun  
2017–2021 (Rupiah)**

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1. Pendapatan	785.939.457.931,89	756.973.306.323,63	777.160.669.976,99	740.100.381.882,45	858.169.992.676,28
2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	22.161.360.201,26	14.528.674.134,50	35.032.315.171,84	61.963.431.776,06	43.728.631.881,76
Total Penerimaan (1+2+3)	808.100.818.133,15	771.501.980.458,13	812.192.985.148,83	802.063.813.658,51	901.898.624.558,04
<i>Dikurangi:</i>					
Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	442.710.158.023,38	475.665.899.708,78	491.619.372.324,60	487.079.851.367,00	550.090.697.068,00
<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah</b>	<b>365.390.660.109,77</b>	<b>295.836.080.749,35</b>	<b>320.573.612.824,23</b>	<b>314.983.962.291,51</b>	<b>351.807.927.490,04</b>

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara 2022 (diolah).

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kayong Utara terutama periode tahun 2018-2021 menunjukkan trend yang relatif baik. Tahun 2018, kapasitas riil keuangan daerah mencapai Rp 295,84 Milyar dan meningkat menjadi Rp 351,81 Milyar, atau tumbuh rata-rata sebesar 4,73% per tahun selama periode tahun 2018-2021.

#### 4.5 Analisis Anggaran Pendapatan

Pendapatan Daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Kabupaten Kayong Utara dari Tahun 2017-2021 bersumber dari 11 (sebelas) sumber pendapatan. Pendapatan asli daerah bersumber dari 4 sumber pendapatan yaitu Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan dana Perimbangan bersumber dari 3 sumber pendapatan yaitu Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari Pendapatan Hibah, DBH dari Provinsi dan Pemda Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Pendapatan Daerah Kabupaten Kayong Utara tahun 2017-2021 menunjukkan peningkatan signifikan, dari Rp 785,94 Milyar tahun 2017

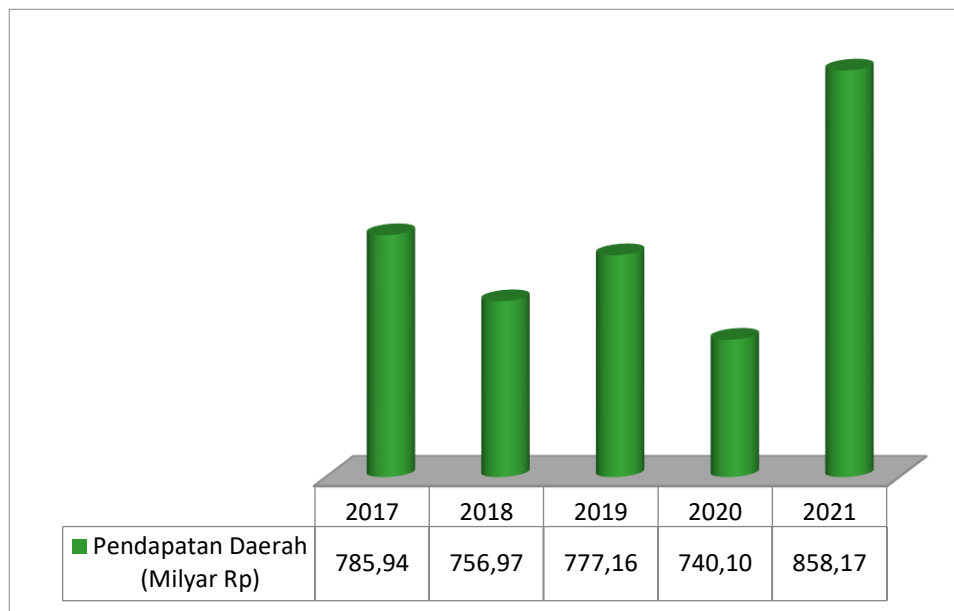


meningkat menjadi Rp 858,17 Milyar. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Kayong Utara selama 5 tahun terakhir (2017-2021) sebesar 2,30% per tahun. Pertumbuhan pendapatan daerah tertinggi terjadi pada tahun 2021, yakni sebesar 15,95%.

Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Kayong Utara selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

**Gambar 4.8**

Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021

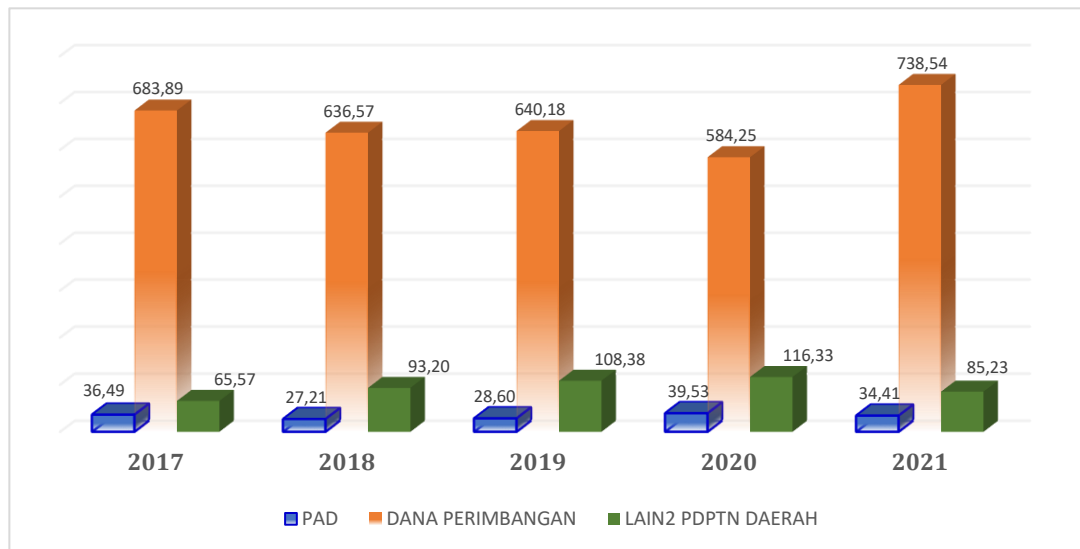


Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Kayong Utara, Tahun 2022 (diolah)

Pendapatan daerah Kabupaten Kayong Utara bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa proporsi terbesar Pendapatan Daerah berasal dari Dana Perimbangan, yakni rata-rata 83,70% per tahun. Sedangkan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 4,25% per tahun, dan proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata sebesar 12,50% per tahun.



**Gambar 4.9**  
Perkembangan Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Kayong Utara, Tahun 2022 (diolah)

Pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Penerimaan PAD rata-rata tumbuh -1,42% per tahun selama periode 2017-2021. Sedangkan pendapatan dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah cenderung meningkat. Khusus untuk Dana Perimbangan, ternyata pendapatan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) cenderung fluktuatif dan pertumbuhannya relatif melambat. Penerimaan DAU rata-rata tumbuh -1,03% per tahun selama periode 2017-2021, sedangkan penerimaan DAK rata-rata tumbuh sebesar 2,57% per tahun.

Adapun struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Kayong Utara dari Tahun 2017-2021 secara lebih lengkap disajikan berikut ini.



**Tabel 4.10**  
Pendapatan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017–2021

No	URAIAN	REALISASI (Rp)					Rata-rata pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>36.486.217.742,14</b>	<b>27.205.096.648,63</b>	<b>28.597.868.471,99</b>	<b>39.525.271.732,45</b>	<b>34.406.954.864,53</b>	<b>-1,42</b>
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	5.274.248.031,39	5.766.249.237,52	5.948.453.498,46	5.312.610.753,84	5.692.010.562,47	1,98
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	2.204.530.162,03	2.892.736.188,60	8.970.514.872,46	12.084.325.540,43	7.014.495.918,24	54,55
1.1.3.	Hasil Peng. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.124.516.243,00	2.344.706.067,00	2.139.473.842,00	2.348.155.372,00	2.349.732.007,00	2,65
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	26.882.923.305,72	16.201.405.155,51	11.539.426.259,07	19.780.180.066,18	19.350.716.376,82	-7,00
<b>1.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>683.887.224.744,00</b>	<b>636.567.121.150,00</b>	<b>640.182.248.144,00</b>	<b>584.246.231.276,00</b>	<b>738.537.638.633,75</b>	<b>2,00</b>
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	17.282.751.328,00	17.636.689.834,00	13.769.864.978,00	18.285.781.264,00	111.898.655.161,75	136,86
1.2.2.	DAU	464.063.739.000,00	472.544.021.000,00	486.572.256.000,00	447.780.169.000,00	444.906.629.000,00	-1,03
1.2.3.	DAK	202.540.734.416,00	146.386.410.316,00	139.840.127.166,00	118.180.281.012,00	181.732.354.472,00	-2,57
<b>1.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>65.566.015.445,75</b>	<b>93.201.088.525,00</b>	<b>108.380.553.361,00</b>	<b>116.328.878.874,00</b>	<b>85.225.399.178,00</b>	<b>7,50</b>
1.3.1.	Pendapatan Hibah	993.310.000,00	18.072.799.819,00	23.088.328.601,00	23.392.657.329,00	7.074.067.377,00	153,04
1.3.2.	DBH dari Provinsi dan Pemda Lainnya	38.665.294.000,00	35.271.680.706,00	37.200.339.360,00	38.286.133.406,00	21.820.342.000,00	-10,89
1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otsus						
1.3.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	25.907.411.445,75	39.856.608.000,00	48.091.885.400,00	54.650.088.139,00	56.330.989.801,00	29,36
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>785.939.457.931,89</b>	<b>756.973.306.323,63</b>	<b>777.160.669.976,99</b>	<b>740.100.381.882,45</b>	<b>858.169.992.676,28</b>	<b>2,30</b>

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Kayong Utara, Tahun 2022 (diolah)



Berdasarkan Tabel 4.10 terlihat bahwa perkembangan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dari Tahun 2017-2021 berfluktuatif, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,98% per tahun. Sebaliknya, perkembangan penerimaan Retribusi Daerah menunjukkan peningkatan signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 54,55%.

#### 4.5.1 Ruang Fiskal

Ruang Fiskal merupakan rasio yang menggambarkan besarnya pendapatan yang masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhannya. Penghitungan Ruang Fiskal diperoleh dengan mengurangi seluruh pendapatan dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) dan belanja wajib seperti belanja pegawai dan bunga.

Ruang fiskal mengindikasikan adanya tingkat keleluasaan penggunaan anggaran oleh Pemerintah Daerah setelah memenuhi semua kewajibannya. Semakin besar ruang fiskal, maka akan semakin mudah bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan bagi program dan kegiatan termasuk program-program penanggulangan kemiskinan. Perkembangan ruang fiskal Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.11**  
Perkembangan Ruang Fiskal Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PAD	36.486.217. 742,14	27.205.096. 648,63	28.597.868. 471,99	39.525.271. 732,45	34.406.954. 864,53
Dana Perimbangan	683.887.22 4.744,00	636.567.12 1.150,00	640.182.24 8.144,00	584.246.23 1.276,00	738.537.63 8.633,75
Lain-lain Pendapatan Daerah	65.566.015. 445,75	93.201.088. 525,00	108.380.55 3.361,00	116.328.87 8.874,00	85.225.399. 178,00
<b>Pendapatan</b>	<b>785.939.45</b> <b>7.931,89</b>	<b>756.973.30</b> <b>6.323,63</b>	<b>777.160.66</b> <b>9.976,99</b>	<b>740.100.38</b> <b>1.882,45</b>	<b>858.169.99</b> <b>2.676,28</b>
<i>Dikurangi:</i>					
DAK	202.540.73	146.386.41	139.840.12	118.180.28	181.732.35

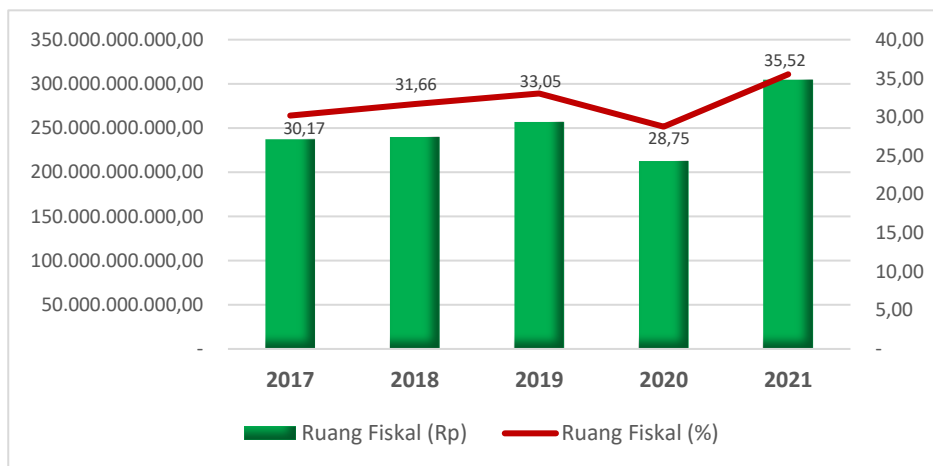


	4.416,00	0.316,00	7.166,00	1.012,00	4.472,00
Hibah	17.618.043.200,00	21.897.862.900,00	5.408.000.000,00	7.746.025.000,00	8.369.367.650,00
Belanja Mengikat	328.638.961.312,38	349.006.127.661,00	375.089.892.525,77	401.400.613.711,00	363.228.494.585,00
<b>Ruang Fiskal (Rp.)</b>	<b>237.141.719.003,51</b>	<b>239.682.905.446,63</b>	<b>256.822.650.285,22</b>	<b>212.773.462.159,45</b>	<b>304.839.775.969,28</b>
<b>Ruang Fiskal (%)</b>	<b>30,17</b>	<b>31,66</b>	<b>33,05</b>	<b>28,75</b>	<b>35,52</b>

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Kayong Utara, Tahun 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa ruang fiskal Kabupaten Kayong Utara menunjukkan trend peningkatan, kecuali pada tahun 2020. Akibat Pandemi Covid-19, ruang fiskal Kabupaten Kayong Utara mengalami penurunan pada tahun 2020 ke angka Rp. 212,77 Milyar atau 28,75%. Kondisi ruang fiskal mencapai level tertinggi pada tahun 2021 sebesar Rp. 304,84 Milyar atau 35,52%.

**Gambar 4.10**  
Ruang Fiskal Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Kayong Utara, Tahun 2022 (diolah)

Melihat perkembangan ruang fiskal yang menunjukkan perkembangan positif demikian, maka pemerintah daerah masih memiliki keleluasaan untuk merencanakan penganggaran program dan kegiatan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara.



#### 4.5.2 Derajat Otonomi Fiskal

Derajat otonomi fiskal dapat dilihat dari rasio kemandirian suatu daerah. Rasio kemandirian daerah merupakan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total pendapatan daerah. Derajat otonomi fiskal Kabupaten Kayong Utara dari Tahun 2017-2021 dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.12**  
Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PAD	36.486.217.742,14	27.205.096.648,63	28.597.868.471,99	39.525.271.732,45	34.406.954.864,53
Total Pendapatan Daerah	785.939.457.931,89	756.973.306.323,63	777.160.669.976,99	740.100.381.882,45	858.169.992.676,28
<b>Rasio Kemandirian</b>	<b>4,64</b>	<b>3,59</b>	<b>3,68</b>	<b>5,34</b>	<b>4,01</b>

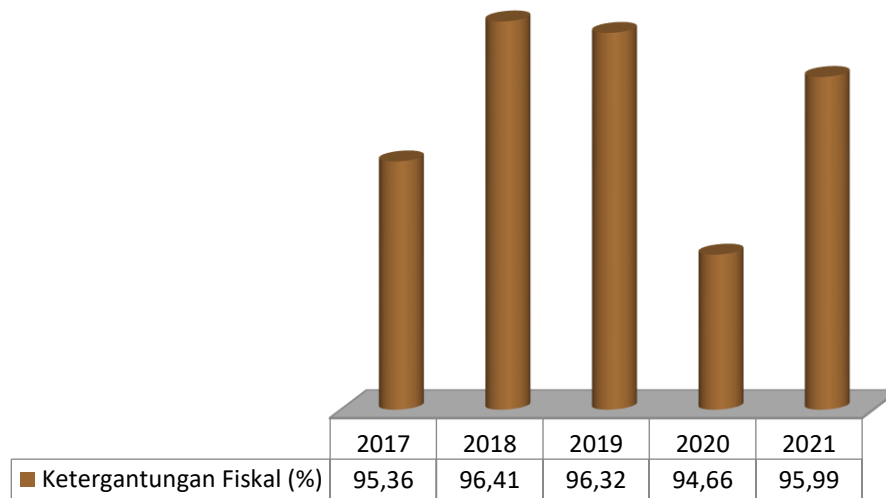
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Kayong Utara, Tahun 2022 (diolah)

Sesuai dengan hasil perhitungan indikator derajat otonomi fiskal, terlihat bahwa kemandirian daerah dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan masih terbatasnya basis pajak dan objek pajak yang dimiliki Kabupaten Kayong Utara, termasuk juga faktor rendahnya tingkat efektivitas pajak terutama di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Berdasarkan rasio kemandirian daerah, dapat diketahui seberapa besar ketergantungan daerah kepada dana perimbangan atau transfer dari pemerintah pusat, dalam rangka membiayai seluruh belanjanya, yang dituangkan dalam bentuk program-program pembangunan. Rasio ketergantungan adalah selisih dari 100% dikurangi dengan rasio kemandirian daerah.



**Gambar 4.11**  
Ketergantungan Fiskal Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Kayong Utara, Tahun 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 4.11 dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah harus terus ditingkatkan, karena berdasarkan kondisi terakhir ketergantungan daerah sampai tahun 2021 masih tinggi yaitu mencapai 95,99%. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah belum dapat secara leluasa menampung seluruh usulan program yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan masih harus menentukan skala prioritas penggunaan anggaran daerah.

## 4.6 Analisis Anggaran Belanja

### 4.6.1 Proporsi Struktur Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung

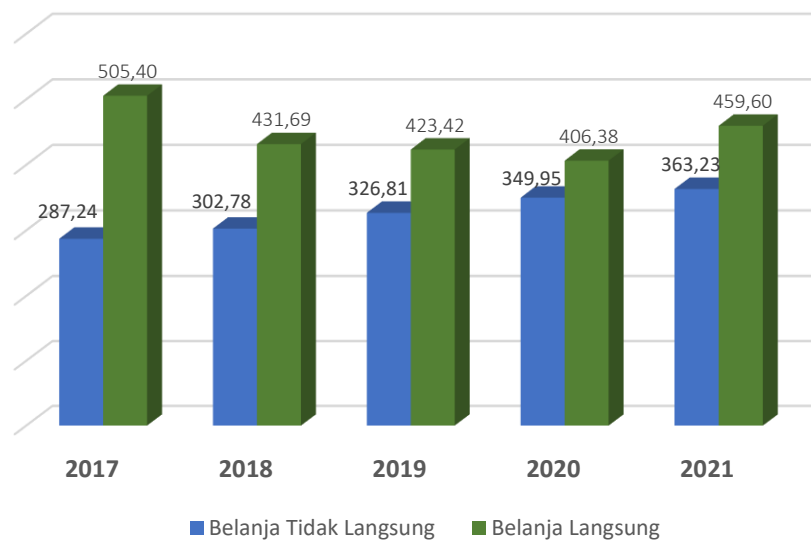
Analisis terhadap struktur anggaran belanja bermanfaat untuk melihat apakah anggaran belanja daerah telah digunakan secara efektif. Hal ini dilakukan dengan menganalisa pembagian proporsi belanja APBD antara belanja langsung dan belanja tidak langsung. Komposisi belanja langsung terhadap total Belanja Daerah di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2017-2021 relatif lebih tinggi dibandingkan belanja tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa masih kecilnya proporsi anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan daerah. Pada periode 2017-2021, belanja langsung rata-rata sebesar 56,18% per tahun, sedangkan belanja tidak langsung rata-rata sebesar 43,82%.



Komposisi belanja langsung tertinggi terjadi pada tahun 2017, dimana dari total belanja daerah yang ada, sebesar Rp 505,40 Milyar atau 63,76% dialokasikan untuk belanja langsung, sedangkan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 287,24 Milyar atau 36,24%.

Perkembangan proporsi belanja langsung dan tidak langsung di Kabupaten Kayong Utara tahun 2017-2021 dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 4.12**  
Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Kayong Utara, Tahun 2022 (diolah)

Berdasarkan rincian alokasi belanja daerah menunjukkan bahwa selama periode tahun 2017-2021, proporsi Belanja Pegawai dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Kayong Utara (Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan) yaitu rata-rata sebesar 31,99% per tahun. Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 36,36%, hal ini terjadi karena meningkatnya kebutuhan rutin.

**Tabel 4.13**

Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah  
Di Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Belanja Pegawai (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Prosentase (%)
2017	216.646.193.030,38	794.645.448.038,48	27,26%
2018	230.260.391.172,00	736.469.665.286,29	31,27%
2019	263.847.711.571,60	750.229.553.372,77	35,17%
2020	275.698.557.601,00	758.330.493.289,00	36,36%
2021	246.629.764.209,00	824.833.298.882,00	29,90%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Kayong Utara, Tahun 2022 (diolah)

Selama periode tahun 2017-2021, proporsi Belanja Barang dan Jasa dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah (Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan) rata-rata sebesar 29,10% per tahun. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan daerah melalui perangkat daerah. Proporsi Belanja Barang dan Jasa cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Proporsi realisasi Belanja Barang dan Jasa terendah terjadi pada tahun 2020, yakni sebesar 25,74%, dan tertinggi pada tahun 2021 yakni sebesar 35,37%.

**Tabel 4.14**

Proporsi Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Daerah  
Di Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Prosentase (%)
2017	205.304.697.193,00	794.645.448.038,48	25,84%
2018	217.032.625.036,78	736.469.665.286,29	29,47%
2019	218.308.502.669,00	750.229.553.372,77	29,10%
2020	195.175.254.948,00	758.330.493.289,00	25,74%
2021	291.759.151.138,00	824.833.298.882,00	35,37%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Kayong Utara, Tahun 2022 (diolah)



Selama periode tahun 2017-2021, proporsi Belanja Modal dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Kayong Utara (Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan) rata-rata sebesar 23,55% per tahun.

**Tabel 4.15**

Proporsi Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah  
Di Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Belanja Modal (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Prosentase (%)
2017	258.701.789.533,10	794.645.448.038,48	32,56%
2018	168.430.912.588,51	736.469.665.286,29	22,87%
2019	156.831.158.178,00	750.229.553.372,77	20,90%
2020	159.754.624.630,00	758.330.493.289,00	21,07%
2021	167.845.653.159,00	824.833.298.882,00	20,35%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Kayong Utara, Tahun 2022 (diolah)

Proporsi belanja modal cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2017 sebesar 32,56%, kemudian turun menjadi 20,35% pada tahun 2021.

#### 4.6.2 Relevansi dan Efektifitas APBD (Belanja Langsung) terhadap Kemiskinan

Masih banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Kayong Utara, yang pada tahun 2021 mencapai 10,72 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan mencapai 9,33%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus fokus dalam menetapkan prioritas intervensi bidang, berdasarkan hasil analisis terhadap indikator-indikator yang capaiannya masih dibawah target, dengan cara mengalokasikan anggaran belanja sektor sesuai dengan skala prioritas dengan lebih efektif dan proporsional.

Berdasarkan alokasi anggaran belanja langsung, maka perlu dianalisis efektivitas anggaran belanja langsung terhadap capaian angka kemiskinan, seperti dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.



**Tabel 4.16**  
Perkembangan Fiskal Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Daerah	785.939.457.931,89	756.973.306.323,63	777.160.669.976,99	740.100.381.882,45	858.169.992.676,28
Belanja Langsung	505.402.547.176,10	431.685.913.604,29	423.422.036.858,00	406.383.095.874,00	459.604.804.297,00
% Belanja Langsung thd Pendapatan Daerah	63,76	54,46	53,42	51,27	57,98
% Penduduk Miskin	4,64	3,59	3,68	5,34	4,01

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Kayong Utara, Tahun 2022 (diolah), BPS Kab. Kayong Utara, Tahun 2022

**Gambar 4.13**

Efektifitas Anggaran Belanja terhadap Capaian Bidang Kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Kayong Utara, Tahun 2022 (diolah), BPS Kab. Kayong Utara, Tahun 2022

Berdasarkan Gambar 4.13 dapat dilihat efektifitas anggaran belanja terhadap capaian bidang kemiskinan. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa anggaran belanja tidak secara langsung berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan daerah. Proses yang dilakukan untuk penurunan angka kemiskinan, dipengaruhi



oleh beberapa hal antara lain alokasi anggaran belanja yang tepat sasaran dan ketepatan sasaran penerima manfaat untuk penurunan kemiskinan.

Untuk mencapai angka kemiskinan yang diharapkan, maka segala bentuk usaha maksimal baik itu program/kegiatan/sub kegiatan harus benar-benar menyentuh masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan atau tepat sasaran untuk terus mempercepat penurunan angka kemiskinan.

#### **4.7 Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Intervensi**

Dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi perhatian adalah isu-isu strategis yang dianggap paling prioritas untuk ditangani sebagai hasil dari seluruh analisis program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara, Satu isu strategis dapat memuat beberapa indikator utama dalam satu bidang. Isu-isu strategis tersebut menjadi arah dari suatu hal yang akan dicapai melalui program-program secara bersama. Isu strategis dipilih dari banyak isu yang dihasilkan dari hasil analisis kemiskinan dan determinan kemiskinan pada setiap bidang, hasil evaluasi anggaran, dan kaji ulang kebijakan, yang kemudian dianalisis faktor pendorong dan penghambatnya untuk selanjutnya dapat dirumuskan isu strategisnya.

Berikut adalah analisis faktor pendorong dan penghambat program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara:

##### **4.7.1 Faktor Pendorong**

- Pemerintah memiliki kemauan politik yang kuat dan kapasitas yang cukup memadai untuk penanggulangan kemiskinan.
- Penanggulangan kemiskinan menjadi isu strategis dalam rencana pembangunan daerah di Kabupaten Kayong Utara.
- Adanya strategi, kebijakan, program aksi percepatan penanggulangan kemiskinan daerah yang efektif sehingga indikator-indikator utama kinerja penanggulangan kemiskinan menunjukkan perkembangan yang baik dalam 5 tahun terakhir.
- Adanya dukungan regulasi dari Pemerintah yang mengatur dengan jelas tentang pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.



- Adanya intervensi pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah, salah satunya kebijakan dalam penggunaan produk lokal daerah.
- Indeks Pembangunan Manusia, dengan laju kenaikan (*progress*) yang baik dan capaian yang terus meningkat.
- Harapan Lama Sekolah sudah tidak bermasalah dengan capaian yang terus meningkat.
- Proporsi rumah tangga dengan akses listrik (%) tidak bermasalah dengan capaian diatas rata-rata Provinsi Kalimantan Barat.
- Potensi peningkatan kesempatan kerja dan usaha masyarakat melalui pengembangan sektor ekonomi yang terus tumbuh dan peningkatan investasi di daerah

#### 4.7.2 Faktor Penghambat

- Jumlah penduduk miskin berdasarkan data BPS masih cukup besar yaitu 10,72 ribu jiwa atau sebesar 9,33% pada Tahun 2021.
- Rata-rata Lama Sekolah masih rendah yaitu 6,02 tahun.
- Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak masih rendah, yakni 71,34% tahun 2021.
- Tingkat Pengangguran Terbuka masih cukup tinggi yaitu 3,78% pada tahun 2021.
- Masih tingginya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.
- Masih tingginya angka *stunting*.
- Tingkat kerawanan terhadap bencana alam berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Hasil analisis terhadap berbagai faktor pendorong dan penghambat yang diidentifikasi di atas dapat dirangkum menjadi isu strategis dan permasalahan yang dialami masyarakat miskin, yang pada umumnya menunjukkan bahwa kemiskinan bersumber dari ketidakberdayaan/ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, terbatasnya akses pendidikan, belum terpenuhinya mutu pelayanan dasar, masih banyaknya daerah pesisir dan kepulauan yang sulit



terjangkau, dan kemampuan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.

Faktor lain yang menjadi penyebab kemiskinan adalah yang bersifat struktural, yaitu pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan, koordinasi antar pemangku kebijakan masih lemah, pengelolaan anggaran dan penataan kelembagaan kurang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.



## BAB V LOKASI PRIORITAS

### 5.1. Isu Strategis

Isu strategis adalah isu-isu yang dianggap prioritas untuk ditangani sebagai hasil dari seluruh analisis program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara yang telah dilakukan pada proses Analisis Perencanaan dan Penganggaran seperti yang telah dijabarkan pada Bab 3 dan Bab 4. Satu isu strategis dapat memuat beberapa indikator utama dalam satu bidang, dimana isu-isu strategis tersebut menjadi fokus yang harus dicapai melalui program-program yang telah direncanakan.

Berbagai isu strategis dan permasalahan yang dialami masyarakat miskin harus diselesaikan secara komprehensif dan simultan bukan parsial. Berikut ini isu-isu strategis dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara.

#### a. Isu Strategis Bidang Pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan dasar, melalui peningkatan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kejar paket dengan memprioritaskan pada wilayah-wilayah yang sulit terjangkau, pesisir dan terpencil.

#### b. Isu Strategis Bidang Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan dasar, melalui peningkatan sarana prasarana kesehatan untuk perluasan akses layanan dengan prioritas pada pelayanan kesehatan balita, untuk pencegahan stunting, dan balita gizi buruk.

#### c. Isu Strategis Bidang Infrastruktur Dasar

Peningkatan aksesibilitas antar wilayah, melalui peningkatan sarana prasarana jalan, sarana prasarana dasar perumahan dengan memprioritaskan pada rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat terdampak bencana.



**d. Isu Strategis Bidang Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan**

Peningkatan penyediaan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi, peningkatan keterampilan SDM, dengan memprioritaskan pertumbuhan wirausaha baru, jumlah kunjungan wisatawan dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

**e. Isu Strategis Bidang Ketahanan Pangan**

Pemanfaatan Sumber daya lokal dan peningkatan produksi pangan, melalui diversifikasi pangan, intensifikasi dan ekstensifikasi, dengan memprioritaskan daerah-daerah rawan pangan dan sentra produksi pangan.

**f. Isu Strategis Bidang Ekonomi**

Peningkatan pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan sarana prasarana pasar tradisional, industri pengolahan, dan kemudahan berinvestasi dengan memprioritaskan pada pertumbuhan yang berkualitas (*inklusif*).

Dengan memperhatikan isu-isu strategis tersebut dilakukan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah diantaranya dilakukan dengan:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui kelompok program sebagai berikut :

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.



- d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

## 5.2. Analisis Pengelompokan Wilayah Kecamatan

Untuk mendapatkan wilayah prioritas, maka dilakukan analisis grafik dengan menentukan koordinat yang dibentuk oleh pasangan indikator. Pasangan indikator yang dimaksud bisa berupa pasangan antara indikator utama vs indikator utama maupun pasangan indikator utama vs indikator pendukung, dimana masing-masing indikator diletakkan pada sumbu x (horizontal) dan sumbu y (vertikal). Kemudian dari hasil capaian indikator, didapat titik-titik wilayah yang terpisah dalam empat kuadran. Masing-masing kuadran mewakili urutan prioritas kelompok wilayah intervensi terhadap indikator kemiskinan yang bersangkutan sekaligus memberikan informasi lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan.

Analisis Kuadran level Kecamatan dapat diambil dari hasil penghitungan pada menu analisis kuadran di <https://p3ke.kemenkopmk.go.id/klp-prv.php>. Data yang digunakan untuk analisis kuadran adalah:

1. Data P3KE 2021: Data jumlah penduduk yang termasuk dalam desil 1
2. Data Potensi Desa (PODES): Indeks Kesulitan Geografis (IKG) untuk faktor non-ekonomi, Indeks Dimensi Pelayanan Dasar, dll

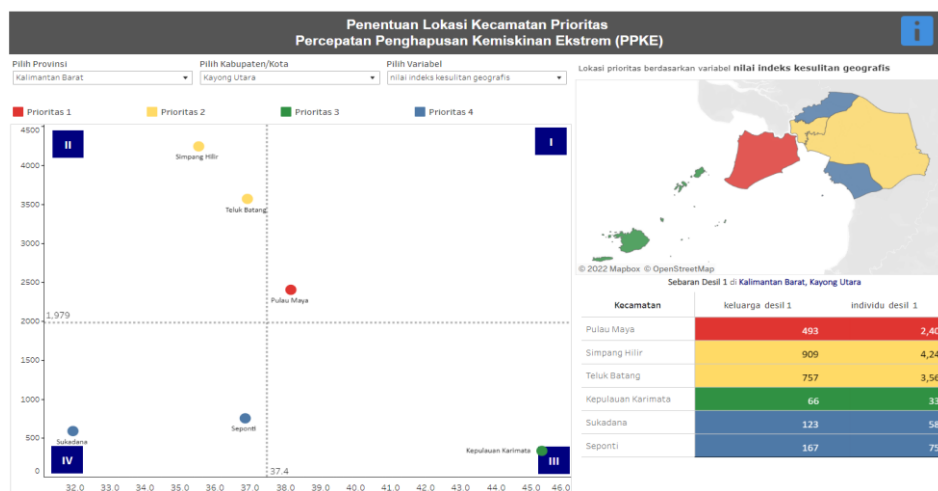
Nilai rata-rata masing-masing variabel untuk menentukan batas-batas kuadran sehingga didapat prioritas sebagai berikut:

1. Kuadran I adalah prioritas pertama karena jumlah penduduk desil 1 dan IKG berada di atas rata-rata kedua variabel tersebut.
2. Kuadran II adalah prioritas kedua karena jumlah penduduk desil 1 lebih tinggi dari rata-ratanya dan IKG berada di bawah rata-rata IKG.
3. Kuadran III adalah prioritas ketiga karena jumlah penduduk desil 1 lebih rendah dari rata-ratanya dan IKG lebih tinggi dari rata-rata IKG.
4. Kuadran IV adalah prioritas keempat karena jumlah penduduk desil 1 dan

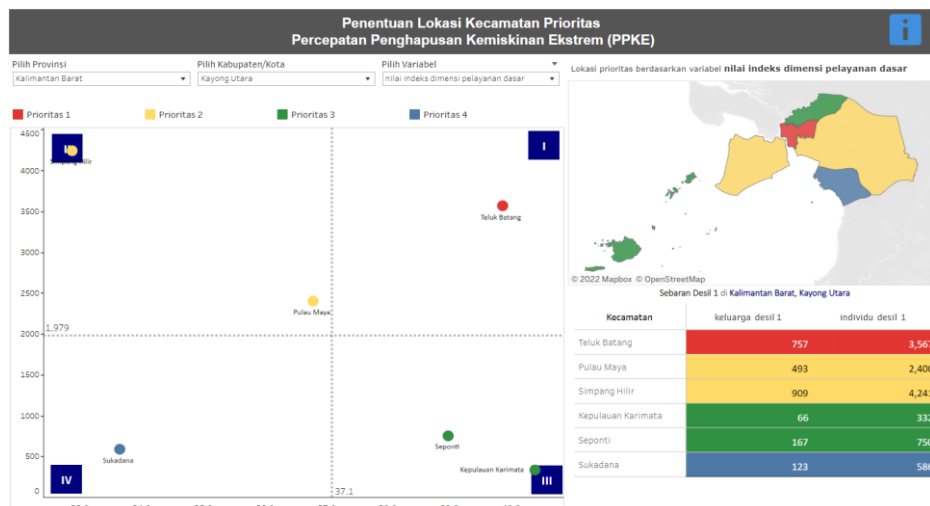


IKG berada di bawah rata-rata kedua variabel tersebut.

Untuk mempermudah melihat perbedaan antar kuadran, diberikan warna-warna pada peta kecamatan, titik kecamatan di kuadran dan tabel data penduduk desil 1. Warna merah untuk prioritas pertama, warna kuning untuk prioritas kedua, warna hijau untuk prioritas ketiga dan warna biru untuk prioritas terakhir atau keempat. Berikut ini beberapa analisis kuadran Penentuan Lokasi Kecamatan Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kayong Utara :



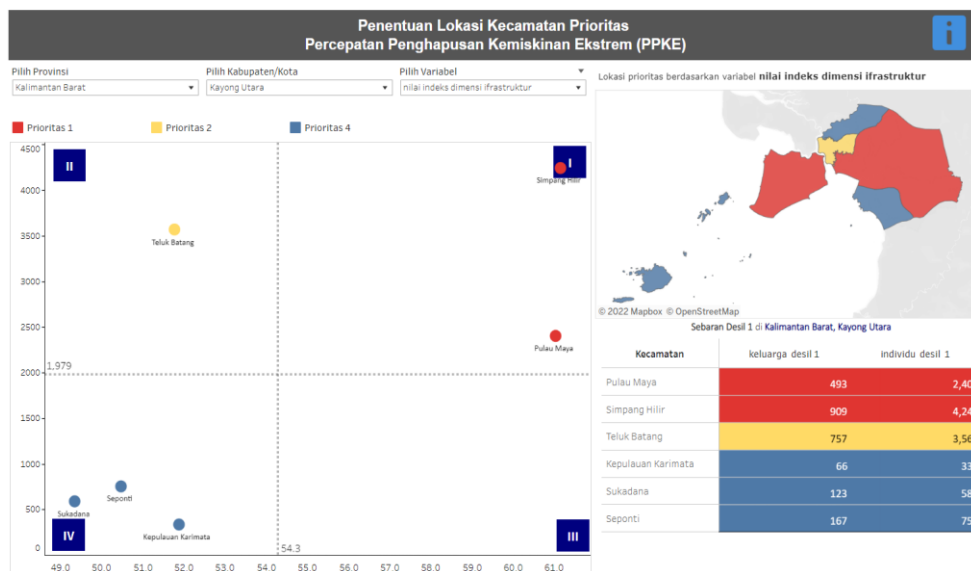
**Gambar 5.1.** Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara



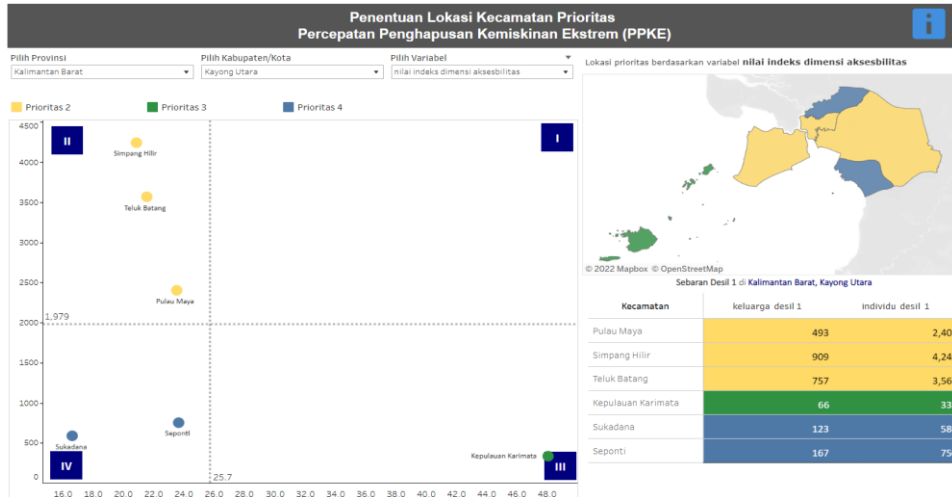
**Gambar 5.2.** Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap Indeks Dimensi Pelayanan Dasar Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara



1. Jumlah penduduk desil 1 (10 persen terbawah) berdasarkan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) menghasilkan Kecamatan Pulau Maya sebagai wilayah prioritas pertama, Kecamatan Simpang Hilir dan Teluk Batang prioritas kedua, Kecamatan Kepulauan Karimata prioritas ketiga dan Kecamatan Seponti dan Sukadana prioritas terakhir. (Gambar 5.1)
2. Jumlah penduduk desil 1 (10 persen terbawah) berdasarkan Indeks Dimensi Pelayanan Dasar menghasilkan Kecamatan Teluk Batang sebagai wilayah prioritas pertama, Kecamatan Simpang Hilir dan Pulau Maya prioritas kedua, Kecamatan Seponti dan Kepulauan Karimata prioritas ketiga dan Kecamatan Sukadana prioritas terakhir. (Gambar 5.2)

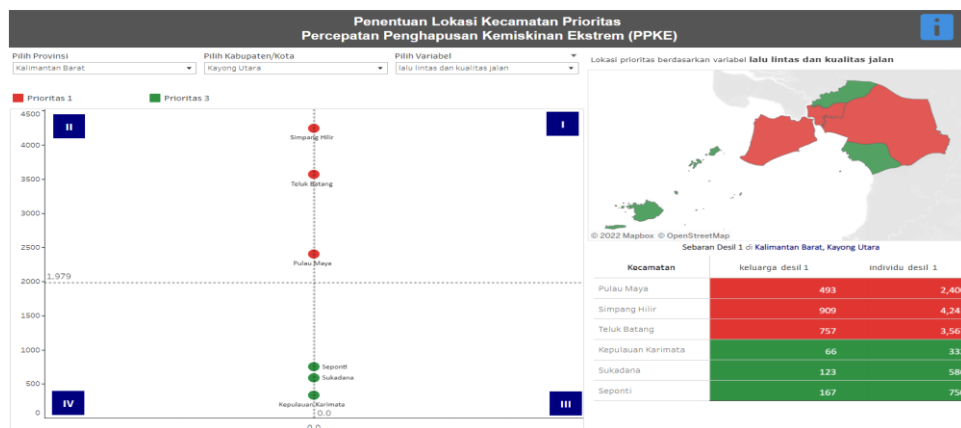


**Gambar 5.3.** Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap Indeks Dimensi Infrastruktur Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara



**Gambar 5.4.** Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap Indeks Dimensi Aksesibilitas Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara

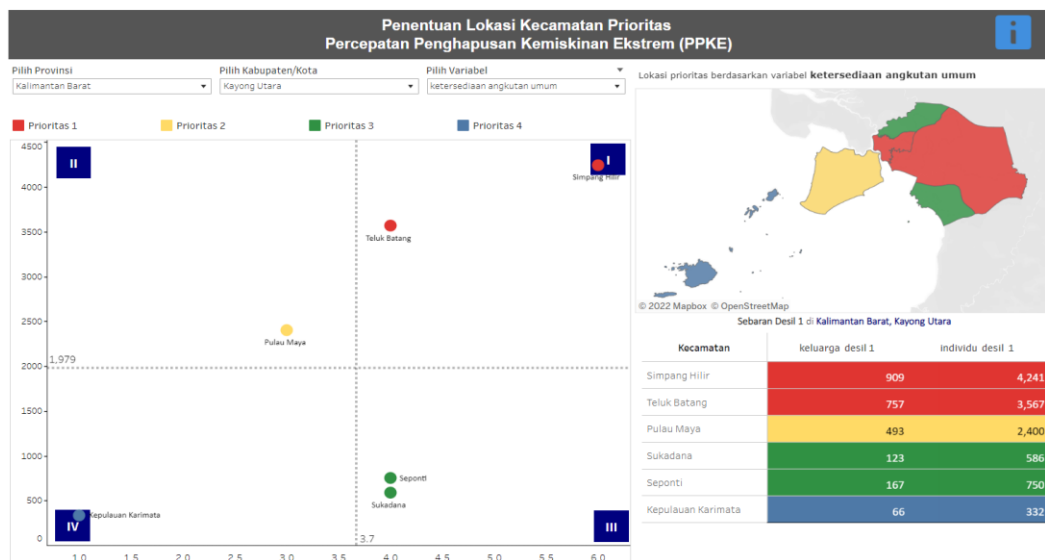
3. Jumlah penduduk desil 1 (10 persen terbawah) berdasarkan Indeks Dimensi Infrastruktur menghasilkan Kecamatan Simbang Hilir dan Pulau Maya sebagai wilayah prioritas pertama, Kecamatan Teluk Batang prioritas kedua, dan Kecamatan Sukadana, Seponti, dan Kepulauan Karimata prioritas terakhir. (Gambar 5.3)
4. Jumlah penduduk desil 1 (10 persen terbawah) berdasarkan Indeks Dimensi Aksesibilitas menghasilkan Kecamatan Simbang Hilir, Teluk Batang, dan Pulau Maya sebagai wilayah prioritas kedua, Kecamatan Kepulauan Karimata prioritas ketiga, dan Kecamatan Sukadana dan Seponti prioritas terakhir. (Gambar 5.4)



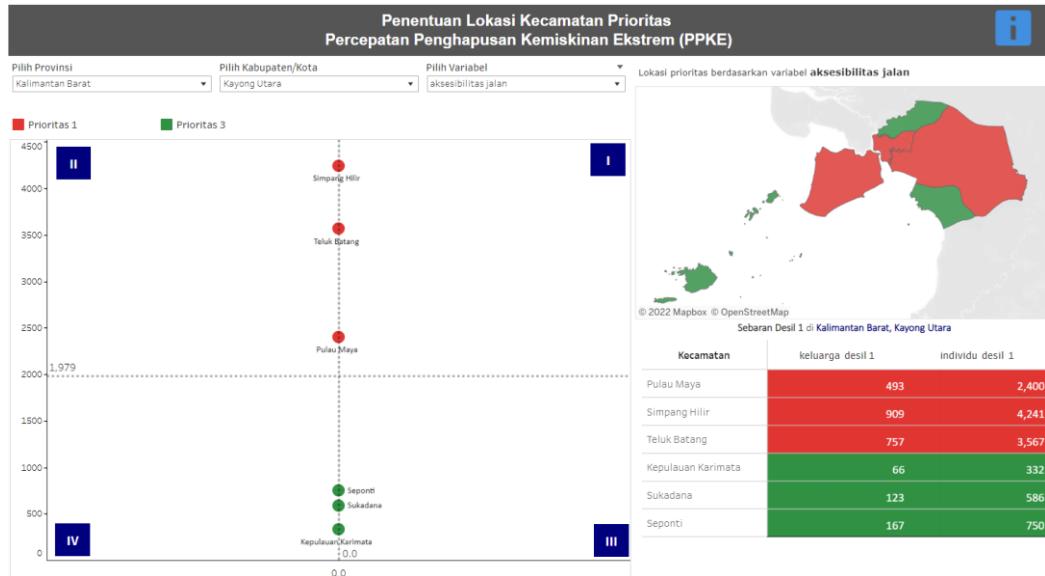
**Gambar 5.5.** Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Kualitas Jalan Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara



5. Jumlah penduduk desil 1 (10 persen terbawah) berdasarkan variabel Lalu Lintas dan Kualitas Jalan menghasilkan Kecamatan Simpang Hilir, Teluk Batang, dan Pulau Maya sebagai wilayah prioritas pertama, Kecamatan Kepulauan Karimata, Sukadana, dan Seponti prioritas ketiga. (Gambar 5.5)
6. Jumlah penduduk desil 1 (10 persen terbawah) berdasarkan variabel Ketersediaan Angkutan Umum menghasilkan Kecamatan Simpang Hilir dan Teluk Batang sebagai wilayah prioritas pertama, Kecamatan Pulau Maya prioritas kedua, Kecamatan Sukadana dan Seponti prioritas ketiga, dan Kecamatan Kepulauan Karimata prioritas terakhir. (Gambar 5.6)

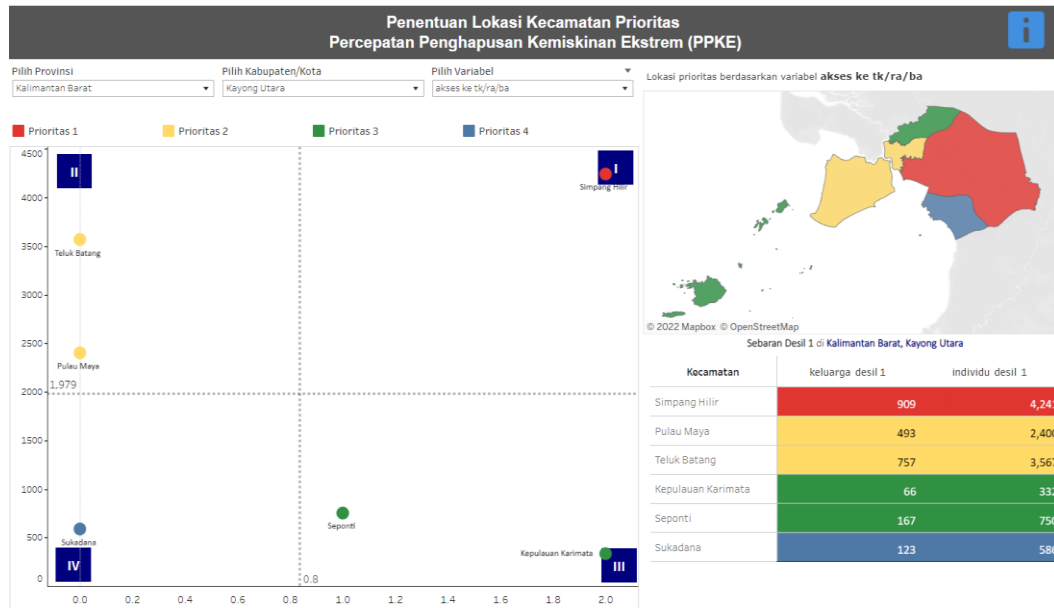


**Gambar 5.6.** Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Ketersediaan Angkutan Umum Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara

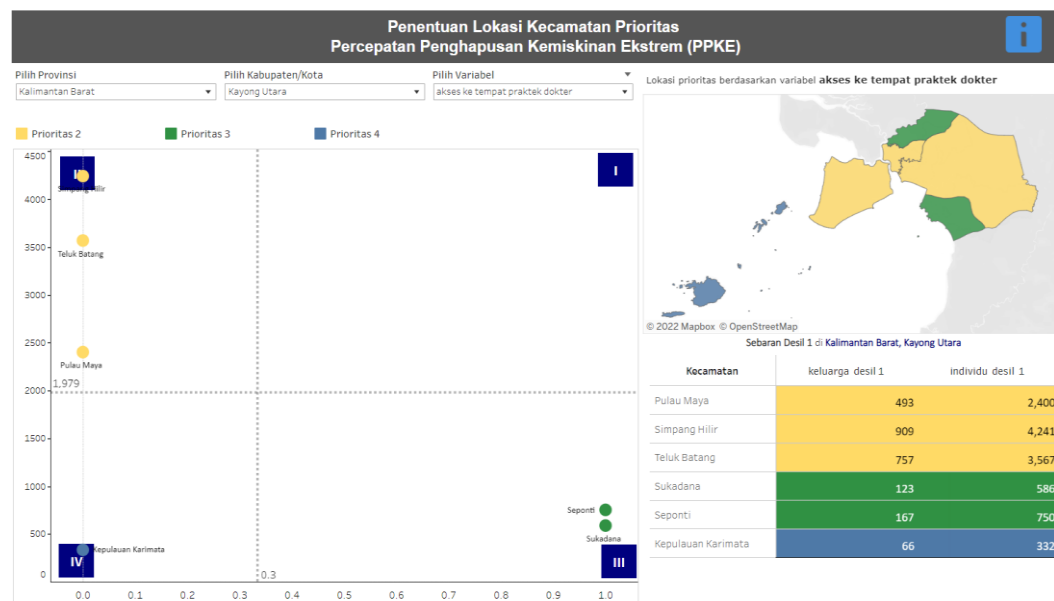


**Gambar 5.7.** Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Aksesibilitas Jalan Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara

7. Jumlah penduduk desil 1 (10 persen terbawah) berdasarkan variabel Aksesibilitas Jalan menghasilkan Kecamatan Simbang Hilir, Teluk Batang, dan Pulau Maya sebagai wilayah prioritas pertama, Kecamatan Kepulauan Karimata, Sukadana, dan Seponti prioritas ketiga. (Gambar 5.7)
8. Jumlah penduduk desil 1 (10 persen terbawah) berdasarkan variabel Akses ke TK/RA/BA menghasilkan Kecamatan Simbang Hilir menjadi wilayah prioritas pertama, Kecamatan Teluk Batang dan Pulau Maya sebagai wilayah prioritas kedua, Kecamatan Kepulauan Karimata dan Seponti prioritas ketiga, Kecamatan, Sukadana prioritas terakhir (Gambar 5.8)



**Gambar 5.8.** Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke TK/RA/BA Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara

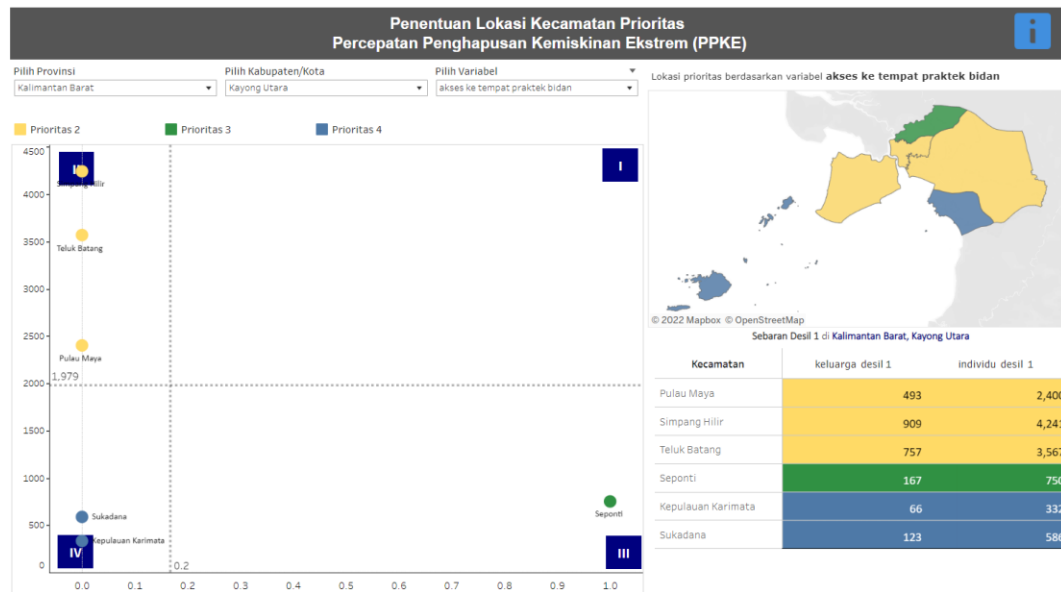


**Gambar 5.9.** Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke Tempat Praktek Dokter Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara

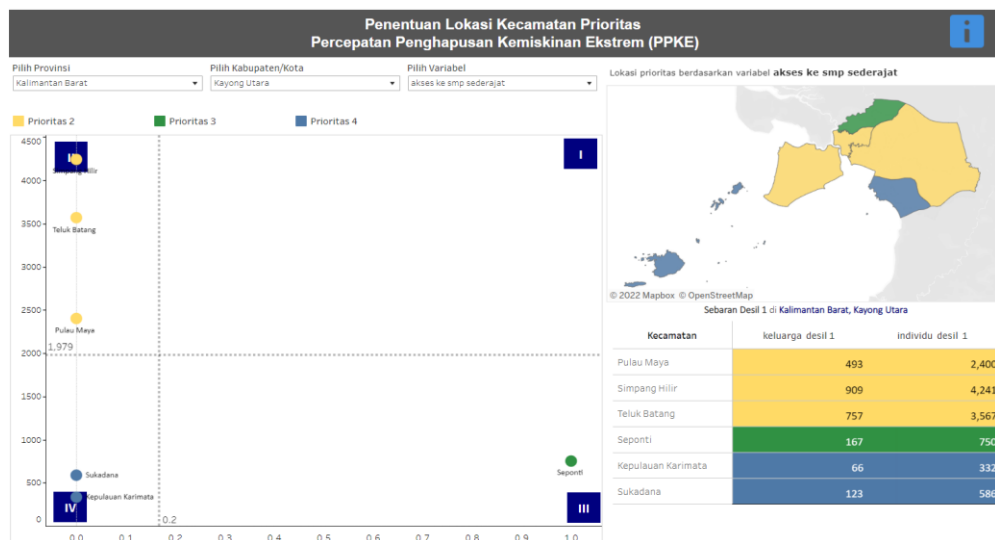
- Jumlah penduduk desil 1 (10 persen terbawah) berdasarkan variabel Akses ke Tempat Praktek Dokter menghasilkan Kecamatan Simpang Hilir, Teluk Batang dan Pulau Maya sebagai wilayah prioritas kedua, Kecamatan



- Kepulauan Karimata, Seponti, dan Sukadana prioritas ketiga. (Gambar 5.9)
- Jumlah penduduk desil 1 (10 persen terbawah) berdasarkan variabel Akses ke Tempat Praktek Bidan menghasilkan Kecamatan Simpang Hilir, Teluk Batang dan Pulau Maya sebagai wilayah prioritas kedua, Kecamatan Seponti prioritas ketiga. Kecamatan Kepulauan Karimata dan Sukadana prioritas terakhir. (Gambar 5.10)



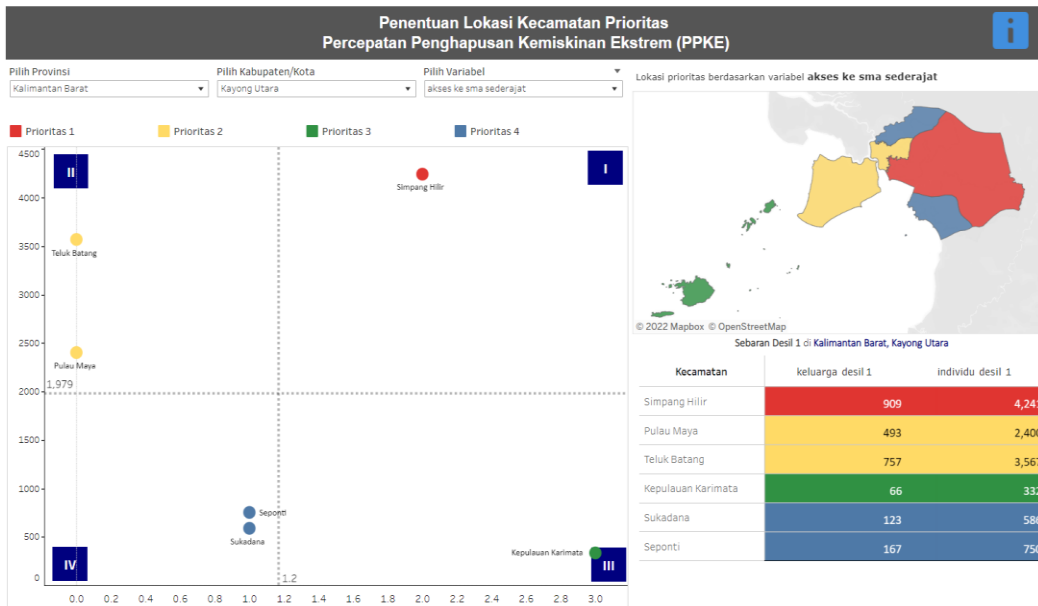
**Gambar 5.10.** Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke Tempat Praktek Bidan Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara



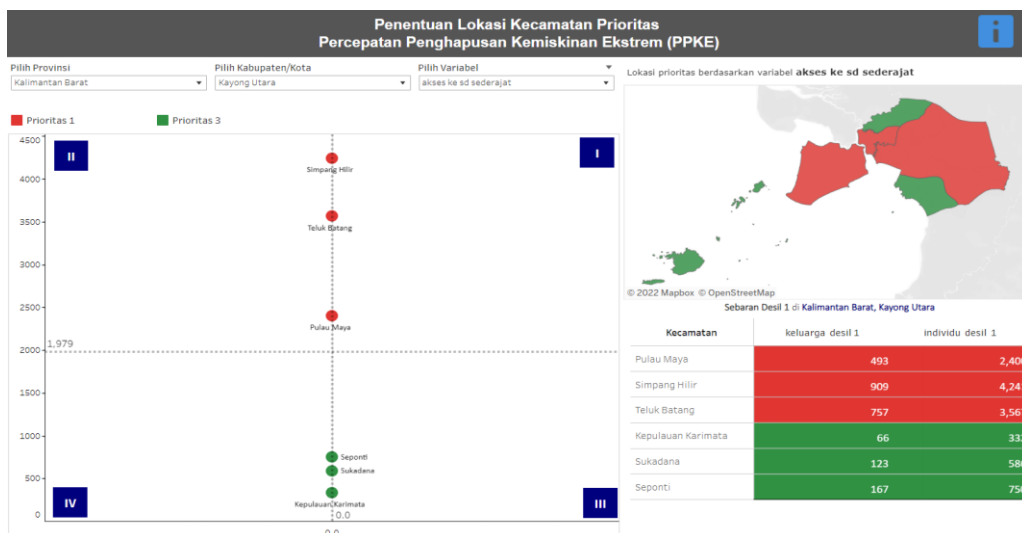
**Gambar 5.11.** Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke SMP sederajat Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara



11. Jumlah penduduk desil 1 (10 persen terbawah) berdasarkan variabel Akses ke SMP sederajat menghasilkan Kecamatan Simpang Hilir, Teluk Batang dan Pulau Maya sebagai wilayah prioritas kedua, Kecamatan Seponti prioritas ketiga. Kecamatan Kepulauan Karimata dan Sukadana prioritas terakhir. (Gambar 5.11)



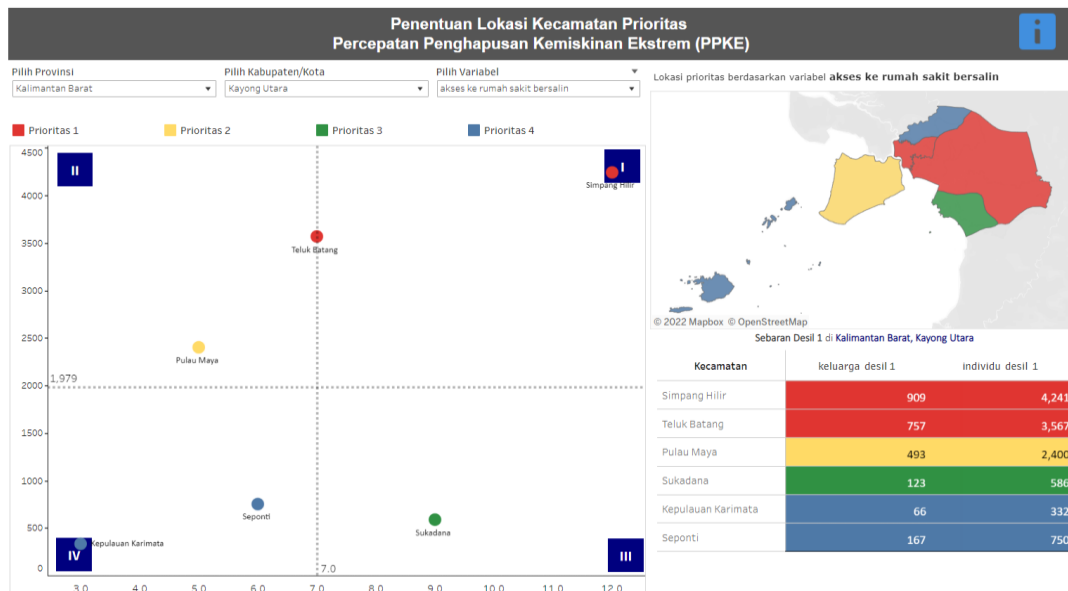
**Gambar 5.12.** Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke SMA sederajat Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara



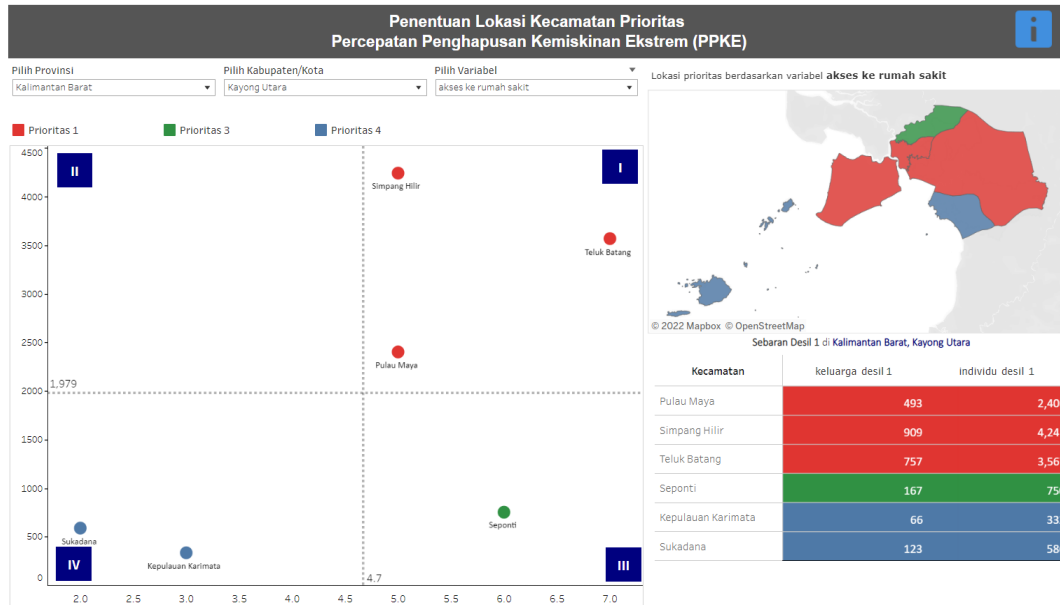
**Gambar 5.13.** Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke SD sederajat Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara



12. Jumlah penduduk desil 1 (10 persen terbawah) berdasarkan variabel Akses ke SMA sederajat menghasilkan Kecamatan Simpang Hilir sebagai wilayah prioritas pertama, Kecamatan Teluk Batang dan Pulau Maya prioritas kedua, Kecamatan Kepulauan Karimata prioritas ketiga. Kecamatan Seponti dan Sukadana prioritas terakhir. (Gambar 5.12)
13. Jumlah penduduk desil 1 (10 persen terbawah) berdasarkan variabel Akses ke SD sederajat menghasilkan Kecamatan Simpang Hilir, Teluk Batang dan Pulau Maya sebagai wilayah prioritas pertama, Kecamatan Kepulauan Karimata, Sukadana, dan Seponti prioritas ketiga. (Gambar 5.13)

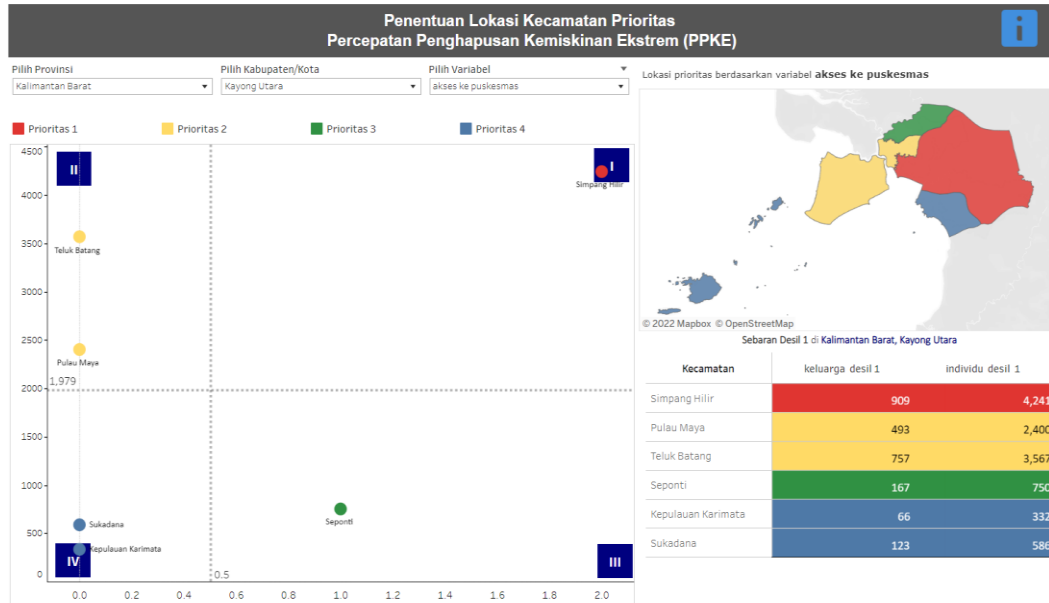


**Gambar 5.14.** Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke Rumah Sakit Bersalin Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara



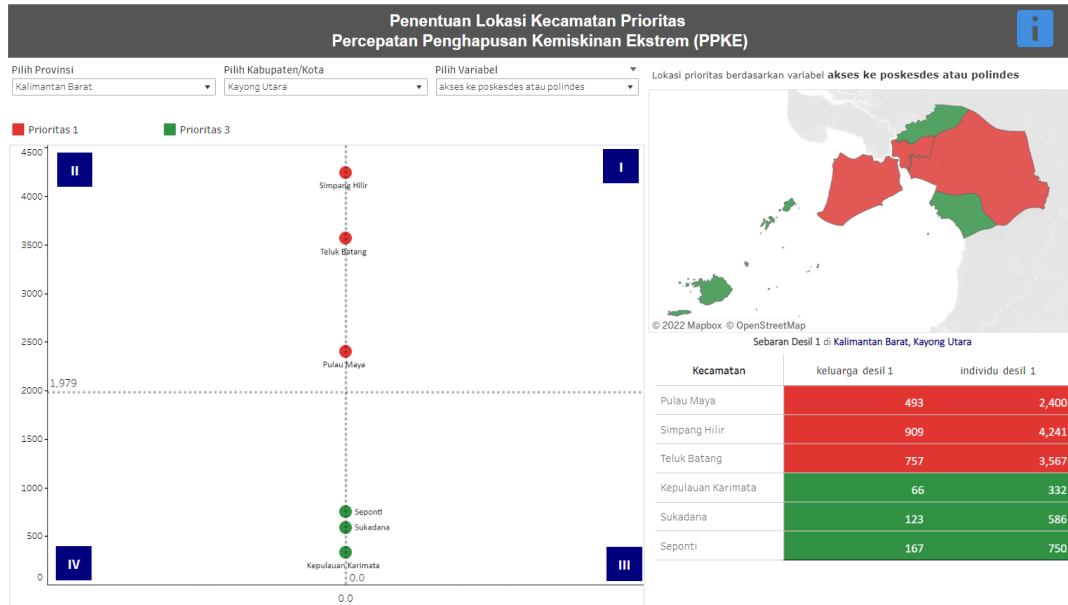
**Gambar 5.15.** Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke Rumah Sakit Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara

14. Jumlah penduduk desil 1 (10 persen terbawah) berdasarkan variabel Akses ke Rumah Sakit Bersalin menghasilkan Kecamatan Simbang Hilir dan Teluk Batang sebagai wilayah prioritas pertama, Kecamatan Pulau Maya prioritas kedua, Kecamatan Sukadana prioritas ketiga. Kecamatan Kepulauan Karimata dan Seponti prioritas terakhir. (Gambar 5.14)
15. Jumlah penduduk desil 1 (10 persen terbawah) berdasarkan variabel Akses ke Rumah Sakit menghasilkan Kecamatan Simbang Hilir, Teluk Batang, dan Pulau Maya sebagai wilayah prioritas pertama, Kecamatan Seponti prioritas ketiga. Kecamatan Kepulauan Karimata dan Sukadana prioritas terakhir. (Gambar 5.15)

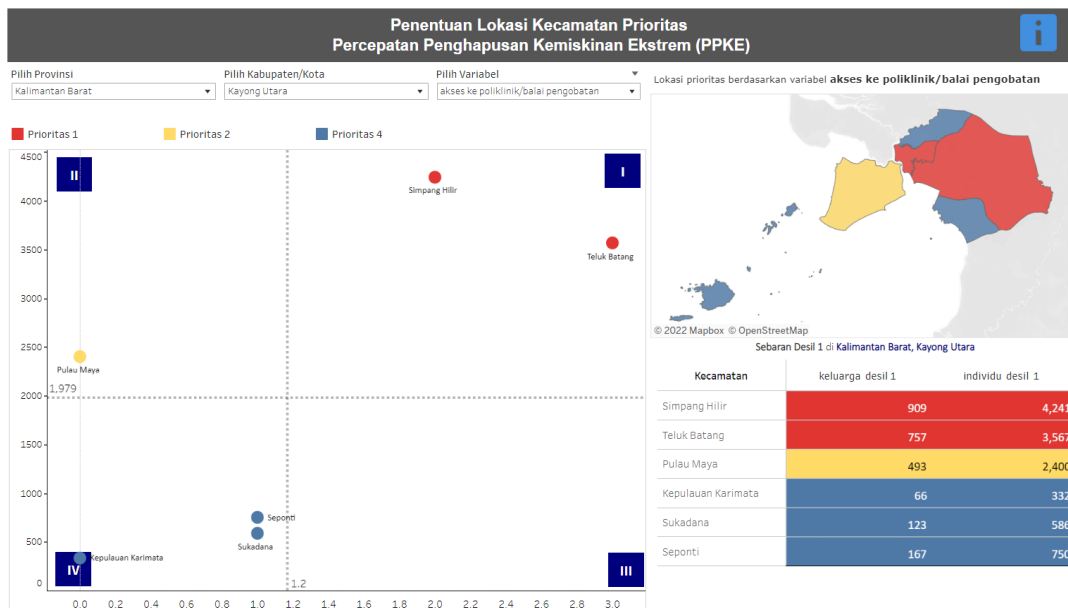


**Gambar 5.16.** Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke Puskesmas Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara

16. Jumlah penduduk desil 1 (10 persen terbawah) berdasarkan variabel Akses ke Puskesmas menghasilkan Kecamatan Simpang Hilir sebagai wilayah prioritas pertama, Kecamatan Teluk Batang dan Pulau Maya prioritas kedua, Kecamatan Seponti prioritas ketiga, Kecamatan Kepulauan Karimata dan Sukadana prioritas terakhir. (Gambar 5.16)
17. Jumlah penduduk desil 1 (10 persen terbawah) berdasarkan variabel Akses ke Puskesmas atau Polindes menghasilkan Kecamatan Pulau Maya, Simpang Hilir, dan Teluk Batang sebagai wilayah prioritas pertama, Kecamatan Kepulauan Karimata, Sukadana, dan Seponti prioritas ketiga. (Gambar 5.17)



**Gambar 5.17.** Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke Puskesmas atau Polindes Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara



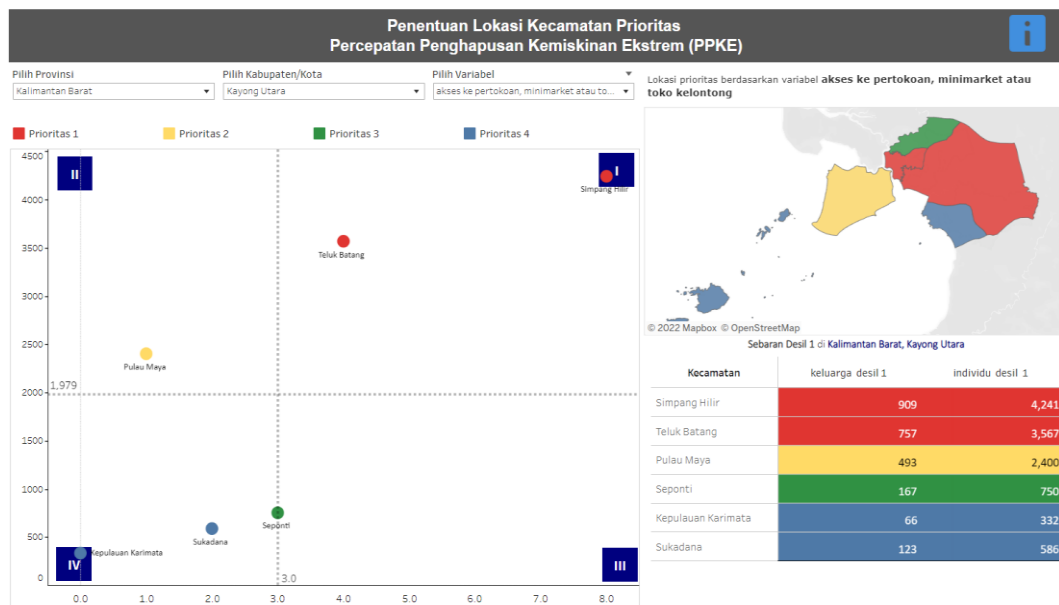
**Gambar 5.18.** Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke Poliklinik/Balai Pengobatan Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara

- Jumlah penduduk desil 1 (10 persen terbawah) berdasarkan variabel Akses ke Poliklinik/Balai Pengobatan menghasilkan Kecamatan Simpang Hilir dan

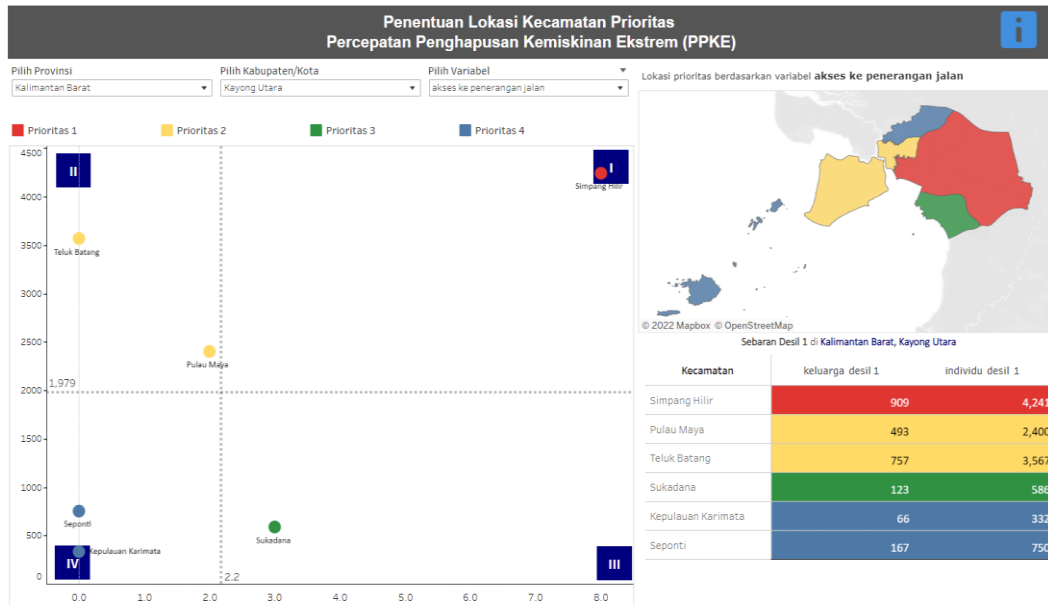


Teluk Batang sebagai wilayah prioritas pertama, Kecamatan Pulau Maya prioritas kedua, Kecamatan Kepulauan Karimata, Sukadana, dan Seponti prioritas terakhir. (Gambar 5.18)

19. Jumlah penduduk desil 1 (10 persen terbawah) berdasarkan variabel Akses ke Pertokoan, Minimarket, atau Toko Kelontong menghasilkan Kecamatan Simpang Hilir dan Teluk Batang sebagai wilayah prioritas pertama, Kecamatan Pulau Maya prioritas kedua, Kecamatan Seponti prioritas ketiga, Kecamatan Kepulauan Karimata dan Sukadana prioritas terakhir. (Gambar 5.19)

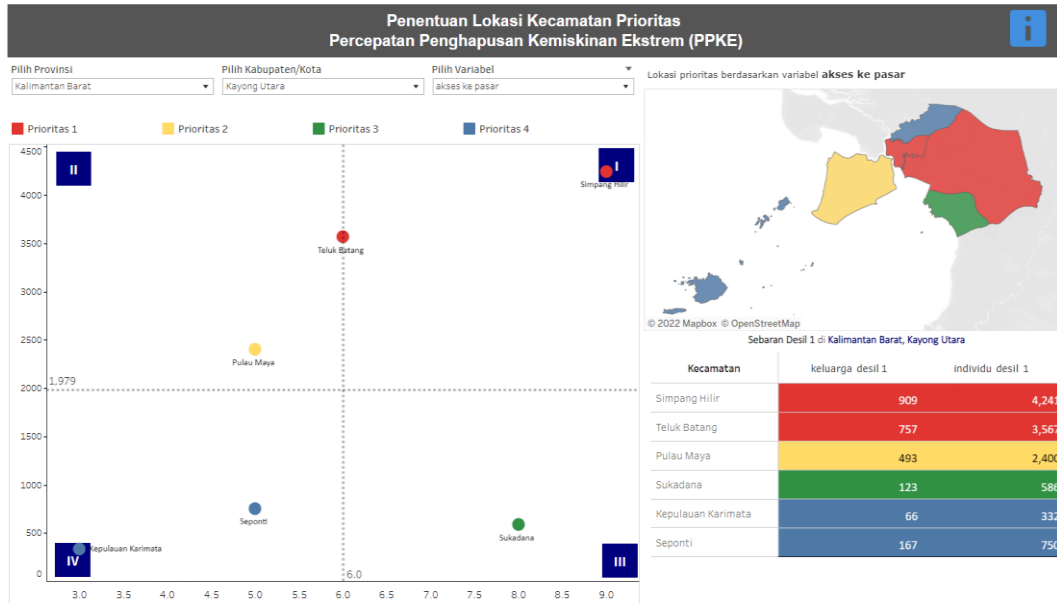


**Gambar 5.19.** Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke Pertokoan, Minimarket, atau Toko Kelontong Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara



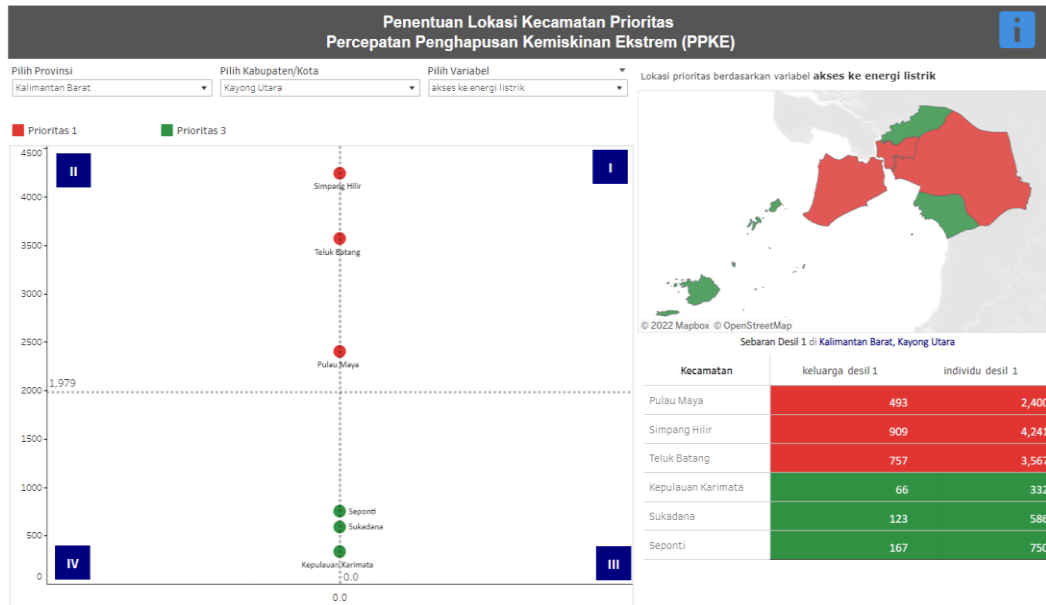
**Gambar 5.20.** Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke Penerangan Jalan Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara

20. Jumlah penduduk desil 1 (10 persen terbawah) berdasarkan variabel Akses ke Penerangan Jalan menghasilkan Kecamatan Simpang Hilir sebagai wilayah prioritas pertama, Kecamatan Pulau Maya dan Teluk Batang prioritas kedua, Kecamatan Sukadana prioritas ketiga, Kecamatan Kepulauan Karimata dan Seponti prioritas terakhir. (Gambar 5.20)
21. Jumlah penduduk desil 1 (10 persen terbawah) berdasarkan variabel Akses ke Pasar menghasilkan Kecamatan Simpang Hilir dan Teluk Batang sebagai wilayah prioritas pertama, Kecamatan Pulau Maya prioritas kedua, Kecamatan Sukadana prioritas ketiga, Kecamatan Kepulauan Karimata dan Seponti prioritas terakhir. (Gambar 5.21)

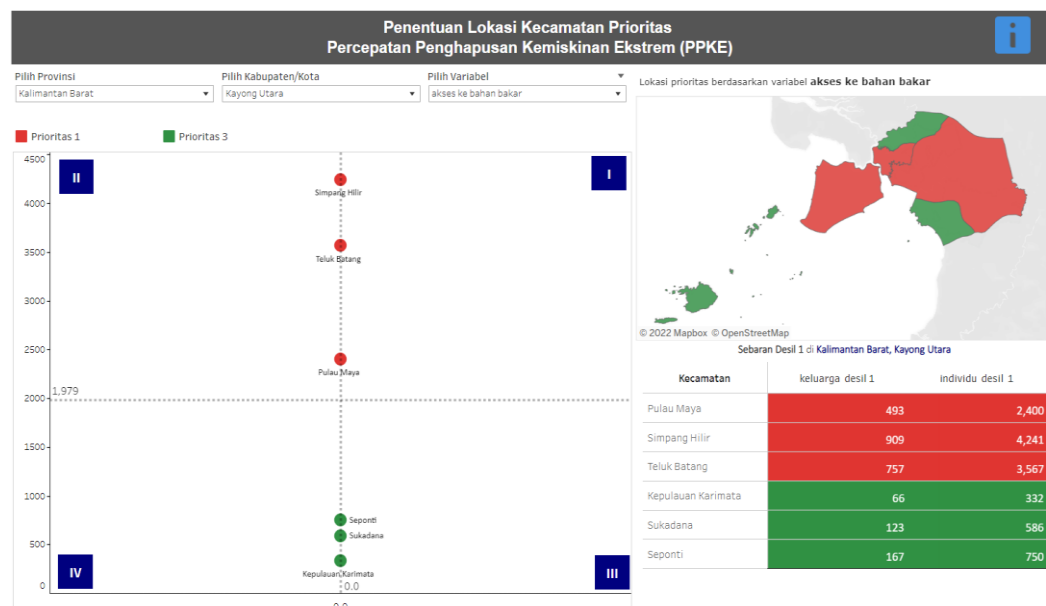


**Gambar 5.21.** Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke Pasar Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara

22. Jumlah penduduk desil 1 (10 persen terbawah) berdasarkan variabel Akses ke Energi Listrik menghasilkan Kecamatan Pulau Maya, Simpang Hilir dan Teluk Batang sebagai wilayah prioritas pertama, Kecamatan Kepulauan Karimata, Sukadana, dan Seponti prioritas ketiga. (Gambar 5.22)
23. Jumlah penduduk desil 1 (10 persen terbawah) berdasarkan variabel Akses ke Bahan Bakar menghasilkan Kecamatan Pulau Maya, Simpang Hilir dan Teluk Batang sebagai wilayah prioritas pertama, Kecamatan Kepulauan Karimata, Sukadana, dan Seponti prioritas ketiga. (Gambar 5.23)



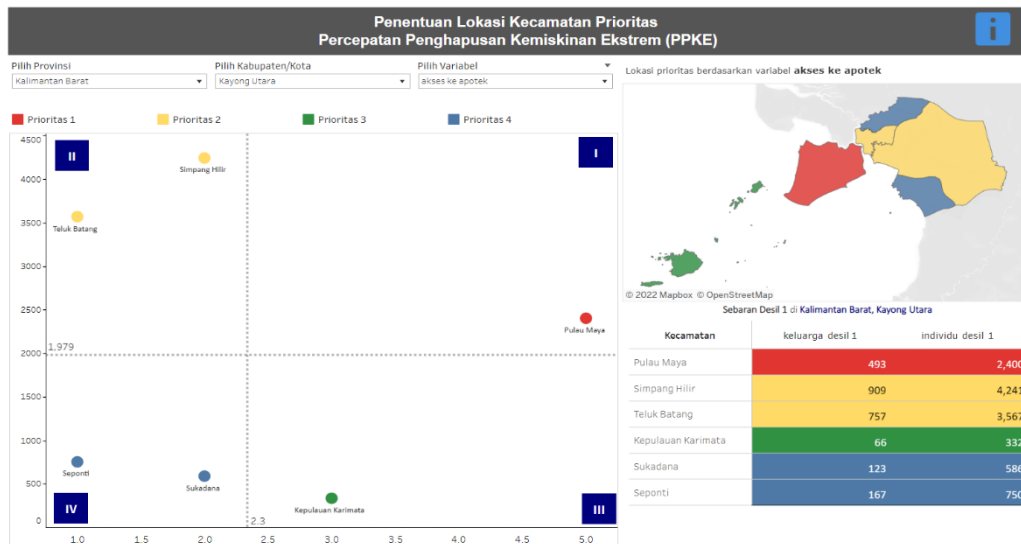
**Gambar 5.22.** Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke Energi Listrik Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara



**Gambar 5.23.** Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke Bahan Bakar Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara



24. Jumlah penduduk desil 1 (10 persen terbawah) berdasarkan variabel Akses ke Apotek menghasilkan Kecamatan Pulau Maya sebagai wilayah prioritas pertama, Kecamatan Simpang Hilir dan Teluk Batang prioritas kedua, Kecamatan Kepulauan Karimata prioritas ketiga, Kecamatan Sukadana dan Seponti prioritas terakhir. (Gambar 5.24)



**Gambar 5.24.** Analisis Kuadran Penduduk Desil 1 terhadap variabel Akses ke Apotek Menurut Kecamatan Kabupaten Kayong Utara

Secara ringkas dari 24 analisis kuadran diatas, dapat disimpulkan dalam Tabel 5.1 berikut. Di setiap variabel dipetakan di kuadran berapa masing-masing kecamatan, dan akhirnya posisi relative kecamatan tertentu dapat dilihat dari rata-rata keseluruhan variabel. Secara peringkat dari yang terbaik berturut-turut adalah Kecamatan Sukadana dengan rata-rata 3,58; Kecamatan Kepulauan Karimata dengan rata-rata 3,46; Kecamatan Seponti dengan rata-rata 3,38; Kecamatan Pulau Maya dengan rata-rata 1,58; Kecamatan Tetuk Batang dengan rata-rata 1,46; dan Kecamatan Simpang Hilir dengan rata-rata 1,25.



**Tabel 5.1.**  
Posisi Kuadran Kecamatan Menurut Variabel Kabupaten Kayong Utara

Kecamatan	Nilai Indeks Kesulitan Geografis	Nilai Indeks Dimensi Pelayanan dasar	Nilai Indeks Dimensi Infra-struktur	Nilai Indeks Dimensi Aksesibilitas	Lalu Lintas dan Kualitas Jalan	Ketersediaan Angkutan Umum
Simpang Hilir	2	2	1	2	1	1
Teluk Batang	2	1	2	2	1	1
Pulau Maya	1	2	1	2	1	2
Sukadana	4	4	4	4	3	3
Seponti	4	3	4	4	3	3
Kepulauan Karimata	3	3	4	3	3	4

Lanjutan Tabel 5.1.

Kecamatan	Aksesibilitas Jalan	Akses ke TK/RA/BA	Akses ke Tempat Praktek Dokter	Akses ke Tempat Praktek Bidan	Akses ke SMP Sederajat	Akses ke SMA Sederajat
Simpang Hilir	1	1	1	2	2	1
Teluk Batang	1	2	2	2	2	2
Pulau Maya	1	2	2	2	2	2
Sukadana	3	4	4	4	4	4
Seponti	3	3	3	3	3	4
Kepulauan Karimata	3	3	3	4	4	3



Lanjutan Tabel 5.1.

Kecamatan	Akses ke SD Sederajat	Akses ke Rumah Sakit Bersalin	Akses ke Rumah Sakit	Akses ke Puskesmas	Akses ke Poskesdes atau Polindes	Akses ke Poliklinik / Balai Pengobatan
Simpang Hilir	1	1	1	1	1	1
Teluk Batang	1	1	1	2	1	1
Pulau Maya	1	2	1	2	1	2
Sukadana	3	3	4	4	3	4
Seponti	3	4	3	3	3	4
Kepulauan Karimata	3	4	4	4	3	4

Lanjutan Tabel 5.1.

Kecamatan	Akses ke Pertokoan, Mini market atau Toko Kelontong	Akses ke Pene-rangan Jalan	Akses ke Pasar	Akses ke Energi Listrik	Akses ke Bahan Bakar	Akses ke Apotek	Rata-rata
Simpang Hilir	1	1	1	1	1	2	<b>1,25</b>
Teluk Batang	1	2	1	1	1	2	<b>1,46</b>
Pulau Maya	2	2	2	1	1	1	<b>1,58</b>
Sukadana	4	3	3	3	3	4	<b>3,58</b>
Seponti	3	4	4	3	3	4	<b>3,38</b>
Kepulauan Karimata	4	4	4	3	3	3	<b>3,46</b>

### 5.3. Analisis Pengelompokan Wilayah Desa

Wilayah yang menjadi prioritas intervensi berdasarkan indikator kemiskinan, dapat diketahui dengan melakukan proses pemetaan wilayah berdasarkan capaian indikator kemiskinan. Untuk menghindari program yang berjalan parsial, maka dilakukan pengelompokan wilayah dalam hal ini desa



berdasarkan karakteristik yang sama dalam suatu kelompok.

Analisis Cluster merupakan suatu metode dalam analisis peubah ganda yang bertujuan untuk mengelompokkan  $n$  satuan pengamatan ke dalam  $k$  kelompok dengan ( $k < n$ ) berdasarkan  $p$  peubah, sehingga unit-unit pengamatan dalam satu kelompok mempunyai ciri-ciri yang lebih homogen dibandingkan unit pengamatan dalam kelompok lain. Pada analisis ini terdapat dua metode diantaranya metode hierarki dan nonhierarki.

Solusi Cluster Analysis bersifat tidak unik, anggota cluster untuk tiap penyelesaian/solusi tergantung pada beberapa elemen prosedur dan beberapa solusi yang berbeda dapat diperoleh dengan mengubah satu elemen atau lebih. Solusi cluster secara keseluruhan bergantung pada variabel-variabel yang digunakan sebagai dasar untuk menilai kesamaan. Penambahan atau pengurangan variabel-variabel yang relevan dapat mempengaruhi substansi hasil cluster.

Secara umum cluster analysis, bisa dikatakan sebagai proses menganalisa baik tidaknya suatu proses pembentukan cluster. Analisa cluster bisa diperoleh dari kepadatan cluster yang dibentuk (cluster density). Kepadatan suatu cluster bisa ditentukan dengan variance within cluster ( $V_w$ ) dan variance between cluster ( $V_b$ ). Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan cluster yang ideal adalah batasan variance, yaitu dengan menghitung kepadatan cluster berupa variance within cluster ( $V_w$ ) dan variance between cluster ( $V_b$ ). Cluster yang ideal mempunyai  $V_w$  minimum yang merepresentasikan internal homogenitas dan maksimum  $V_b$  yang menyatakan external homogenitas.

$$V = \frac{V_w}{V_b}$$

Meskipun minimum  $V_w$  menunjukkan nilai cluster yang ideal, tetapi pada beberapa kasus kita tidak bisa menggunakannya secara langsung untuk mencapai global optimum. Jika kita paksakan, maka solusi yang dihasilkan akan jatuh pada local optima. Adapun ciri Cluster Analysis yang baik adalah cluster yang mempunyai:

1. Homogenitas (kesamaan) yang tinggi antar anggota dalam satu kelompok (*variance within-cluster*).



2. Heterogenitas (perbedaan) yang tinggi antar kelompok yang satu dengan kelompok lainnya (*variance between-cluster*).

Seperti hal teknik analisis lain, analisis cluster juga menetapkan adanya suatu asumsi. Ada dua asumsi dalam analisis cluster, yaitu:

1. Kecukupan Sampel untuk Merepresentasikan/Mewakili Populasi

Biasanya suatu penelitian dilakukan terhadap populasi diwakili oleh sekelompok sampel. Sampel yang digunakan dalam Cluster Analisis harus dapat mewakili populasi yang ingin dijelaskan, karena analisis ini baik jika sampel representatif. Jumlah sampel yang diambil tergantung penelitinya, seorang peneliti harus yakin bahwa sampel yang diambil representatif terhadap populasi.

2. Pengaruh Multikolinieritas

Ada atau tidaknya multikolinieritas antar variabel sangat diperhatikan dalam Cluster Analysis karena hal itu berpengaruh, sehingga variabel-variabel yang bersifat multikolinieritas secara eksplisit dipertimbangkan dengan lebih seksama.

#### a. Metode Hierarki

Metode ini memulai pengclusteran data dengan dua atau lebih objek yang mempunyai kesamaan paling dekat kemudian dilanjutkan ke objek lain yang mempunyai kedekatan kedua dan seterusnya sampai cluster akan membentuk semacam pohon sehingga ada tingkatan yang jelas antar objek, dari yang paling mirip sampai yang paling tidak mirip sehingga pada akhirnya hanya akan terbentuk sebuah cluster.

Tipe dasar dalam metode ini adalah agglomerasi dan pemecahan. Dalam metode agglomerasi tiap observasi pada mulanya dianggap sebagai cluster tersendiri sehingga terdapat cluster sebanyak jumlah observasi. Kemudian dua cluster yang terdekat kesamaannya digabung menjadi suatu cluster baru, sehingga jumlah cluster berkurang satu pada tiap tahap. Sebaliknya pada metode pemecahan dimulai dari satu cluster besar yang mengandung seluruh observasi, selanjutnya observasi-observasi yang paling



tidak sama dipisah dan dibentuk cluster-cluster yang lebih kecil. Proses ini dilakukan hingga tiap observasi menjadi cluster sendiri-sendiri.

Hal penting dalam metode hierarki adalah bahwa hasil pada tahap sebelumnya selalu bersarang di dalam hasil pada tahap berikutnya, membentuk sebuah pohon. Atau dengan metode ini, data tidak langsung dikelompokkan ke dalam beberapa cluster dalam 1 tahap, tetapi dimulai dari 1 cluster yang mempunyai kesamaan, dan berjalan seterusnya selama beberapa iterasi, hingga terbentuk beberapa cluster tertentu. Arah hierarki clustering dibagi 2, yaitu *divisive* dan *agglomerative*.

Penggunaan analisis cluster sudah jamak digunakan dan dipermudah dengan aplikasi-aplikasi statistik yang berkembang seperti SPSS, Minitab, atau R dan masih banyak lagi. Beberapa algoritma hierarki clustering yang dipakai dalam metode pengclusteran antara lain:

1. Pautan Tunggal (*Single Linkage Hierarki Method/SLHM*)

Bila ada dua cluster hendak digabungkan atau tidak perlu diperhatikan cukup satu anggota dari masing-masing cluster yang keduanya berhubungan atau berjarak paling dekat. Jika sebuah cluster digabungkan hanya karena paling dekat dengan salah satu anggota maka metode ini bisa menyebabkan interpretasi cluster yang tidak jelas. Dua cluster digabungkan pada setiap tahap yang berdasarkan jarak paling dekat di antara keduanya sehingga proses ini berlanjut terus sampai diperoleh satu cluster.

2. Pautan Lengkap (*Complete Linkage Hierarki Method/CLHM*)

Dalam metode pautan lengkap, ditentukan dan jarak terjauh antara dua objek pada kelompok yang berbeda (Furthest Neighbor). Metode ini dapat pula digunakan dengan baik untuk kasus dimana objek-objek yang ada berasal dan kelompok yang benar-benar berbeda. Pada metode ini tahap pertama yang harus dilakukan adalah menemukan jarak terdekat antara kelompok-kelompok tersebut.

3. Pautan Rata-rata (*Average Linkage Hierarki Method/ALHM*)

Metode ini bertujuan meminimumkan rata-rata jarak semua pasangan pengamatan dan dua kelompok yang digabungkan serta cenderung



membentuk kelompok dengan ragam kecil. Pada berbagai keadaan, metode ini dianggap lebih stabil dibandingkan dengan kedua metode sebelumnya. Pada metode ini tahap pertama yang harus dilakukan adalah sama seperti metode-metode sebelumnya yaitu menemukan jarak terkecil dari matriks jarak, kemudian menggabungkan objek-objek yang sesuai.

#### 4. Metode Ward (*Ward's Method*)

Metode ini cenderung digunakan untuk mengkombinasi cluster-cluster dengan jumlah kecil. Dihubungkan pada *centroid methods* yang bahwa itu juga mengarah pada sebuah perwakilan geometrik yang mana pada *cluster centroids* memerankan sebuah aturan yang penting. Untuk membentuk cluster-cluster, metode tersebut meminimalisir sebuah fungsi objektif yang dalam masalah ini, persamaan ukuran “*squared error*” seperti yang digunakan dalam MANOVA.

#### 5. *Centroid Linkage Hierarki Method*

*Centroid Linkage* adalah proses pengclusteran yang didasarkan pada jarak antar *centroid*-nya. Metode ini bagus untuk memperkecil *variance within cluster* karena melibatkan *centroid* pada saat penggabungan antar cluster. Metode ini juga baik untuk data yang mengandung outlier.

### b. Metode Non-hirarki

Metode ini dimulai dengan proses penentuan jumlah cluster terlebih dahulu, yang bertujuan mengelompokkan  $n$  obyek kedalam  $k$  kelompok. Analisis cluster non hirarki salah satunya dan yang paling populer adalah analisis cluster dengan K-Means Cluster. Ciri khas dari analisis cluster yang satu ini adalah kita menentukan sendiri dari awal berapa cluster yang akan kita bentuk. merupakan salah satu metode data *clustering* non hirarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih *cluster*/kelompok. Metode ini mempartisi data ke dalam *cluster*/kelompok sehingga data yang memiliki karakteristik sama dikelompokkan ke dalam satu *cluster* yang sama. Metode *k-means* digunakan sebagai alternatif metode cluster untuk data dengan ukuran yang besar karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan metode hirarki.



Penggunaan *k-means* untuk menjelaskan algoritma dalam penentuan suatu objek ke dalam cluster tertentu berdasarkan rata-rata terdekat. Proses pengelusteran dengan metode *k-means* adalah:

1. Menentukan besarnya *k*, yaitu banyaknya cluster dan menentukan *centroid* di tiap cluster.
2. Menghitung jarak tiap objek dengan setiap *centroid*.
3. Menghitung kembali rata-rata (*centroid*) untuk cluster yang baru terbentuk.
4. Mengulangi langkah 2 sampai tidak ada lagi pemindahan objek antar cluster.
5. Setelah cluster terbentuk, baik dengan metode hirarki maupun non hirarki, langkah selanjutnya melakukan interpretasi terhadap cluster yang terbentuk, yang pada intinya memberi nama spesifik untuk menggambar isi cluster tersebut.

Alternatif lain adalah dengan mengkombinasikan kedua metode ini. Pertama, gunakan metode kemudian hirarki dilanjutkan dengan metode *nonhierarki*. Untuk mengelompokkan desa prioritas program di Kabupaten Kayong Utara, dilakukan kombinasi kedua metode. Tahap 1 menggunakan metode hirarki dengan algoritma Metode Ward. Setelah mempelajari pola pengelompokan dengan metode hirarki maka dilakukan clustering ulang menggunakan metode non-hierarki *k-means*.

### c. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan untuk mengelompokkan desa-desa yang ada di Kabupaten Kayong Utara adalah:

1. Jumlah Kelompok Tani Pemula (Dinas.....)
2. Sumber Air Minum (Data Podes 2021, BPS)
3. Sumber Air Mandi/Cuci (Data Podes 2021, BPS)
4. Persentase Rumah tangga Pengguna PLN (Data Podes 2021, BPS)
5. Persentase Rumah tangga Pengguna Non PLN (Data Podes 2021, BPS)
6. Jumlah PAUD (Data Podes 2021, BPS)
7. Jumlah TK (Data Podes 2021, BPS)



8. Jumlah SD sampai dengan SMA/ sederajat (Data Podes 2021, BPS)
9. Jumlah Fasilitas Kesehatan (Data Podes 2021, BPS)
10. Jumlah Fasilitas Ekonomi (Toko Pasar DII) (Data Podes 2021, BPS)
11. Jumlah Koperasi (Data Podes 2021, BPS)
12. Jumlah Industri Kecil Mikro (Dinas.....)
13. Persentase penduduk miskin (<https://p3ke.kemenkopmk.go.id>)

Adapun hasil pengelompokan yang diolah dengan menggunakan metode gabungan antara metode hierarki dan non-hierarki, menghasilkan 4 kelompok dengan anggota kelompok dan karakteristik menurut kelompok serta prioritas program menurut kelompok terdapat dalam Tabel 5.1 berikut.

**Tabel 5.2.**

Kelompok Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kayong Utara Hasil Analisis Cluster

Kelompok	Anggota (Desa)	Karakteristik	Program yang Sesuai
1	Dusun Besar, Tanjung Satai, Dusun Kecil, Kemboja, Satai Lestari, Sejahtera, Padu Banjar, Pulau Kumbang, Nipah Kuning, Rantau Panjang, Sungai Mata-mata, Teluk Batang, Teluk Batang Selatan	kantong kemiskinan, kantong petani gurem, gaya hidup sehat kurang, ekonomi sekunder (industri dan perdagangan kurang), infrastruktur pendidikan dan kesehatan bagus,	(13 desa) Prioritas Pertama Kemiskinan Bidang Ekonomi.
2	Simpang Tiga, Benawai Agung, Harapan Mulia, Sedahan Jaya, Gunung Sembilan, Pampang Harapan, Riam Berasapjaya, Pemangkat, Penjalaan, Batu Barat, Medan Jaya, Sungai Paduan, Alur Bandung, Mas Bangun, Banyu Abang, Teluk Batang Utara, Podo Rukun, Wonorejo, Telaga Arum, Sungai Sepeti	Petani gurem rata-rata, penduduk miskin masih banyak, ekonomi sekunder kurang, gaya hidup sehat masih bisa ditingkatkan, infrastruktur pendidikan dan kesehatan kurang	(20 Desa) Prioritas Kedua Kemiskinan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan



3	Betok Jaya, Padang, Pelapis, Matan Jaya, Lubuk Batu, Durian Sebatang	Petani gurem di bawah rata-rata, Penduduk miskin tidak banyak, gaya hidup sehat masih bisa ditingkatkan, ekonomi sekunder kurang, infrastruktur pendidikan dan kesehatan bagus	(6 desa) Prioritas Ketiga Kemiskinan Bidang Ekonomi
4	Pangkalan Buton, Sutra, Teluk Melanau, Seponti Jaya	Petani gurem rata-rata, gaya hidup sehat sudah bagus, infrastruktur pendidikan dan kesehatan bagus hanya PAUD yang kurang, ekonomi bagus, kemiskinan paling kecil	(4 Desa) Bukan Prioritas Kemiskinan

Dari Tabel 5.1. di atas, dapat dilakukan pendekatan komprehensif secara kewilayahan, gabungan pendekatan program prioritas maupun lokasi prioritas. Mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk prioritas-prioritas permasalahan dikarakteristik masing-masing kelompok akan sangat efektif secara kewilayahan. Contoh pada kelompok 1 sebagai lokasi dengan persentase penduduk miskin besar atau kantong kemiskinan dapat dilakukan evaluasi terhadap jangkauan/capaian jaminan sosial secara nasional apabila masih rendah dibanding kelompok lain harusnya jaminan sosial dari APBD dapat ditingkatkan untuk meningkatkan coverage jaminan sosial yang ada. Penggunaan Dana Desa juga dapat mengarah ke peningkatan infrastruktur kesehatan seperti jamban, sumur air bersih, pipanisasi mata air, yang berkolaborasi dengan program prioritas dari Dinas pengampu bidang infratraktur dan kesehatan. Petani gurem yang direpresentasikan dari data kelompok tani pemula paling besar di kelompok 1, maka program pemberdayaan ekonomi ke home indutry dari produk local desa tersebut atau penggunaan lahan pekarangan atau perdagangan hasil industry yang bersaing, dapat meningkatkan pendapatan keluarga oleh Dinas pengampu bidang ekonomi.

Kelompok 4 adalah 4 desa yang bukan prioritas kemiskinan bukan berarti tidak boleh tersentuh program, namun tetap perlu dipertahankan hal-hal yang sudah baik seperti gaya hidup sehat dengan penggunaan air bersih



dan layak serta sanitasi layak. Kekurangan kelompok ini adalah belum ada PAUD, dapat diprioritaskan dengan program kemitraan dengan pihak swasta. Petani gurem melalui kelompok tani pemula tetap diberdayakan dengan program dari Dinas terkait serta pengembangan kearah pengolahan produk pertanian dan perdagangannya. Kelompok 3 dengan 6 desa lebih fokus ke pemberdayaan ekonomi kearah pengolahan dan pemasaran/perdagangannya.

Kelompok 2 dengan jumlah desa terbesar yaitu 20 desa, lebih kearah Pendidikan dan kesehatan yang secara infratraktur masih kurang memadai dibandingkan kelompok lain. Untuk kualitas capaian Pendidikan dan kesehatan penduduk tentu membutuhkan data lebih detail, dan konfirmasi capaiannya menggunakan infrastruktur di wilayah mana. Seperti kasus Desa Wonorejo, Telaga Arum, dan Sungai Sepeti yang memiliki infrastruktur air bersih melalui program Pamsimas ternyata mayoritas penduduknya masih menggunakan air hujan sebagai sumber air minum. Sosialisasi gaya hidup sehat untuk beralih ke sumber air yang lebih baik, atau evaluasi program pipanisasi terkait keberlanjutan atau ketersediaan air sepanjang tahun dapat dilakukan.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026 dilakukan untuk meningkatkan awareness para pemangku kepentingan terhadap kebijakan pencapaian penurunan angka kemiskinan yang merupakan isu yang berlaku secara nasional maupun di Daerah.

Sesuai dengan target penurunan angka kemiskinan yang ingin dicapai, RPKD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026 diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan prioritas pembangunan ke depan, terutama dalam konteks penanggulangan kemiskinan.

Implementasi RPKD dapat terwujud apabila terintegrasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah, baik jangka panjang, menengah maupun tahunan. Dalam penyusunan RPKD tersebut perlu komitmen dalam koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar perangkat daerah pengampu urusan lingkup Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

**BUPATI KAYONG UTARA,**

**CITRA DUANI**

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
											Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)		
1	Perdagangan	Peningkatan Kualitas UMKM	Meningkatnya Usaha Mikro yang berkualitas	Cakupan Binaan IKM	Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Persentase pelaku usaha mikro yang mendapatkan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang dilakukan Mendapatkan Fasilitas Pendataan, Kemitraan serta Kemudahan Perizinan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (Updating data UMKM)	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10000 Unit Usaha	50.000.000					43 Desa	APBD
			Meningkatnya Usaha Mikro yang berkualitas	Cakupan Binaan IKM	Program Pengembangan UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Desain dan Teknologi (Pelatihan peningkatan kualitas Usaha)	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1 Unit Usaha @10 Pelaku Usaha	50.000.000	1 Unit Usaha @10 Pelaku Usaha	50.000.000				APBD
			Meningkatnya Usaha Mikro yang berkualitas	Cakupan Binaan IKM	Program Pengembangan UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (Bantuan peralatan kepada UMKM)	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1 Unit Usaha @10 Pelaku Usaha	50.000.000	1 Unit Usaha @10 Pelaku Usaha	50.000.000				APBD
2	Pekerjaan Umum	Penuntasan Sanitasi Layak	meningkatnya Rumah yang bersanitasi aman	Persentase Rumah tinggal Bersanitasi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah tinggal Bersanitasi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	2143	15.000.000.000	2500	17.500.000.000	2857	20.000.000.000	Sukadana, Simpang Hilir, Teluk Batang, Seponti, Pulau Maya dan Kepulauan Karimata	APBN
		Penuntasan Air Minum Layak	Meningkatnya Jumlah Pengguna Air Bersih/ Air Minum	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Jaringan Air Bersih	2000	10.000.000.000	2500	12.500.000.000	3000	15.000.000.000	Sukadana, Simpang Hilir, Teluk Batang, Seponti, Pulau Maya dan Kepulauan Karimata	APBD, APBN
3	Perumahan dan Permukiman	Penuntasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Meningkatkan Cakupan Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	Program Kawasan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Hektar	Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	5 Rumah Tidak Layak Huni	175.000.000	5 Rumah Tidak Layak Huni	175.000.000	5 Rumah Tidak Layak Huni	175.000.000	Batu Barat, Matan Jaya, Simpang Tiga	APBD, APBN, DAK
4	Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan		Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan Umum Daratan Kabupaten Kayong Utara (Ton)	Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	3 Unit	150.000.000	3 Unit	150.000.000	3 Unit	150.000.000	Kec. Sukadana, Kec. Simpang Hilir, Kec. Teluk Batang dan Kec. Seponti	APBD
											Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	2 unit
5	Ketahanan Pangan	Penguatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Penguatan Cadangan Masyarakat	Presentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Konsumsi protein dan Energi (persentase)	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah	Presentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	25 ton CPPD	400.000.000	25 ton CPPD	400.000.000	25 ton CPPD	400.000.000	Daerah prioritas penanganan kerawanan pangan	DAU
											Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor PPH	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2 Kelompok	120.000.000	3 Kelompok	180.000.000
6	Penyuluhan	Peningkatan Kapasitas Petani dan Kelembagaan Petani	Meningkatnya Kekayaan Ekonomi Daerah dibidang Pertanian	Produktivitas Tanaman Pangan Utama (Padi)	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase penyuluh dengan nilai prestasi kerja dengan kategori baik dan cakupan bina kelompok tani	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluhan dengan kinerja kategori baik dan sangat baik	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah sekolah Lapang Kelompok Tani Yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	10 sekolah lapang	100.000.000	8 sekolah lapang	80.000.000	5 sekolah lapang	50.000.000	Kabupaten Kayong Utara	DAU dan APBN
7	Ketenagakerjaan	Peningkatan kesempatan kerja	Terwujudnya angkatan kerja yang berkualitas	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota (dalam restra naker tidak ada kegiatan ini)	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang mendapatkan penagangan	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20	300.000.000	25	375.000.000	25	375.000.000	Lulusan SMK, D3 dan S1 dari keluarga yang tidak mampu yang belum menikah	APBD dan APBN
											Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelayanan antar kerja di Kabupaten	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	5	75.000.000

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan				
											Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)						
8	Kesehatan	Meningkatnya Kepesertaan BPJS	Semua Masyarakat Miskin Menjadi Peserta BPJS Kesehatan	persentase Kepesertaan BPJS Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Puskesmas per Kecamatan, Cakupan kunjungan K4 dan Cakupan Desa UCI	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terpenuhinya kepesertaan BPJS kesehatan pada masyarakat miskin	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	50083 jiwa	21.034.860.000	50.083	21.034.860.000	50.083	21.034.860.000	Kabupaten Kayong Utara	APBD				
9	Pendidikan	Penangulangan Putus Sekolah Usia 18 - 21 Tahun	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Persentase pemenuhan SPM Pendidikan (dalam renstra APS 7-15)	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya pengelolaan pendidikan (dalam renstra ada APM, angka ketulusan dll)	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang terlaksana	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan (Bantuan biaya Pendaftaran siswa Non Formal/Kesetaraan untuk jenjang paket A)	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	25	12.500.000	20	10.000.000	15	7.500.000	Dusun Kecil, Simpang Tiga, Harapan Mulia, Pulau Kumbang, Pemangkar, Batu Barat, Medan Jaya, Alur Bandung, Mas Bangun, Banyu Abang, Teluk Batang Utara, Podo Rukun, Wonorejo, Telaga Anum, Sungai Sepeti, Matan Jaya	DAU				
									Bantuan biaya Pendaftaran siswa Non Formal/Kesetaraan untuk jenjang paket B	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	25	12.500.000	20	10.000.000	15	7.500.000		DAU				
									Bantuan biaya Pendaftaran siswa Non Formal/Kesetaraan untuk jenjang paket C	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	25	12.500.000	20	10.000.000	15	7.500.000		DAU				
10	Sosial	Usaha Ekonomi Produktif	Terwujudnya perlindungan dan jaminan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),	Jumlah PMKS yang dibantu	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang tertangani	pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan	fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	jumlah orang yang mendapat bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kabupaten/kota	50 orang	200.000.000	50 orang	200.000.000	50 orang	200.000.000		APBD				
									Pengurangan Beban Pengeluaran Penyandang Disabilitas Miskin	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program Rehabilitasi Sosial	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan, pengemis di luar panti sosial	Penyediaan alat bantu (Penyediaan Kursi Roda)	jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten / kota	10 orang	20.000.000	10 orang	20.000.000	10 orang	20.000.000		APBD
									Penyediaan Perumahan Untuk Lansia dan Anak Terlantar	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perumahan sesuai dengan standar gaji minimal kewenangan kabupaten/ kota	20 ( 10 anak terlantar dan 10 lansia terlantar) Orang	73.000.000	20 ( 10 anak terlantar dan 10 lansia terlantar) Orang	73.000.000	20 ( 10 anak terlantar dan 10 lansia terlantar) Orang	73.000.000		APBD

BUPATI KAYONG UTARA

CITRA DUANI